



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 399 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, salah satu penyelenggaraan Informasi Geospasial dilakukan melalui kegiatan Penyebarluasan Data Geospasial dan Informasi Geospasial;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, penyelenggara Informasi Geospasial wajib menyebarluaskan Informasi Geospasial yang diselenggarakannya melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dalam penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diperlukan penyusunan standar penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

KESATU : Menetapkan Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Ruang lingkup dalam Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi:
- a. Klasifikasi Kewenangan Akses Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Spesifikasi Teknis Penyajian Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - c. Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETIGA : Penggunaan Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA meliputi:
- a. Klasifikasi Kewenangan Akses Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan digunakan sebagai panduan untuk mengatur klasifikasi akses bagi pengguna terhadap format dan isi keterangan Informasi Geospasial Tematik dalam penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - b. Spesifikasi Teknis Penyajian Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan digunakan sebagai pedoman penyajian peta tematik dan simbologi Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - c. Standar Operasional Prosedur Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan digunakan sebagai pedoman bagi Walidata Geospasial dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan dalam rangka penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada pengguna, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka:
- a. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tanggal 6 November 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.4/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
4. Kepala Badan Pusat Statistik;
5. Kepala Badan Informasi Geospasial;
6. Produsen Data Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
7. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah I - XXII seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 399 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PENYEBARLUASAN INFORMASI
GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

**KLASIFIKASI KEWENANGAN AKSES PENYEBARLUASAN INFORMASI
GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN**

Pengaturan di tabel ini adalah untuk mengatur Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (IGT KLHK) data format SIG (*gdb/shp*) untuk kategori Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan BUMN/BUMD) dan Perguruan Tinggi, serta format *map service* untuk kategori Eksternal (Swasta/Badan Usaha, Perorangan, Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat):

a. Kriteria penyebarluasan IGT data *gdb/shp* untuk Instansi Pemerintah dan Perguruan Tinggi:

- **RAHASIA:** data tidak dapat disebarluaskan keluar KLHK.

Data yang dapat disebarluaskan keluar KLHK dengan pengaturan atribut sebagai berikut:

- **TERBUKA:** *field* atribut dapat diunduh.
- **TERTUTUP:** *field* atribut tidak dapat diunduh.

Pemerintah Daerah menyesuaikan batas wilayah administrasi yang menjadi kewenangannya.

b. Kriteria penyebarluasan IGT *map service* ke Eksternal (Swasta/Badan Usaha, Perorangan, Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat):

- **TIDAK DISAJIKAN:** IGT tidak disajikan format *map service* pada portal SIGAP.

IGT yang disajikan format *map service* pada portal SIGAP dengan pengaturan atribut sebagai berikut:

- **TERBUKA:** *field* atribut dapat dilihat.
- **TERTUTUP:** *field* atribut tidak dapat dilihat.

I. BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

1. DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN (IPSDH)

1.1. PENUTUPAN LAHAN KAWASAN HUTAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
ID Penutupan lahan Tahun YYYY	PLYYYY_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
ID Penutupan lahan Tahun YYYY-1	PLYYYY-1_ID_R	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas	LUAS_HA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

1.2. PENUTUPAN HUTAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
ID Penutupan lahan Tahun YYYY	PLYYYY_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Luas	LUAS_HA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

1.3. POTENSI HUTAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kelas Potensi	KODE_POT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kelas Penutupan Lahan	KODE_PL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

1.4. NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH) PENUTUPAN LAHAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Perubahan Penutupan Lahan (dari tahun Y0 ke Y1)	ID_PL_PERUBAHAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Penutupan Lahan Tahun pertama Y0	PL_AWAL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Penutupan Lahan Tahun kedua Y1	PL_AKHIR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Keterangan	KETERANGAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

1.5. NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH) KAWASAN HUTAN (KH)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Fungsi Kawasan Hutan Awal	ID_F_AWAL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Fungsi Kawasan Hutan Akhir	ID_F_AKHIR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Perubahan Fungsi (dari tahun a ke b)	ID_F_PERUBAHAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
No SK Kawasan Hutan_awal	NO_SK_AWAL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
No SK Kawasan Hutan_akhir	NO_SK_AKHIR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Keterangan	KETERANGAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

1.6. PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, ATAU PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN BARU PADA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT (PIPPIB)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kategori PIPPIB	PIPPIB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup

1.7. DEFORESTASI

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Deforestasi	DEF	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

1.8. REFORESTASI

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Reforestasi	REF	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

1.9. SEBARAN KLASTER INVENTARISASI HUTAN NASIONAL

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Klaster	ID_KLASTER	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tahun Pengukuran	TAHUN_UKUR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kelas Penutupan Lahan	KODE_PL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

2. DIREKTORAT RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN (RPKHPWPH)

2.1. RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Fungsi Kawasan Hutan	FUNGSI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Arahan RKTN	RKTN2019	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

2.2. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHP DAN KPHL)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Unit Provinsi	PROV_UNIT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
ID KPH	ID_SPASIAL	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Jenis KPH	JENIS_KPH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Organisasi Pengelola	ORGANISASI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Unit KPH	UNIT_KPH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor SK Penetapan	NSKTAP	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal SK Penetapan	TGLTAP	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas SK Penetapan (Ha)	LSTAP	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor SK Penetapan KPH Provinsi	NSKPROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal SK Penetapan KPH Provinsi	TGLPROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Peraturan Gubernur	NPERGUB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal Peraturan Gubernur	TGLPERGUB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

2.3. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI (KPHK)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Fungsi Kawasan	FUNGSIKWS	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
No. SK. KPHK	NOSK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal SK. KPHK	TGLSK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas SK. KPHK (hektare)	LSSK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
ID KPH	ID_KPH	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Nama KPHK	NAMA_KPH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

2.4. KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
ID KHDTK	KHDTK_ID	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Nama KHDTK	NAMEOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Jenis KHDTK	JNSKHDTK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor SK	NOSK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal SK	TGLSK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas SK (hektare)	LSSK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Status SK	SKDFN	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Kode Provinsi	KODEPROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Pengelola	PNGLOL	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Nomor SK Penunjukan	NSKJUK	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Tanggal SK Penunjukan	TSKJUK	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Luas SK Penunjukan (hektare)	LSKJUK	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Nomor SK Penetapan	NSKTAP	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal SK Penetapan	TSKTAP	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Luas SK Penetapan (hektare)	LSKTAP	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Feature Code	FCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Layer Code	LCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Spatial Reference	SRS_ID	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Metadata	METADATA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Catatan	REMARK	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup

2.5. PETA INDIKATIF AREAL PERHUTANAN SOSIAL (PIAPS)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kriteria PIAPS	KRITERIA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Keterangan PIAPS	KETERANGAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas (Hektare)	LUAS_HA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Nama Objek	NAMOBJ	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

2.6. KAWASAN HUTAN UNTUK KETAHANAN PANGAN (KHKP)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
ID KHKP	KHKP_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama KHKP	NAMEOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor SK	NOSK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal SK	TGLSK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas SK (hektare)	LSSK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Status SK	SKDFN	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Kode Provinsi	KODE_PROV	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Pengelola	PNGLOL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor SK PAK	NSKPAK	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Tanggal SK PAK	TSKPAK	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Luas SK PAK (hektare)	LSKJUK	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Nomor SK Penetapan	NSKTAP	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Tanggal SK Penetapan	TSKTAP	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas SK Penetapan (hektare)	LSKTAP	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Feature Code	FCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Layer Code	LCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Spatial Reference	SRS_ID	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Metadata	METADATA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Catatan	REMARK	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup

2.7. PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (OPERASI PRODUKSI/NON TAMBANG)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
ID PPKH	ID_PPKH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Nama Pengguna	NAMA_PPKH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor SK PPKH	NO_PPKH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal SK PPKH	TGL_PPKH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas PPKH (Ha)	LUAS_PPKH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor SK PPKH Awal	NO_PPKH_AWAL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Tanggal SK PPKH Awal	TGL_PPKH_AWAL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Penggunaan	KODE_GUNA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Jenis Surat	JENIS_SURAT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Jenis PPKH	JENIS_PPKH	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Status	STATUS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Tanggal Berakhir	TGL_BERAKHIR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Kabupaten Kota	KABUPATEN_KOTA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Objek	NAMOBJ	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Feature Code	FCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Layer Code	LCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Metadata	METADATA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Catatan	REMARK	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup

2.8. PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (EKSPLORASI)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
ID PPKH	ID_PPKH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Nama Pengguna	NAMA_PPKH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nomor SK PPKH	NO_PPKH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal SK PPKH	TGL_PPKH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas PPKH (Ha)	LUAS_PPKH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor SK PPKH Awal	NO_PPKH_AWAL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Tanggal SK PPKH Awal	TGL_PPKH_AWAL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Penggunaan	KODE_GUNA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Jenis Surat	JENIS_SURAT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Jenis PPKH	JENIS_PPKH	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Status	STATUS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Tanggal Berakhir	TGL_BERAKHIR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Kabupaten Kota	KABUPATEN_KOTA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Objek	NAMOBJ	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Feature Code	FCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Layer Code	LCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Metadata	METADATA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Catatan	REMARK	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup

2.9. PERSETUJUAN KERJASAMA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
ID KJSM	ID_KJSM	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Pengguna	NAMA_KJSM	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nomor Kerjasama	NO_KJSM	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tanggal Kerjasama	TGL_KJSM	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Luas Kerjasama (Ha)	LUAS_KJSM	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Penggunaan	KODE_KJSM	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jenis Kerjasama	JENIS_KJSM	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Status	STATUS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tanggal Berakhir	TGL_BERAKHIR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kabupaten Kota	KABUPATEN_KOTA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Objek	NAMOBJ	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Layer Code	LCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan

2.10. PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SURVEI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
ID_SURVEI	ID_SURV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Pengguna	NAMA_SURV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nomor Survei	NO_SURV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tanggal Survei	TGL_SURV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Luas Survei (Ha)	LUAS_SURV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Penggunaan	PENGGUNAAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jenis Survei	JENIS_SURV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Status	STATUS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Tanggal Berakhir	TGL_BERAKHIR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kabupaten Kota	KABUPATEN_KOTA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Objek	NAMOBJ	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan

2.11. KAWASAN HUTAN DENGAN PENGELOLAAN KHUSUS (KHDPK)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kriteria KHDPK	KRITERIA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Luas (Ha)	LUAS	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

2.12. PENETAPAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Fungsi Kawasan	FUNGSIKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

3. DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN (DITPPKH)

3.1. KAWASAN HUTAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nomor Register	NO_REG	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Fungsi Kawasan Hutan	FUNGSIKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
No. SK. Kawasan Hutan	NOSKKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal SK. Kawasan Hutan	TGLSKKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas Menurut SK. Penetapan	LSKKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

3.2. PENETAPAN KAWASAN HUTAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kelompok Hutan	NKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Fungsi Penetapan	FUNGSITAP	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
No. SK. Penetapan	NOSKTAP	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal SK. Penetapan	TGLSKTAP	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas Menurut SK. Penetapan	LSKTAP	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

3.3. PELEPASAN KAWASAN HUTAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Pelepasan	NAMA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
No. SK. Pelepasan Dan Surat Penegasan	NOSKPLS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Tanggal SK. Pelepasan dan Surat Penegasan	TGLSKPLS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Luas SK Pelepasan dan Surat Penegasan	LSKPLS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Jenis Pelepasan	JNSPLS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Komoditas	KOMODITAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Nama Objek	NAMOBJ	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup

3.4. PETA INDIKATIF PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kriteria	KRITERIA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Progres	Progres	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas	LUAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Nama Objek	NAMOBJ	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup

3.5. REKALKULASI BATAS KAWASAN HUTAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Kelompok Hutan	NKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tata Batas	TTBTS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Batas Luar/ Fungsi Kawasan Hutan	BLBF	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Batas Alam/ Fungsi Kawasan Hutan	BABB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tanggal BATB	TBATB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tanggal Pengesahan BATB	TSAHBATB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Fungsi Kawasan Hutan	FUNGSIBATB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Panjang Tata Batas	PJBATB	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Virtual	VIRTUAL	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
BATB Untuk Penetapan	BTSTAP	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan

4. DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR (PDLKWS)

4.1. EKOREGION DARAT

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nama Ekoregion Darat	NAMA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor Ekoregion	NOMOR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kepulauan	KEPULAUAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Ekoregion Darat	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

4.2. EKOREGION LAUT

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nama Ekoregion Laut	NAMA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Ekoregion Laut	KODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Ekoregion Laut	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

4.3. KARAKTERISTIK BENTANG ALAM

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Karakteristik Bentang Alam	KBA_250	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Karakteristik Bentang Alam	KODE_KBA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Karakteristik Bentang Alam	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

4.4. KARAKTERISTIK VEGETASI ALAMI

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Karakteristik Vegetasi Alami	KVA_250	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Karakteristik Vegetasi Alami	KODE_KVA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Karakteristik Vegetasi Alami	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

4.5. DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP (DDDTLH)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode PUM Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode PUM Kabupaten	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Ketersediaan Air	SEDIA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kebutuhan Air Domestik	BTH_DOM	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kebutuhan Air untuk Lahan	BTH_LAHAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Ambang Batas Populasi	AMBANG_BTS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Status	STATUS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

4.6. JASA LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT AIR

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kelas Indeks Jasa Lingkungan Hidup sebagai Penyedia Air (1996)	K_PYAIR_96	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kelas Indeks Jasa Lingkungan Hidup sebagai Penyedia Air (2020)	K_PYAIR_20	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kelas Indeks Jasa Lingkungan Hidup	K_PGAIIR_96	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
sebagai Pengatur Air (1996)					
Kelas Indeks Jasa Lingkungan Hidup sebagai Pengatur Air (2020)	K_PGAIK_20	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kecenderungan Perubahan Kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagai Pengatur Air (1996-2020)	KPGAIK9620	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

4.7. ARAHAN OPTIMALISASI KAWASAN HUTAN BERDASARKAN INDEKS JASA LINGKUNGAN (IJL)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Arahan	ARAHAN_IJL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

5. DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN (PDLUK)

5.1.1. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) – POLYGON

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
PEMRAKARSA	PEMRAKARSA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KEGIATAN	KEGIATAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
TIPE DOKUMEN	TIPE_DOKUMEN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
TAHUN	TAHUN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KODE PROVINSI	KODE_PROV	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
PROVINSI	PROVINSI	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
SK KELAYAKAN	SK_KELAYAKAN	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
LUAS (HA)	LUAS	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
KETERANGAN	KETERANGAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

5.1.2. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) – LINE

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
PEMRAKARSA	PEMRAKARSA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KEGIATAN	KEGIATAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
TIPE DOKUMEN	TIPE_DOKUMEN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
TAHUN	TAHUN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KODE PROVINSI	KODE_PROV	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
PROVINSI	PROVINSI	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
SK KELAYAKAN	SK_KELAYAKAN	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
PANJANG (M)	PANJANG	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
KETERANGAN	KETERANGAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

5.1.3. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) – POINT

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
PEMRAKARSA	PEMRAKARSA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KEGIATAN	KEGIATAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
TIPE DOKUMEN	TIPE_DOKUMEN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
TAHUN	TAHUN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KODE PROVINSI	KODE_PROV	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
PROVINSI	PROVINSI	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
SK KELAYAKAN	SK_KELAYAKAN	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
KETERANGAN	KETERANGAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

5.2.1. ADDENDUM ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL RKL - RPL) – POLYGON

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
PEMRAKARSA	PEMRAKARSA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KEGIATAN	KEGIATAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
TIPE DOKUMEN	TIPE_DOKUMEN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
TAHUN	TAHUN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KODE PROVINSI	KODE_PROV	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
PROVINSI	PROVINSI	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
SK KELAYAKAN	SK_KELAYAKAN	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
LUAS (HA)	LUAS	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
KETERANGAN	KETERANGAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

5.2.2. ADDENDUM ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL RKL - RPL) – LINE

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
PEMRAKARSA	PEMRAKARSA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KEGIATAN	KEGIATAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
TIPE DOKUMEN	TIPE_DOKUMEN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
TAHUN	TAHUN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KODE PROVINSI	KODE_PROV	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
PROVINSI	PROVINSI	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
SK KELAYAKAN	SK_KELAYAKAN	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
PANJANG (M)	PANJANG	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
KETERANGAN	KETERANGAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

5.2.3. ADDENDUM ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL RKL - RPL) – POINT

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
PEMRAKARSA	PEMRAKARSA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KEGIATAN	KEGIATAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
TIPE DOKUMEN	TIPE_DOKUMEN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
TAHUN	TAHUN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KODE PROVINSI	KODE_PROV	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
PROVINSI	PROVINSI	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
SK KELAYAKAN	SK_KELAYAKAN	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
KETERANGAN	KETERANGAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

5.3.1. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) – POLYGON

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
PEMRAKARSA	PEMRAKARSA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KEGIATAN	KEGIATAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
TIPE DOKUMEN	TIPE_DOKUMEN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
TAHUN	TAHUN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KODE PROVINSI	KODE_PROV	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
PROVINSI	PROVINSI	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
SK KELAYAKAN	SK_KELAYAKAN	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
LUAS (HA)	LUAS	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
KETERANGAN	KETERANGAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

5.3.2. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) – LINE

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
PEMRAKARSA	PEMRAKARSA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KEGIATAN	KEGIATAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
TIPE DOKUMEN	TIPE_DOKUMEN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
TAHUN	TAHUN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KODE PROVINSI	KODE_PROV	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
PROVINSI	PROVINSI	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
SK KELAYAKAN	SK_KELAYAKAN	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
PANJANG (M)	PANJANG	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
KETERANGAN	KETERANGAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

5.3.3. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) – POINT

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
PEMRAKARSA	PEMRAKARSA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KEGIATAN	KEGIATAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
TIPE DOKUMEN	TIPE_DOKUMEN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
TAHUN	TAHUN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KODE PROVINSI	KODE_PROV	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
PROVINSI	PROVINSI	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
SK KELAYAKAN	SK_KELAYAKAN	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
KETERANGAN	KETERANGAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

II. BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

6. DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI (RKK)

6.1. PROFIL KAWASAN KONSERVASI

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nama Kawasan Konservasi	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nomor Register Kawasan Konservasi	NOREGKK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Provinsi	NPROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Luas Kawasan sesuai SK	LKWS	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Nomor SK Penetapan Kawasan	NOSKTAP	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tanggal SK Penetapan Kawasan	TSKTAP	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nomor SK Penunjukan Kawasan	NOSKJUK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tanggal SK Penunjukan Kawasan	TSKJUK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Unit Pelaksana Teknis	NUPT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Potensi Flora	FLORA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Potensi Fauna	FAUNA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Potensi Jasa Lingkungan	JASLING	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

6.2. ZONASI TAMAN NASIONAL (TN)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nama Zona Taman Nasional	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor Register Kawasan Konservasi	NOREGKK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Provinsi	NPROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Unit Pelaksana Teknis	NUPT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor SK Pengesahan Zonasi	NOSKSAH	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tertutup
Tanggal SK Pengesahan Zonasi	TSKSAH	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tertutup

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Zona	KODEZONA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas Zona dalam SK (Hektare)	LZONA	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tertutup
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

6.3. BLOK KAWASAN KONSERVASI

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nama Blok Kawasan Konservasi	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor Register Kawasan Konservasi	NOREGKK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Provinsi	NPROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Unit Pelaksana Teknis	NUPT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nomor SK Pengesahan Blok	NOSKSAH	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tertutup
Tanggal SK Pengesahan Blok	TSKSAH	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tertutup
Kode Blok	KODEBLOK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas Blok dalam SK (Hektare)	LBLOK	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tertutup
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

7. DIREKTORAT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI (PKK)

7.1. DAERAH PENYANGGA

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nama Kawasan Konservasi	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Pengelola Kawasan Konservasi	NUPT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Desa	DESA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Kecamatan	KEC	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Desa	KODEDESA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Kecamatan	KODEKEC	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Kabupaten_Kota	KODEKAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

7.2. KEMITRAAN KONSERVASI (*DATA RAHASIA*)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
.....	Rahasia	Rahasia	Rahasia	Tidak Disajikan

8. DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK (KKHSG)

8.1. SEBARAN SATWA DILINDUNGI (DATA RAHASIA)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
.....	Rahasia	Rahasia	Rahasia	Tidak Disajikan

8.2. PERJUMPAAN TUMBUHAN ALAM PADA KAWASAN KONSERVASI

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Waktu Terjadinya Perjumpaan	TANGGAL	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Penamaan Tumbuhan yang Disepakati Forum Keilmiahan	NAMIL	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Penamaan Tumbuhan oleh Masyarakat Lokal atau Penamaan Secara Umum	NAMLOK	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Jumlah Tumbuhan yang Dijumpai	JUMLAH	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Penamaan Tumbuhan oleh Masyarakat Lokal atau Penamaan Secara Umum	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

8.3. KONFLIK SATWA DAN MANUSIA

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nama Unit Pelaksana Teknis	NUPT	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Penamaan satwa liar yang disepakati forum keilmiah	NAMIL	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Penamaan satwa liar oleh masyarakat lokal atau penamaan secara umum	NAMLOK	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Jumlah individu satwa liar yang terlibat konflik	JUMLAH	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Lokasi kejadian konflik	LOKEJ	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Waktu kejadian konflik	TANGGAL	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Jumlah korban meninggal dari pihak masyarakat	MENINGGAL	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Jumlah korban cedera dari pihak masyarakat	CEDERA	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Perkiraan Jumlah kebun atau lahan milik masyarakat Yang rusak akibat konflik (Ha)	KRKL	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Jumlah bangunan yang rusak akibat konflik	KRB	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Taksiran kerugian dalam rupiah	RP	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Penamaan satwa liar oleh masyarakat lokal atau penamaan secara umum	NAMOBJ	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

9. DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM (BPPE)

9.1. KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Kawasan Ekosistem Esensial	KODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tipologi Kawasan Ekosistem Esensial	TYPE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Wilayah Administrasi Kecamatan	WADMKC	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Wilayah Administrasi Kelurahan atau Desa	WADMKD	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas Kawasan Ekosistem Esensial di dalam SK	LUAS_HA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Status Kawasan Ekosistem Esensial	STATUS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tahun SK	TAHUN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Pengelola Kawasan Ekosistem Esensial	PENGELOLA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Status Rencana Aksi Pengelolaan	RENAKSI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Fungsi Kawasan Hutan	FUNGSIKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
SK Kawasan Ekosistem Esensial	KET	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spesies Kunci dalam Kawasan	SP_KUNCI	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Nama Kawasan Ekosistem Esensial	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

9.2. INDIKASI KAWASAN DENGAN NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI DI LUAR KAWASAN SUKA ALAM (KSA), KAWASAN PELESTARIAN ALAM (KPA), DAN TAMAN BURU (TB)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Spesies kunci dalam kawasan	SP_KUNCI	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Informasi terkait penutupan lahan	TUPLAH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tipe data ketersediaan air	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jenis ketersediaan air menurut jumlah airnya	AIR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kabupaten/Kota	WADMKK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Provinsi	WADMPR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nilai hasil kalkulasi skor	NILAI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Luas poligon/area kehati	LUAS_HA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kategori nilai keanekaragaman hayati tinggi	KATEGORI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode kelompok pulau/kepulauan di Indonesia	KODE_REG	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Merujuk ke domain kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Merujuk ke domain kode Kabupaten/Kota	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Penggabungan kode Provinsi dan Kabupaten	KODE_ADM	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode unit pelaksana teknis BBKSDA/BKSDA	KODE_UPT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode tipologi kawasan (lahan basah, mangrove, karst, taman kehati, koridor hidupan liar, areal bernilai konservasi tinggi, gambut)	KODE_TIPOLOGI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nomor urut calon kawasan yang akan di register seperti nama KPH, kelompok hutan, habitat TSL dan lain-lain	KODE_POKHUT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tahun pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi	TAHUN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode registrasi kawasan	REGISTER	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Calon Kawasan yang akan Diregister, Seperti Nama KPH, Kelompok Hutan,	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Habitat TSL					
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

9.3. CAPAIAN PEMULIHAN EKOSISTEM

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Zona/Blok Pengelolaan	ZONA_BLOK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tahun Pelaksanaan	TAHUN_PE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Lokasi Bidang	BIDANG	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Lokasi Seksi	SEKSI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Lokasi Resort	RESORT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Lokasi Desa	DESA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jenis Perlakuan Pemulihan Ekosistem (MA, RH, RES ~ Mekanisme Alam, Rehabilitasi	PERLAKUAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Hutan dan Restorasi)					
Jenis Kegiatan (Penanaman, Pengkayaan dan Sebagainya)	KEGIATAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Pembiayaan	PENDANAAN	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Luas Area (Hektare)	LUAS_PE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Mekanisme Pelaksanaan (Swakelola/Mandiri/Kerja Sama Mitra/Kemitraan Konservasi)	MEKANISME	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Kawasan Konservasi	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

10. DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI (PJLKK)

10.1. POTENSI JASA LINGKUNGAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI

Field Description	Field Name	Kementerian / Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nomor Register Kawasan Konservasi	NOREGKK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Wilayah DAS	WIL_DAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jenis Sumber Air	JN_SBR_AIR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Debit (liter/detik)	DEBIT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Potensi Energi Air (MW)	POT_EN_AIR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Zona	KODEZONA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Blok	KODEBLOK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
SPTN/SKW	SPTN_SKW	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Status Pemanfaatan	STTS_PMFTN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Debit digunakan (liter/detik)	DEBIT_USED	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Sumber Air	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian / Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

10.2. PENETAPAN AREAL PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nomor Registrasi Kawasan Konservasi	NOREGKK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Zona	KODEZONA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Blok	KODEBLOK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
SPTN/SKW	SPTN_SKW	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
SK Penetapan Areal	SK_PAPA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Debit Air (liter/detik)	DEBIT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Luas (Ha)	LUAS_PAPA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
NPenetapan Areal Pemanfaatan	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

10.3. AREAL PERIZINAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI

Field Description	Field Name	Kementerian / Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nomor Registrasi Kawasan Konservasi	NOREGKK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Sumber Air	NM_SBR_AIR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jenis Sumber Air	JN_SBR_AIR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Zona	KODEZONA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Blok	KODEBLOK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
SPTN/SKW	SPTN_SKW	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian / Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Status Pemanfaatan	STTS_PMFTN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
SK Izin	SK_IZIN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Debit digunakan (liter/detik)	DEBIT_USED	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kapasitas MW	KPST_MW	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Luas Pemanfaatan	LUAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KK Terlayani	KK_TLAYANI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Serapan Tenaga Kerja	SRPN_NAKER	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jenis Pemanfaat	JNS_PMFT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Pemanfaat	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

10.4. PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nomor Registrasi Kawasan Konservasi	NOREGKK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Sumber Air	NM_SBR_AIR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jenis Sumber Air	JN_SBR_AIR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Zona	KODEZONA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Blok	KODEBLOK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
SPTN/SKW	SPTN_SKW	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Status Pemanfaatan	STTS_PMFTN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
SK Izin	SK_IZIN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Debit digunakan (liter/detik)	DEBIT_USED	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kapasitas MW	KPST_MW	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KK Terlayani	KK_TLAYANI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Serapan Tenaga Kerja	SRPN_NAKER	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Jenis Pemanfaat	JNS_PMFT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Provinsi	NPROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Pemanfaat	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

10.5. PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI (AREAL KEGIATAN EKSPLORASI/AREAL KEGIATAN USAHA) DI KAWASAN KONSERVASI

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nomor Registrasi Kawasan Konservasi	NOREGKK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jenis Perizinan Berusaha	JENIS_PB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
SK Perizinan Berusaha	SK_PB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Luas Areal Kegiatan Usaha (Ha)	LUAS_AKU	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Luas Areal Kegiatan Eksploitasi (Ha)	LUAS_AKE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Zona	KODEZONA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Blok	KODEBLOK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
SPTN/SKW	SPTN_SKW	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Status Wilayah Kerja	STS_WILKER	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Luas Wilayah Kerja	LS_WILKER	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Wilayah Kerja	NM_WILKER	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kapasitas Terbangkit (MW)	TBGKIT_MW	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KK Terlayani	KK_TLAYANI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jumlah Tenaga Kerja (orang)	JMLH_NAKER	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nilai Investasi (Rp)	NILAI_INVS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Pemegang Perizinan Berusaha	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

10.6. JASA LINGKUNGAN KARBON DI KAWASAN KONSERVASI

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nomor Registrasi Kawasan Konservasi	NOREGKK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tipe Ekosistem	TIPE_EKSTM	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Lokasi Petak Ukur Permanen	LOKASI_PUP	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jumlah Petak Ukur Permanen	JML_PUP	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Luas (Ha)	LUAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Stok Karbon Per Hektare (TonC/Ha)	STK_TON_HA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Total Stok Karbon (Ton C)	TOT_STK_C	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Nilai Ekonomi Flora (Rp/Tahun)	NE_FLO_RP	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nilai Ekonomi Fauna (Rp/Tahun)	NE_FAU_RP	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Nilai Ekonomi Jasa Air (Rp/Tahun)	NE_AIR_RP	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Nilai Ekonomi Jasa Wisata Alam (Rp/Tahun)	NE_WIS_RP	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Nilai Ekonomi Jasa Lingkungan Total (Rp/Tahun)	NE_JLT_RP	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Nilai Ekonomi Karbon (Rp/Ton C)	NE_C_RP	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Nilai Ekonomi Ekosistem (Rp/Ha. Tahun)	NE_EKO_RP	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Zona>Nama Blok	NM_ZNBLK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Seksi Pengelolaan Taman Nasional/Seksi Konservasi Wilayah	SPTN_SKW	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Stok Karbon Kawasan Konservasi	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

10.7. DESAIN TAPAK PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM DI KAWASAN KONSERVASI

Field Description	Field Name	Kementerian /Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nomor Register Kawasan Konservasi	NOREGKK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Zona	KODEZONA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Blok	KODEBLOK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jenis Ruang Desain Tapak	JENIS_RUANG	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Luas (Ha)	LUAS_RPBLK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
SPTN/SKW	SPTN_SKW	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Objek Ruang Desain Tapak	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian / Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

10.8. PERIZINAN BERUSAHA PENGUSAHAAN SARANA JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM DI KAWASAN KONSERVASI

Field Description	Field Name	Kementerian / Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nomor Registrasi Kawasan Konservasi	NOREGKK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Fungsi Pengelolaan Kawasan Konservasi	FGSKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Kawasan Konservasi	NKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Luas Areal Usaha (Ha)	LS_AU_HA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Lokasi Ruang Usaha	LKS_RUSH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nilai Investasi (Rp)	NILAI_INVS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
SK Izin	SK_IZIN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian / Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Serapan Tenaga Kerja	SRPN_NAKER	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Zona	KODEZONA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Blok	KODEBLOK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
SPTN/SKW	SPTN_SKW	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Pemegang Perizinan Berusaha	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

III. BIDANG PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

11. DIREKTORAT PERENCANAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DAS (P3DAS)

11.1. LAHAN KRITIS

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kelas Kritis	KRITIS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas Lahan Kritis	LUAS_HA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Nama BPDAS	BPDAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

11.2. DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Daerah Aliran Sungai	KODE_DAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Daerah Aliran Sungai	NAMA_DAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Luas Daerah Aliran Sungai	LUAS_HA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama BPDAS	BPDAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

11.3. RAWAN LIMPASAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kelas Rawan Limpasan	KLS_LIMP	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas	LUAS_HA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama BPDAS	BPDAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

11.4. RAWAN EROSI

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kelas Erosi	KLAS_EROSI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas	LUAS_HA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Nama BPDAS	BPDAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

11.5. KLASIFIKASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Daerah Aliran Sungai	KODE_DAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Daerah Aliran Sungai	NAMA_DAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas Daerah Aliran Sungai	LUAS_HA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Klasifikasi Daerah Aliran Sungai	KLSFKS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama BPDAS	BPDAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

11.6. RENCANA UMUM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RURHL-DAS)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nama Objek	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

12. DIREKTORAT KONSERVASI TANAH DAN AIR (KTA)

12.1. PENERAPAN TEKNIK KONSERVASI TANAH DAN AIR

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
ID Penerapan Teknik KTA	ID_TKTA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jenis Penerapan Teknik KTA	TIPE_TKTA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Sumber Dana	S_DANA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Tahun Pembuatan	TAHUN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Desa	WADMKD	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kecamatan	WADMKC	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama BPDAS	BPDAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Sub DAS	SUBDAS	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Nama DAS	DAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Longitude/X (decimal degree)	LONG	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Latitude/Y (decimal degree)	LAT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Pelaksana	PELAKSANA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Jenis Penerapan Teknik KTA	NAMOBJ	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Feature Code	FCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

12.2. REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
ID Rehabilitasi DAS	ID_RDAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama BPDAS	BPDAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
No SK IPPKH / PPKH	SK_PPKH	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Tanggal SK IPPKH / PPKH	TGL_PPKH	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Luas IPPKH/PPKH	LUAS_PPKH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
No SK Penetapan Rehabilitasi DAS	SK_RDAS	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Tanggal SK Penetapan Rehabilitasi DAS	TGL_RDAS	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Luas SK Penetapan Rehabilitasi DAS	LUAS_RDAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Luas Rehabilitasi DAS Berhasil	RDAS_BERHASIL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Keterangan	KET	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Nama IPPKH/PPKH	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

13. DIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN (PTH)

13.1. ZONA BENIH TANAMAN HUTAN

Field Description	Field Name	Kementerian / Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
ID	ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Zona Benih	ZONA_BENIH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Bioregion	BIOREGION	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Luas	LUAS_HA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Zona Benih	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

13.2. PERSEBARAN PERSEMAIAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
ID	ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
No Urut Persemaian	NO	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kantor Pengelola	UPT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Desa	DESA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kantor Pengelola	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

13.3. PERSEBARAN SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
ID	ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
No Sumber Benih	NOMOR_SB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Sumber Benih	NAMA_SB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Lokal	NAMA_LOKAL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Botani	NAMA_BOTANI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Keterangan (Luasan)	LUAS_HA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Kelas Sumber Benih	KELAS_SB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Bioregion	BIOREGION	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Desa	DESA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Pemilik Sumber Benih	PEMILIK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Sumber Benih	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

14. DIREKTORAT REHABILITASI HUTAN (RH)

14.1. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode RHL	ID_RHL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama BPDAS	BPDAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Rantek / Blok	NAMA_BLOK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Pemangku Kawasan	PEMANGKU	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Pelaksana RHL	PELAKSANA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Pola RHL	POLA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tahun Penanaman	THN_TNM	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jenis Tanaman	JNS_TNM	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Batang per Ha	BTG HA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Luas RHL	LUAS HA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

15. DIREKTORAT REHABILITASI PERAIRAN DARAT DAN MANGROVE (RPDM)

15.1 DAERAH TANGKAPAN AIR DANAU

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nama Daerah Tangkapan Air DANAU	NAMA_DTA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KODE DAS	KODE_DAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
NAMA DANAU	NAMA_DANAU	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
TIPE DANAU	TIPE_DANAU	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KODE DTA	KODE_DTA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Keliling Danau	KEL_KM	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
LUAS_HA	LUAS_HA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

15.2 MANGROVE

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kelas Tutupan Tajuk	KTTJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Sumberdata	SMBDT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas Mangrove (Hektare)	LSMGR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tahun Pembuatan	THNBUAT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Institusi	INTS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

15.3 MATA AIR

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
ID MATA AIR	ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
NAMA	NAMA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
KODE BPDAS	BPDAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KODE PROVINSI	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KODE KABUPATEN	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KODE KECAMATAN	KECAMATAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KODE_DAS	KODE_DAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
KUALITAS AIR	N_KA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
DEBIT AIR	N_DA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
TUTUPAN LAHAN	N_TL	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
TOTAL_SKOR	N_TOTAL	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
KETERANGAN	KETERANGAN	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
LINTANG	LT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
BUJUR	BJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

IV. BIDANG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

16. DIREKTORAT BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN (BRPH)

16.1. TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPHP DAN KPHL)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Unit KPH	UNIT_KPH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Organisasi Pengelola	NAMA_KPH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jenis KPH	JENIS_KPH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nomor SK RPHJP	SK_RPHJP	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tanggal SK RPHJP	TGL_RPHJP	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Blok KPH	BLOK_KPH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Petak	NO_PETAK	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Wilayah Tertentu	WILTU	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

16.2. ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN UNTUK PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Arahan Pemanfaatan	ARAHAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor SK	NO_SK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal SK	TGL_SK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup

17. DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN (BUPH)

17.1. PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode_PBPH	KODE_PBPH	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Nomor SK	NO_SK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal SK	TGL_SK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor SK Penetapan areal	NO_SK_TAP	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tertutup
Tanggal SK Penetapan areal	TGL_SK_TAP	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tertutup
Luas SK (akhir) Hektare	LSSK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Bentuk Kegiatan	KEGIATAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Jenis PBPH	JENIS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
No SK Awal, Tahun SK	PBPH_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kegiatan Usaha pada SK Awal	SK_AWAL	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tertutup
Status Izin	STAT_IZIN	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Nama PBPH	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama PBPH	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

18. DIREKTORAT PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN (PUPH)

18.1. RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN (RKUPH)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nama PBPH	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Jenis PBPH	JENIS	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Bentuk Kegiatan	KEGIATAN	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Izin Awal	IZIN_AWAL	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Nomor SK, Tahun SK	PBPH_ID	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Nomor SK	NO_SK	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Tanggal SK	TGL_SK	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Nomor SK Penetapan Areal	NO_SK_TAP	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Tanggal SK Penetapan Areal	TGL_SK_TAP	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Luas SK (akhir) – (Hektare)	LSSK	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Nomor SK RKU	NO_SK_RKU	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Tanggal SK RKU	TGL_SK_RKU	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Periode RKU	PERIODE	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Status RKU	STATUS_RKU	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Penataan Ruang	PENATAAN	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Luas Tata Ruang sesuai SK RKU (Hektare)	LS_SK_RKU	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Luas Efektif (Hektare)	LS_EFEKTIF	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan

18.2. TATA BATAS AREAL KERJA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Jenis PBPH	JENIS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Bentuk Kegiatan	KEGIATAN	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Izin Awal	IZIN_AWAL	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Nomor SK, Tahun SK	PBPH_ID	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Nomor SK	NO_SK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Tanggal SK	TGL_SK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nomor SK Penetapan Areal	NO_SK_TAP	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Tanggal SK Penetapan Areal	TGL_SK_TAP	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Luas SK (akhir) – (Hektare)	LSSK	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Laporan TBT	No_Lap_TBT	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Panjang Batas	PJG_TBT	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Progres	Progres	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Nama PBPH	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan

19. DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN (BPPHH)

19.1. PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nama PBPHH	PBPHH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nomor SK	NO_SK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tanggal SK	TGL_SK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Provinsi Lokasi PBPHH	PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kabupaten Lokasi PBPHH	KAB_KOTA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kayu Gergajian (M ³)	KG	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Moulding (M ³)	MLD	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Pelet Kayu (M ³)	PLT_KY	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Veneer (M ³)	VENEER	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Plywood (M ³)	PLY	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
LVL (M ³)	LVL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Barecore (M ³)	B_CORE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Blockboard (M ³)	B_BOARD	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Panel Kayu Lainnya (M ³)	PANEL_LAIN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Wood Pellet (M ³)	W_PELLET	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Arang Kayu (M ³)	ARANG	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Serpih Kayu (M ³)	SERPIH	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Particle Board (M ³)	PARTICLE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Gondorukem (Ton)	GONDO	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Terpentin (Ton)	TERPENTIN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Minyak Kayu Putih (Ton)	MKP	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nomor Sertifikat Legalitas Hasil	SLK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Penjual Ekspor (M ³)	EKSPOR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Penjual Lokal (M ³)	LOKAL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Penggunaan Bahan Baku (M ³)	BAHAN_BAKU	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jumlah Realisasi Produksi (M ³)	PRODUKSI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

V. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

20. DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT (PKEG)

20.1.1. FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT SKALA 1:50.000

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode KHG	KODE_KHG	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Ketebalan Gambut	PEAT_THICK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Klasifikasi Jenis Tanah Gambut	TNH_GAMBUT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
FEG dari Ketebalan Gambut	FEG_Peat	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
FEG Integrasi Ketebalan Gambut	FEG_50K	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kesatuan Hidrologis Gambut	NAMOBJ	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Feature Code	FCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Layer Code	LCODE	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Spatial Reference	SRS_ID	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Metadata	METADATA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Catatan	REMARK	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup

20.1.2. FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT SKALA 1:250.000

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nama Kesatuan Hidrologis Gambut	KODE_KHG	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode KHG	FEG_KGHLTR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kesatuan Hidrologis Gambut	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup

20.2.1. KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT SKALA 1:50.000

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode KHG	KODE_KHG	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kesatuan Hidrologis Gambut	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup

20.2.2. KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT SKALA 1:250.000

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode KHG	KODE_KHG	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kesatuan Hidrologis Gambut	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tertutup

20.3. STATUS KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Status Kerusakan	SKEG	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Prioritas Pemulihan	P_SKEG	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Kesatuan Hidrologis Gambut	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

21. DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT (PPKPL)

21.1. INDEKS KUALITAS AIR LAUT

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nama Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Lokasi	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tahun Data IKAL dibuat	TAHUN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Peruntukan	PERUNTUKAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nilai IKAL dinyatakan dengan nilai dari 1 s/d 100	NILAI_IKAL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Peringkat Ikal	PERINGKAT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

21.2. PEMANTAUAN SAMPAH LAUT

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Periode 1 : pengambilan sampel ke-1 Periode 2 : pengambilan sampel ke-2	PERIODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal/Bulan/Tahun pengambilan data	WAKTU	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kepadatan berat sampah plastic	KB_PL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kepadatan berat sampah non-plastik	KB_N_PL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Persentase berat sampah plastic	PB_PL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Persentase berat sampah non-plastik	PB_N_PL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kepadatan jumlah sampah plastic	KJ_PL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kepadatan jumlah sampah non-plastik	KJ_N_PL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Persentase jumlah sampah plastic	PJ_PL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Persentase jumlah sampah non-plastik	PJ_N_PL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

22. DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN (PKL)

22.1. INDIKATIF KERUSAKAN LAHAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Kabupaten/Kota	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Kecamatan	KECAMATAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Desa/Kelurahan	DESA_KEL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Asal sumber Data	SUMBERDATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jenis Komoditas Tambang	JNSTAMBANG	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Status Perizinan	STATUSIZIN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Status Aktivitas Pertambangan	AKTIVITAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Fungsi Kawasan Hutan	FUNGSIKWS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Status Kepemilikan Lahan	LANDOWNER	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Luas (Hektare)	LUAS_HA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

23. DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (PPA)

23.1. STATUS MUTU AIR

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Lokasi Titik Pemantauan Air	TITIK_PANTAU	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Tahun Data Status Mutu Air dibuat	TAHUN	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Bobot Nilai Indeks dinyatakan dengan nilai	IP	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Status Mutu Air	STATUS_MUTU	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tidak Disajikan

24. DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA (PPU)

24.1. INDEKS KUALITAS UDARA

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Provinsi	PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Indeks Kualitas Udara	IKU_YYYY	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kriteria	KRIT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

24.2. BEBAN EMISI

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Provinsi	PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Beban Emisi NO _x	NOX_YYYY	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Beban Emisi SO ₂	SO2_YYYY	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Beban Emisi PM	PM_YYYY	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Beban Emisi Hg	HG_YYYY	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

VI. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

25. DIREKTORAT PENANGANAN SAMPAH (PS)

25.1. SEBARAN PENGELOLAAN SAMPAH

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Kabupaten/ Kota	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jumlah Penduduk (jiwa/ tahun)	PDDK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Faktor Estimasi Timbulan Sampah (kg/org/thn)	ETS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Potensi Timbulan Sampah (ton/thn)	PTS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Persentase Pengurangan Sampah (% thn)	PRS_PENGURANGAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Persentase Penanganan Sampah (% thn)	PRS_PENANGANAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Persentase Sampah Terkelola (% tahun)	PRSKLOLA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jumlah Timbulan Sampah Terkelola (ton/ tahun)	TERKELOLA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Jumlah Timbulan Sampah Tertutup terkelola (ton/ tahun)	TDKKELOLA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Keterangan	KET	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kelas Persentase Pengelolaan Sampah (%)	KLS_KELOLA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

26. DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (PB3)

26.1. PEMANTAUAN MERKURI

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kecamatan	KEC	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Desa	DESA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode jenis sampel yang diuji	KODE_JNS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tahun pengambilan sampel	THN_SMPL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Hasil uji sampel kadar merkuri	KADAR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Baku Mutu Lingkungan	BML	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Satuan	SATUAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tingkat Kadar Merkuri dibandingkan BML	TK_MERKURI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Konsentrasi Merkuri	KONSNTRASI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

VII. BIDANG PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM

27. DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (PKHL)

27.1. SEBARAN HOTSPOT

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Lintang	LAT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Bujur	LONG	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal	TGL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Waktu (WIB)	WAKTU_WIB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tingkat Kepercayaan	TK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Satelit	SATELIT	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Provinsi	PROVINSI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kabupaten	KABUPATEN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kecamatan	KECAMATAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Desa	DESA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

27.2. AREAL KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Height	KET	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Akurasi	AKURASI	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Periode Bulan	PERIODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

27.3. RAWAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kelas Kerawanan	KELAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Provinsi	PROVINSI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

28. DIREKTORAT ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM (API)

28.1. KERENTANAN PERUBAHAN IKLIM

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Kecamatan	KODE_KEC	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kode Desa	NAMA_KEC	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Desa	KODE_DES	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nomor ID Desa	NAMA_DESA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Kerentanan	KERENTANAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

28.2. LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Kabupaten/Kota	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Kecamatan	KODE_KEC	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Desa/Kelurahan	KODE_DESA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kecamatan	KECAMATAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Desa/Kelurahan	DESA_KEL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Lokasi ProKlim di tingkat Desa	KI_DESA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Lokasi ProKlim di tingkat Kelurahan	KI_KEL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Lokasi ProKlim di tingkat Dusun	KI_DUSUN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Lokasi ProKlim di tingkat RW	KI_RW	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tahun Pendaftaran Lokasi ProKlim	THN_DAFTAR	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Judul Lokasi yang didaftarkan	KET_LOKASI	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Typologi lokasi ProKlim	TYOLOGI	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Nama pendaftar lokasi ProKlim	PENDAFTAR	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Nama institusi/lembaga pendaftar	INSTITUSI	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

29. DIREKTORAT INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DAN MONITORING PELAPORAN VERIFIKASI (IGRK MPV)

29.1. WILAYAH PENGUKURAN KINERJA REDD+

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Identifier untuk tipe REDD+ 1. HA : WPK REDD+ di Hutan Alam 2. Peat : WPK REDD+ di Gambut 3. Peat HA : WPK REDD+ di Gambut dan Hutan Alam Tipe REDD	REDD_TYPE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Luas (Ha)	LUAS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

29.2. CADANGAN KARBON

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

VIII. BIDANG PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

30. DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL (PKPS)

30.1. PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA (PPHD)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Peta HD	HD_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kecamatan	NAMA_KEC	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kelurahan/Desa	NAMA_DESA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Lembaga Desa	NAMA_LD	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor SK PPHD	NO_SK_PPHD	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal SK PPHD	TGL_SK_PPHD	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas HL (Ha)	LUAS_HL	Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Luas HPT (Ha)	LUAS_HPT	Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Luas HP (Ha)	LUAS_HP	Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Luas HPK (Ha)	LUAS_HPK	Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Luas SK PPHD (Ha)	LUAS_PPHD	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor SK PAK HD	NO_SK_PAK_HD	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Tanggal SK PAK HD	TGL_SK_PAK_HD	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Lembaga Desa	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

30.2. PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (PPHKm)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Peta HKm	HKM_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kecamatan	NAMA_KEC	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kelurahan/Desa	NAMA_DESA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nama Kelompok HKm	NAMA_KELOMPOK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor SK PPHKm	NO_SK_PPHKM	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal SK PPHKm	TGL_SK_PPHKM	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas HL (Ha)	LUAS_HL	Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Luas HPT (Ha)	LUAS_HPT	Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Luas HP (Ha)	LUAS_HP	Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Luas HPK (Ha)	LUAS_HPK	Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Luas SK PPHKm (Ha)	LUAS_PPHKM	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor SK PAK HKM	NO_SK_PAK_HKM	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal SK PAK HKM	TGL_SK_PAK_HKM	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kelompok HKm	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

30.3. PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (PPHTR)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Peta HTR	HTR_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kecamatan	NAMA_KEC	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kelurahan/Desa	NAMA_DESA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kelompok HTR	NAMA_KELOMPOK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor SK PPHTR	NO_SK_PPHTR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal SK PPHTR	TGL_SK_PPHTR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas HPT (Ha)	LUAS_HPT	Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Luas HP (Ha)	LUAS_HP	Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Luas HPK (Ha)	LUAS_HPK	Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Luas SK PPHTR (Ha)	LUAS_PPHTR	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor SK Pencadangan HTR	NO_SK_PENCADANG AN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal SK Pencadangan HTR	TGL_SK_PENCADANG AN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kelompok HTR	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

30.4. PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN (PKK)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Peta Kemitraan Kehutanan	KK_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kecamatan	NAMA_KEC	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Desa	NAMA_DESA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kelompok	NAMA_KELOMPOK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Pemegang Izin/Pemegang Persetujuan	NAMA_PEMEGANG	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nomor SK PKK	NO_SK_PKK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal SK PKK	TGL_SK_PKK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas HL (Ha)	LUAS_HL	Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Luas HPT (Ha)	LUAS_HPT	Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Luas HP (Ha)	LUAS_HP	Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Luas HPK (Ha)	LUAS_HPK	Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Luas SK PKK (Ha)	LUAS_PKK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kelompok	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

30.5. IZIN PENGELOLAAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL (IPHPS)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Peta IPHPS	IPHPS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kecamatan	NAMA_KEC	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Desa	NAMA_DESA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Pengelola/KPH	NAMA_PENGELOLA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Pemegang IPHPS	NAMA_KELOMPOK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor SK IPHPS	NO_SK_IPHPS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal SK IPHPS	TGL_SK_IPHPS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas HL (Ha)	LUAS_HL	Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Luas HPT (Ha)	LUAS_HPT	Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Luas HP (Ha)	LUAS_HP	Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Luas HPK (Ha)	LUAS_HPK	Terbuka	Tertutup	Terbuka	Tertutup
Luas SK IPHPS (Ha)	LUAS_IPHPS	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Kelompok	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

31. DIREKTORAT PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT (PKTHA)

31.1. PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kecamatan	KECAMATAN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Desa	DESA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Hutan Adat	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nama Masyarakat Hukum Adat	NAMA_MHA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor Surat Keputusan	NOMOR_SK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal Surat Keputusan	TGL_SK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Fungsi Hutan Adat	FUNGSI_HA	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Luas Penetapan Status Hutan Adat (hektare)	LUAS_SK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
System Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

31.2. PENETAPAN STATUS HUTAN HAK

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Kode Kabupaten	KODE_KAB	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Pemegang Hutan Hak	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Nomor Surat Keputusan	NOMOR_SK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Tanggal Surat Keputusan	TGL_SK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Fungsi Hutan Hak	FUNGSI_HAK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Luas Penetapan Hutan Hak (Hektare)	LUAS_SK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
System Reference System Identifier	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Terbuka

IX. BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

32. DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (PSLH)

32.1. SEBARAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kot a)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nama Kategori	KATEGORI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Pelaku Usaha	NAMAOBJ	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Jenis Tipologi	TIPOLOGI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Kabupaten	KABUPATEN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Provinsi	PROVINSI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tahun PSLH	TAHUN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

32.2. SEBARAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kot a)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Nama Kategori	KATEGORI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Pelaku Usaha	NAMAOBJ	Tertutup	Tertutup	Tertutup	Tidak Disajikan
Jenis Tipologi	TIPOLOGI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Kabupaten	KABUPATEN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Provinsi	PROVINSI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Tahun PSLH	TAHUN	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

X. BIDANG STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

33. SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (BSI)

33.1. HUTAN PENELITIAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Lokasi	NAMA_LOK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Luas	LUAS_HA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Dasar Hukum	DASAR_HUKUM	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Pegelola	PENGELOLA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

34. PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN (PUSTIN PHB)

34.1. PETAK UKUR PERMANEN (PUP)

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Kode Provinsi	KODE_PROV	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nama Lokasi	NAMA_LOK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Nomor PUP	NOMOR_PUP	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Luas	LUAS_HA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

XI. BIDANG INDONESIA FOLU NET SINK 2030

35. KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

35.1. INDEKS PRIORITAS LOKASI

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
INDEKS	IPL	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

35.2. TIPOLOGI KELEMBAGAAN

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Tipologi Lembaga	TIPOLOGI	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

35.3. PETA ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI INDONESIA FOLU NET SINK 2030

Field Description	Field Name	Kementerian/ Lembaga	Pemerintah Daerah (Prov/Kab/Kota)	Perguruan Tinggi	Publik (Map Service)
Lokasi Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi <i>Indonesia's FOLU Net Sink 2030</i>	R01 s.d. R12	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Name Object	NAMOBJ	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Feature Code	FCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Layer Code	LCODE	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Spatial Reference	SRS_ID	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Metadata	METADATA	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan
Catatan	REMARK	Terbuka	Terbuka	Terbuka	Tidak Disajikan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 399 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PENYEBARLUASAN INFORMASI
GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

**SPESIFIKASI TEKNIS
PENYAJIAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK (IGT)
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**



DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR	141 -
DAFTAR TABEL	143 -
DAFTAR SIMBOLOGI IGT LHK	144 -
BAB I	145 -
PENDAHULUAN	145 -
A. LATAR BELAKANG.....	145 -
B. TUJUAN	146 -
C. ISTILAH DAN DEFINISI.....	146 -
D. RUJUKAN TEKNIS	148 -
BAB II	150 -
SPEKIFIKASI TEKNIS	150 -
A. PETA CETAK.....	150 -
1. <i>Datum Geodetik</i>	150 -
2. <i>Sistem Referensi Koordinat</i>	150 -
3. <i>Skala dan Ukuran Peta</i>	151 -
4. <i>Pembagian Lembar Peta</i>	151 -
B. PETA DIGITAL	153 -
1. <i>Datum Geodetik</i>	153 -
2. <i>Sistem Referensi Koordinat</i>	153 -
3. <i>Skala Peta</i>	153 -
BAB III	154 -
PENYAJIAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK	154 -
A. PETA CETAK.....	154 -
1. <i>Isi Peta/ Muka Peta</i>	154 -
a. Angka/Nilai Koordinat	154 -
b. Nama Unsur Rupabumi.....	155 -
c. Simbol	155 -
d. Anotasi	155 -
e. Inset	155 -
2. <i>Informasi Tepi Peta</i>	157 -
a. Nomor Surat	157 -
b. Nomor Lembar Peta (Khusus Peta Berseri).....	157 -
c. Logo Instansi	157 -
d. Judul Peta	158 -
e. Panjang/Luas Areal yang Dipetakan.....	158 -
f. Skala Peta (Angka dan Bar)	159 -
g. Arah Utara.....	159 -
h. Catatan Proyeksi	159 -
i. Keterangan Peta	160 -
j. Dasar dan Sumber Data	160 -
k. Catatan	161 -
l. Peta Situasi	162 -
m. Tanda Tangan/Legalitas	162 -
n. Nama Instansi Penerbit dan Tahun Pembuatan Peta	163 -
B. PETA DIGITAL	167 -
1. <i>Isi Peta/ Muka Peta</i>	167 -
2. <i>Skala Peta</i>	167 -
3. <i>Peta Dasar (Base Map)</i>	168 -
4. <i>Atribut Unsur</i>	169 -
5. <i>Simbol</i>	169 -
6. <i>Fitur Pendukung</i>	170 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Posisi Titik dalam Sistem Koordinat Geosentrik (Kartesian dan Geodetik).....	- 150 -
Gambar 2. Pembagian Lembar Peta Berseri Berdasarkan Indeks RBI.....	- 152 -
Gambar 3. Pembagian Lembar Peta Bukan Indeks RBI.....	- 152 -
Gambar 4. Contoh Tampilan Angka/Nilai Koordinat dan Grid Isi Peta/Muka Peta.....	- 154 -
Gambar 5. Contoh Tampilan Isi Peta/Muka Peta.....	- 156 -
Gambar 6. Contoh Nomor Surat.....	- 157 -
Gambar 7. Contoh Nomor Lembar Peta (NLP) Berdasarkan Indeks RBI Skala 1:250.000	- 157 -
Gambar 8. Contoh Logo Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- 158 -
Gambar 9. Contoh Judul Peta.....	- 158 -
Gambar 10. Contoh Penulisan Panjang/Luas Areal yang Dipetakan.....	- 159 -
Gambar 11. Contoh Tampilan Skala Peta.....	- 159 -
Gambar 12. Contoh Tampilan Arah Utara.....	- 159 -
Gambar 13. Contoh Penulisan Catatan Proyeksi	- 160 -
Gambar 14. Contoh Tampilan Keterangan Peta Kawasan Hutan.....	- 160 -
Gambar 15. Contoh Penulisan Dasar dan Sumber Data.....	- 161 -
Gambar 16. Contoh Penulisan Catatan	- 161 -
Gambar 17. Contoh Tampilan Peta Situasi	- 162 -
Gambar 18. Contoh Tampilan Tanda Tangan/Legalitas	- 163 -
Gambar 19. Contoh Tampilan Nama Instansi Penerbit dan Tahun Pembuatan Peta Pada Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Satuan Kerja Pada Pemerintah Daerah yang Mengurus Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	- 164 -
Gambar 20. Contoh Tampilan Nama Instansi Penerbit dan Tahun Pembuatan Peta Pada pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta	- 164 -
Gambar 21. Contoh Tampilan Nama Instansi Penerbit dan Tahun Pembuatan Peta Pada pada Perorangan dan lain-lain	- 164 -
Gambar 22. Tata Letak (Layout) Informasi Peta	- 165 -
Gambar 23. Tata Letak Informasi Peta yang Ditandatangani Para Pihak- 165 -	- 165 -
Gambar 24. Contoh Tata Letak (Layout) Peta Cetak Informasi Geospasial Tematik Arah Pelaksanaan Aksi Mitigasi Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Skala 1:250.000.....	- 166 -
Gambar 25. Contoh Tampilan Isi Peta/Muka Peta Interaktif IGT Kawasan Hutan.....	- 167 -

Gambar 26. Contoh Tampilan Skala Peta Interaktif.....	- 168 -
Gambar 27. Contoh Tampilan Peta Dasar RBI dan Peta Dasar Lainnya .	- 168 -
Gambar 28. Contoh Tampilan Atribut Unsur pada Peta Interaktif.....	- 169 -
Gambar 29. Contoh Tampilan Simbol pada Peta Interaktif.....	- 170 -
Gambar 30. Contoh Tampilan Fitur Pendukung.....	- 171 -

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pengaturan Skala dan Ukuran Peta..... - 151 -

DAFTAR SIMBOLOGI IGT LHK

Simbologi Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lingkungan Hidup dan
Kehutanan 172

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memanfaatkan Informasi Geospasial (IG) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu indikatornya, terdapat beragam Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang diproduksi dan dikelola oleh KLHK. Untuk menggambarkan kondisi spasial lingkungan hidup dan kehutanan agar mudah dipahami oleh masyarakat, diperlukan penyajian IGT KLHK yang diwujudkan dalam bentuk peta baik secara cetak maupun digital. Terkait hal dimaksud, KLHK telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/11/2017 tentang Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun seiring dengan dinamika perkembangan peraturan/kebijakan IG, teknologi Sistem Informasi Geografis dan teknologi berbasis web, maka perlu penyempurnaan peraturan yang mengatur penyajian peta (cetak maupun digital) sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Kompleksitas permasalahan dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan menuntut ketersediaan dan penyajian IGT yang komprehensif, relevan, akurat, dan terkini. IGT tersebut harus diperbaharui secara berkelanjutan dan ditingkatkan akurasi agar tidak menimbulkan bias pada saat digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta bertambahnya tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menyediakan IGT maka perlu disusun dan ditetapkan spesifikasi teknis penyajian IGT lingkungan hidup dan kehutanan sebagai pedoman dan acuan dalam penyajian IGT sesuai dengan kaidah kartografi dan peraturan serta ketentuan yang berlaku.

Penyajian IGT lingkup KLHK yang berwujud peta cetak dan peta digital diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi antara KLHK dan masyarakat luas, termasuk dunia pendidikan. Masyarakat dapat mengetahui dan menggunakan IGT KLHK sesuai dengan kepentingannya. Dalam konteks ini, salah satu elemen penyelenggaraan IG berupa penyajian dan penyebarluasan sudah dilakukan oleh KLHK. Harapan kedepannya, KLHK dapat memperoleh saran dan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan IGT agar menjadi lebih optimal.

B. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan Spesifikasi Penyajian Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai pedoman dan acuan bagi instansi internal dan eksternal KLHK serta masyarakat umum dalam menyajikan IGT lingkungan hidup dan kehutanan dalam bentuk peta cetak dan digital.

C. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Ruang Kebumihan.
3. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
4. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
5. Data *vector* adalah data yang menampilkan pola keruangan dalam bentuk titik, garis, area.
6. Sistem Informasi Geografis adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menginterpretasi data geografis atau data yang berhubungan dengan lokasi atau letak geografis.
7. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan dan diproyeksikan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
8. Peta Cetak adalah peta yang dibuat menurut kaidah kartografis dan dicetak pada lembaran kertas dengan ukuran dan skala tertentu.
9. Peta Dasar adalah Peta yang menampilkan informasi geospasial berupa permukaan bumi berikut objek-objek yang ada di atasnya yang tidak berubah dalam waktu lama sebagai acuan dalam pembuatan dan penyajian IGT.
10. Peta Digital adalah peta dalam format digital tertentu yang dapat diakses dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tertentu.
11. Peta Interaktif adalah peta digital yang memberikan fasilitas interaksi antara pengguna Informasi Geospasial dan peta tersebut.
12. *Map Service* adalah representasi data Geospasial yang disediakan pada server yang memungkinkan diakses dengan komputer atau

perangkat lain dengan menggunakan aplikasi melalui jaringan intranet atau internet.

13. Geoportal/Webgis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah situs data dan Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberikan akses terhadap data dan informasi Geospasial secara mudah dan cepat, serta mendorong pemanfaatan dan pengintegrasian data dan informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
14. Datum Geodetik adalah suatu model yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan posisi di permukaan bumi, yang mendefinisikan hubungan secara geometris antara sistem referensi koordinat dengan permukaan bumi yang dimodelkan oleh elipsoid referensi.
15. Gratikul adalah susunan garis bujur dan garis lintang di atas peta yang dapat digunakan untuk menghubungkan titik-titik di atas peta dengan lokasi sebenarnya di atas permukaan bumi.
16. Proyeksi peta adalah transformasi sistem koordinat dari bidang acuan bumi yang lengkung ke bidang peta yang datar.
17. Koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik dalam garis, permukaan, atau ruang dalam suatu sistem acuan.
18. Sistem Referensi Koordinat adalah sistem yang digunakan dalam pendefinisian koordinat dari suatu atau beberapa titik dalam ruang.
19. Sistem Referensi Geospasial Indonesia adalah sistem referensi koordinat yang digunakan secara nasional dan konsisten untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kompatibel dengan sistem referensi geospasial global.
20. Sistem Proyeksi *Universal Transverse Mercator* (UTM) adalah sistem proyeksi universal yang meliputi seluruh dunia kecuali daerah kutub, dan didasarkan pada 60 (enam puluh) zona, mempunyai lebar setiap zone 6° bujur dan 8° lintang, dimulai dari 80° Lintang Selatan sampai dengan 84° Lintang Utara dan dimulai dari -180° Bujur Barat sampai dengan 180° Bujur Timur (kecuali pada 72° sampai dengan 84° lintang utara lebar setiap zona 6° sampai dengan 12°).
21. Sistem proyeksi *Transverse Mercator* adalah sistem proyeksi yang bidang proyeksinya berbentuk silinder dengan sumbu silinder terletak pada bidang ekuator atau membentuk sudut 90° dengan sumbu bumi.
22. Sistem Proyeksi *Cylindrical Equal Area (World)* adalah salah satu jenis sistem proyeksi peta yang digunakan untuk memetakan permukaan bulat bumi ke permukaan datar peta dengan tujuan untuk mempertahankan luas area yang sebenarnya.
23. Elipsoid referensi adalah bentuk geometris yang paling mendekati bentuk Bumi yang sebenarnya dan digunakan sebagai dasar dalam sistem koordinat geografis seperti sistem proyeksi peta.
24. Indeks Peta adalah daftar atau kumpulan informasi yang mencakup identifikasi dan lokasi geografis pada peta.
25. Lintang adalah garis khayal yang secara melintang mengelilingi bumi (latitude).

26. Bujur adalah garis khayal yang menghubungkan Kutub Utara dan Kutub Selatan (longitude).
27. Grid adalah sekumpulan garis mendatar dan garis vertikal pada peta yang berjarak teratur dan dapat digunakan sebagai acuan.
28. Inset adalah peta tambahan berukuran kecil yang skalanya sama, lebih besar atau lebih kecil daripada peta utama yang menjelaskan wilayah pada peta utama.
29. Peta Situasi adalah Inset yang memiliki skala lebih kecil dari pada peta utama yang menjelaskan letak atau hubungan antara wilayah yang lebih luas.
30. Nomor Lembar Peta adalah nomor urut pada lembar peta berseri.
31. Unsur adalah abstraksi dari fenomena yang terjadi di dunia nyata.
32. Atribut Unsur adalah karakteristik dari suatu unsur.
33. Simbol adalah diagram, desain, huruf, karakter, atau singkatan yang ditempatkan pada peta yang mewakili ketampakan tertentu.
34. Skala adalah angka perbandingan antara jarak dalam suatu IG dengan jarak sebenarnya di muka bumi
35. Anotasi adalah semua bentuk markah pada material berilustrasi untuk kebutuhan klarifikasi.
36. Rupabumi adalah permukaan bumi beserta objek yang dapat dikenali identitasnya baik berupa unsur alami maupun unsur buatan.
37. Peta Rupabumi Indonesia adalah peta dasar yang memberikan Informasi yang mencakup wilayah darat, Pantai dan laut.
38. Nama Rupabumi adalah nama yang diberikan pada Unsur Rupabumi.
39. Unsur Rupabumi adalah bagian dari Rupabumi yang terletak di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dan dapat dikenali identitasnya melalui pengukuran, atau dari kenampakan fisiknya baik yang berada di wilayah darat, pesisir, maupun laut.
40. Unsur alami adalah unsur Rupabumi yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia.
41. Unsur buatan adalah unsur Rupabumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia.

D. RUJUKAN TEKNIS

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
3. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia;
4. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 03 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;
6. SNI 19-6502.1-2000 Spesifikasi Teknis Peta Rupabumi Skala 1:10.000;
7. SNI 7645-1:2014 Klasifikasi Penutup Lahan – Bagian 1: Skala Kecil dan Menengah;

8. SNI 8743:2019 Penyajian Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:250.000, 1:50.000, dan 1:25.000;
9. SNI 9041:2021 Penyajian Atlas Wilayah Administrasi;
10. Buku I Prinsip Dasar Katalog Unsur Geografi Indonesia Versi 5.

BAB II SPESIFIKASI TEKNIS

Peta KLHK disajikan dalam bentuk peta cetak dan peta digital. Penyajian peta cetak dan peta digital memenuhi spesifikasi dan kriteria sebagai berikut:

A. PETA CETAK

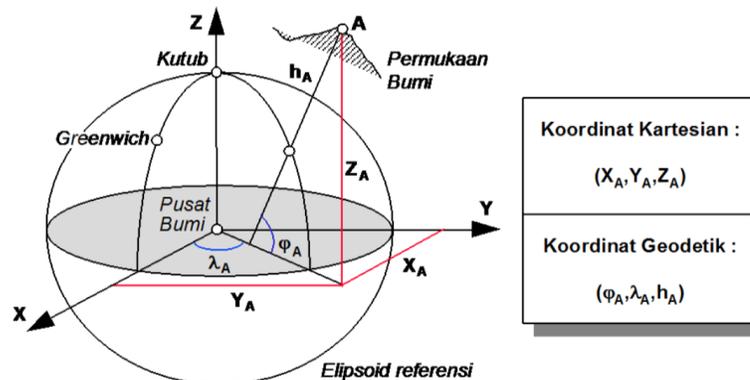
Spesifikasi peta lingkungan hidup dan kehutanan dalam bentuk peta cetak yang ditampilkan dalam buku, lampiran Surat Keputusan (SK) serta dokumen lainnya mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Datum Geodetik

Datum Geodetik adalah suatu model yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan posisi di permukaan bumi, yang mendefinisikan hubungan secara geometris antara sistem referensi koordinat dengan permukaan bumi yang dimodelkan oleh elipsoid referensi. Datum geodetik mengacu pada Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) berupa Datum Geodetik menggunakan *World Geodetic System 1984*.

2. Sistem Referensi Koordinat

Sistem Referensi Koordinat adalah sistem yang digunakan dalam pendefinisian koordinat dari suatu atau beberapa titik dalam ruang. Posisi suatu titik biasanya dinyatakan dengan koordinat (dua dimensi atau tiga dimensi) yang mengacu pada suatu sistem koordinat tertentu. Sistem Referensi Koordinat yang berada dalam SRGI adalah sistem koordinat kartesian geosentrik 3 (tiga) dimensi, seperti yang ditunjukkan pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Posisi Titik dalam Sistem Koordinat Geosentrik (Kartesian dan Geodetik)

Sistem referensi koordinat pada grid peta lingkungan hidup dan kehutanan yakni menggunakan Sistem Referensi Koordinat Gratikul berupa lintang dan bujur atau sistem referensi koordinat lainnya sesuai kebutuhan. Sistem Referensi Koordinat Gratikul menggunakan satuan derajat, menit dan detik.

3. Skala dan Ukuran Peta

Skala dan ukuran peta digunakan untuk memudahkan penggunaan dan pembacaan peta. Ketentuan skala dan ukuran peta disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Pengaturan Skala dan Ukuran Peta

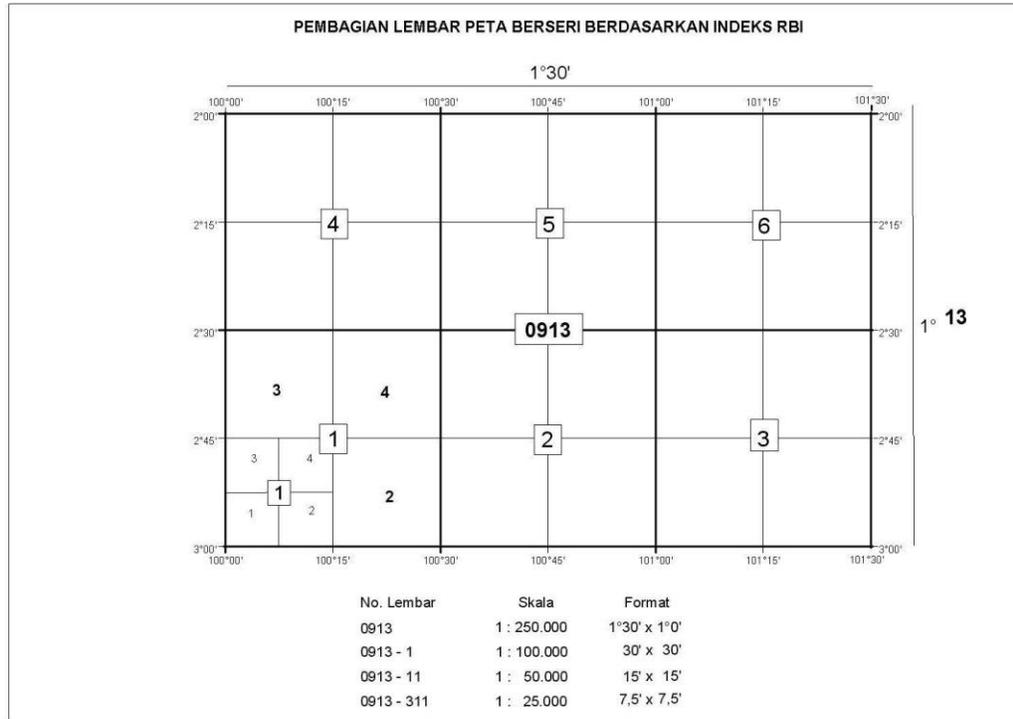
No.	Skala	Ukuran Kertas	Ukuran Isi Peta/Muka Peta	Ukuran Informasi Tepi Peta
1.	1 : 500.000	Minimal Panjang : 90 cm Lebar : 51 cm	Minimal Panjang : 58 cm Lebar : 32 cm	Minimal Panjang : 28 cm Lebar : 15 cm
2.	1 : 250.000	Minimal Panjang : 80 cm Lebar : 60 cm	Minimal Panjang : 51 cm Lebar : 38 cm	Minimal Panjang : 25 cm Lebar : 18 cm
3.	1 : 50.000	Minimal Panjang : 42 cm Lebar : 29,7 cm	Minimal Panjang : 26 cm Lebar : 18 cm	Minimal Panjang : 12 cm Lebar : 8 cm
4.	1 : 25.000	Minimal Panjang : 42 cm Lebar : 29,7 cm	Minimal Panjang : 26 cm Lebar : 18 cm	Minimal Panjang : 12 cm Lebar : 8 cm
5.	1 : 10.000	Minimal Panjang : 29,7 cm Lebar : 21 cm	Minimal Panjang : 18 cm Lebar : 12 cm	Minimal Panjang : 8 cm Lebar : 5 cm

Catatan: Apabila IGT sudah memiliki Spesifikasi Produk Data (SPD) dan peraturan yang sudah berlaku, maka dapat mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan.

Khusus layout peta yang ditandatangani oleh para pihak, ukuran lebar kertas ditambah 15 cm sebagai ruang untuk kolom tanda tangan.

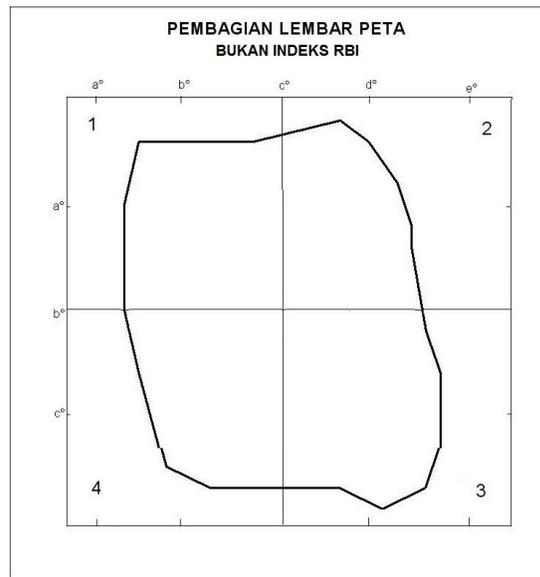
4. Pembagian Lembar Peta

Apabila area yang dipetakan tidak dapat digambarkan pada satu lembar peta maka dapat disajikan pada lebih dari satu lembar peta yang masing-masing lembar peta disertai dengan Nomor Lembar Peta (NLP). Sistem pembagian dan penomoran lembar peta sesuai dengan format indeks RBI seperti pada **Gambar 2**.



Gambar 2. Pembagian Lembar Peta Berseri Berdasarkan Indeks RBI

Untuk penomoran lembar yang tidak menggunakan indeks RBI dibuat dari nomor lembar terkecil sampai yang terbesar sesuai arah jarum jam, seperti pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Pembagian Lembar Peta Bukan Indeks RBI

B. PETA DIGITAL

Peta digital dapat ditampilkan dalam bentuk peta interaktif, peta multimedia dan lain sebagainya. Peta digital berupa peta interaktif yang ditampilkan dalam *website*, *mobile apps* dan media lain yang diakses melalui perangkat keras dan perangkat lunak mengikuti ketentuan sebagai berikut.

1. Datum Geodetik

Datum geodetik pada peta interaktif mengacu pada Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) berupa Datum Geodetik menggunakan *World Geodetic System 1984*.

2. Sistem Referensi Koordinat

Sistem referensi koordinat pada peta interaktif yakni menggunakan Sistem Referensi Koordinat Gratikul berupa lintang dan bujur. Sistem Referensi Koordinat Gratikul mempunyai satuan derajat, menit dan detik.

3. Skala Peta

Skala pada peta interaktif dibuat sesuai dengan skala pembuatan peta. Skala pada peta interaktif merupakan skala penyajian (*representation scale/display scale*) sehingga apabila diperbesar (*zoom in*) maupun diperkecil (*zoom out*), skala peta interaktif sesuai dengan skala pembuatan peta.

BAB III

PENYAJIAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

Peta KLHK disajikan dalam bentuk peta cetak dan peta digital. Penyajian peta cetak dan peta digital memenuhi kriteria sebagai berikut:

A. PETA CETAK

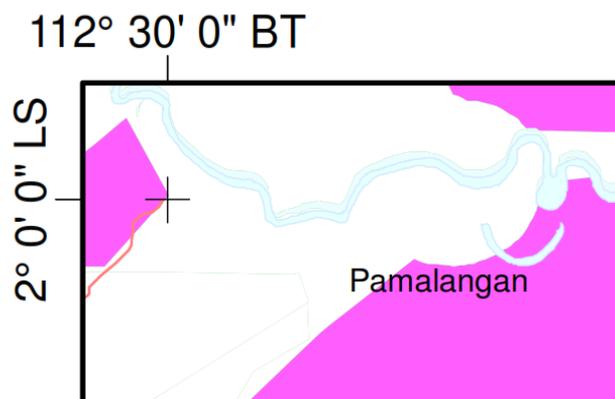
Penyajian Informasi Geospasial Tematik dalam bentuk peta cetak terdiri dari 2 (dua) bagian yakni Isi Peta/Muka Peta dan Informasi Tepi Peta dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Isi Peta/Muka Peta

Isi Peta/Muka Peta menyajikan Informasi Geospasial Tematik yang dipetakan, selain itu menampilkan unsur - unsur yang ada dalam Peta Rupabumi. Objek yang dipetakan dalam data vektor (titik, garis dan polygon) dapat dibaca dengan baik dan jelas. Isi Peta/Muka Peta memuat ketentuan sebagai berikut:

a. Angka/Nilai Koordinat

Angka/nilai koordinat pada Isi Peta/Muka Peta paling sedikit terdapat 2 (dua) angka lintang dan 2 (dua) angka bujur dengan satuan derajat, menit dan detik. Jenis huruf pada penulisan angka/nilai koordinat adalah *arial* dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan serta warna huruf adalah hitam. Grid pada Isi Peta/Muka Peta harus ditampilkan menggunakan garis atau markah tanda "+". Warna garis menggunakan warna biru (R:190 G:232 B:255) sedangkan warna marka menggunakan warna hitam (R:0 G:0 B:0). Contoh angka/nilai koordinat dan grid pada Isi Peta/Muka Peta ditampilkan pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Contoh Tampilan Angka/Nilai Koordinat dan Grid Isi Peta/Muka Peta

b. Nama Unsur Rupabumi

Nama unsur alam, unsur buatan, dan nama wilayah administrasi yang dicantumkan di dalam Isi Peta/Muka Peta adalah nama yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Penulisan nama unsur rupabumi mengikuti kaidah penulisan nama unsur rupabumi yang baku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi dan peraturan lain yang sudah ditetapkan.

c. Simbol

Simbol digunakan untuk merepresentasikan unsur-unsur yang tercantum di dalam peta. Simbol unsur-unsur pada Peta cetak IGT KLHK disajikan dalam **Daftar Simbologi IGT LHK**. Sedangkan simbol yang merupakan unsur-unsur peta dasar RBI menggunakan simbol yang digunakan pada peta Rupabumi sesuai dengan SNI 8743:2019 Penyajian Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:250.000, 1:50.000, dan 1:25.000.

d. Anotasi

Anotasi merupakan semua bentuk markah pada material berilustrasi untuk kebutuhan klarifikasi. Penulisan anotasi dalam bentuk huruf dan angka harus sesuai dengan unsur yang diterangkan dalam isi peta dengan memperhatikan segi kerapihan, keteraturan dan kemudahan untuk dibaca. Aturan dalam penulisan nama dan penempatan anotasi unsur-unsur lingkungan hidup dan kehutanan adalah mudah dibaca dan tidak berpotongan dengan anotasi lainnya. Jenis huruf pada penulisan anotasi adalah *arial* dengan ukuran dan warna huruf menyesuaikan dengan kebutuhan.

e. Inset

Inset digunakan untuk menunjukkan lokasi relatif dari wilayah yang dipetakan pada peta utama terhadap wilayah yang lebih luas di sekitarnya. Inset peta berfungsi untuk memperjelas/memperbesar sebagian kecil wilayah pada peta utama serta untuk menyambung wilayah pada peta utama. Peta inset ini memiliki skala sama atau lebih besar dengan peta utama yang disambung. Fungsi menyambung ini bertujuan untuk menggambarkan wilayah pada peta utama yang terpotong karena keterbatasan pada media kertas atau halaman dan menggambar wilayah yang terpancar.

2. Informasi Tepi Peta

Informasi tepi peta menyajikan keterangan Informasi Geospasial Tematik yang dipetakan dalam Muka Peta. Informasi Tepi Peta memuat ketentuan sebagai berikut:

a. Nomor Surat

Nomor surat merupakan nomor dan tanggal diterbitkannya surat sebagai induk dari diterbitkannya peta. Jenis huruf pada Nomor dan Tanggal Surat adalah *arial* dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan warna huruf adalah hitam. Contoh nomor surat ditampilkan pada **Gambar 6**.

Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : SK. 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022
Tanggal : 5 April 2022

Gambar 6. Contoh Nomor Surat

b. Nomor Lembar Peta (Khusus Peta Berseri)

Nomor Lembar Peta (NLP) merupakan penanda jumlah lembar peta yang dicetak dengan menggunakan nomor indeks RBI atau nomor lembar yang dibuat sendiri. NLP ini khusus untuk peta berseri, sedangkan untuk peta yang tidak berseri NLP dapat dihilangkan. Jenis huruf pada penulisan NLP adalah *arial* dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan, sedangkan warna huruf adalah hitam. Contoh NLP Berdasarkan Indeks RBI Skala 1:250.000 ditampilkan pada **Gambar 7**.

Lembar 0618

Gambar 7. Contoh Nomor Lembar Peta (NLP) Berdasarkan Indeks RBI Skala 1:250.000

c. Logo Instansi

Logo instansi menerangkan atau menggambarkan logo instansi pembuat peta. Ukuran logo menyesuaikan dengan kebutuhan dan proporsional. Contoh logo instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada informasi tepi peta ditampilkan pada **Gambar 8**.



Gambar 8. Contoh Logo Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

d. Judul Peta

Judul peta dibuat secara singkat dan jelas serta sesuai dengan tema peta. Antara isi peta dan judul peta harus ada hubungan yang jelas, terutama unsur-unsur yang disajikan. Judul peta ditulis dengan huruf kapital dengan jenis huruf pada judul peta adalah *arial bold* serta ditulis rata tengah. Ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan sedangkan warna huruf adalah hitam. Contoh judul peta ditampilkan pada **Gambar 9**.

PETA INDIKATIF ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI TAHUN 2023

Gambar 9. Contoh Judul Peta

e. Panjang/Luas Areal yang Dipetakan

Panjang/luas areal yang dipetakan dicantumkan pada peta yang membutuhkan informasi tersebut seperti peta pada lampiran Surat Keputusan (SK). Perhitungan panjang/luas areal menggunakan sistem proyeksi *Universal Transverse Mercator (UTM)* dan/atau *Cylindrical Equal Area (World)*. Perhitungan panjang/luas yang menggunakan sistem proyeksi UTM dihitung sesuai dengan zona UTM lokasi/area yang dipetakan. Pencantuman angka panjang areal yang dipetakan menggunakan satuan meter (m) serta luas menggunakan satuan hektar (ha). Jenis huruf pada penulisan anotasi adalah *arial* dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan serta warna huruf adalah hitam. Contoh penulisan panjang/luas areal yang dipetakan ditampilkan pada **Gambar 10**.

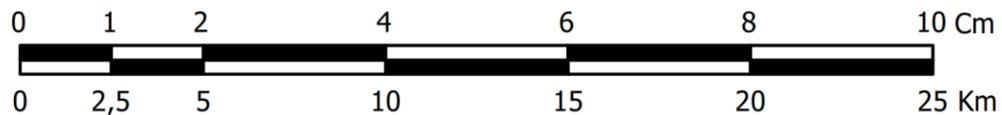
PANJANG : 3.564,23 m
LUAS : 4.654,67 Ha

Gambar 10. Contoh Penulisan Panjang/Luas Areal yang Dipetakan

f. Skala Peta (Angka dan Bar)

Skala peta yang dicantumkan adalah skala numerik (dalam angka) dan skala bar (dalam bentuk garis). Panjang skala bar menyesuaikan dengan kebutuhan dan proporsional. Khusus peta situasi hanya menggunakan skala angka. Jenis huruf pada penulisan skala peta adalah *arial* dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan serta warna huruf adalah hitam. Contoh tampilan skala peta ditampilkan pada **Gambar 11.**

Skala 1: 250.000



Gambar 11. Contoh Tampilan Skala Peta

g. Arah Utara

Arah utara dalam peta digambarkan dengan simbol yang dapat diasosiasikan secara mudah sebagai petunjuk arah utara (ujung anak panah menunjuk ke arah atas dengan huruf U di ujungnya). Jenis huruf U pada penulisan arah utara adalah *arial* dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan serta warna huruf adalah hitam. Contoh tampilan arah utara ditampilkan dalam **Gambar 12.**



Gambar 12. Contoh Tampilan Arah Utara

h. Catatan Proyeksi

Catatan proyeksi memuat informasi tentang sistem proyeksi, sistem koordinat dan datum. Jenis huruf pada penulisan catatan proyeksi adalah *arial* dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan

kebutuhan serta warna huruf adalah hitam. Contoh penulisan catatan proyeksi ditampilkan pada **Gambar 13**.

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Koordinat : Sistem Geografis
Datum : WGS 1984/SRGI

Gambar 13. Contoh Penulisan Catatan Proyeksi

i. Keterangan Peta

Keterangan peta atau legenda peta memuat simbol-simbol dalam bentuk titik, garis dan atau area dengan atau tanpa kombinasi warna, yang dapat menerangkan setiap unsur yang tergambar pada isi peta. Untuk beberapa simbol perlu dibuat anotasi sebagai penjelasan. Simbol yang tercantum dalam isi peta diberi keterangan singkat dan jelas dengan susunan kata atau kalimat yang sesuai dan benar. Ketentuan penulisan keterangan peta yang memuat unsur Rupabumi disesuaikan dengan SNI 8743:2019 Penyajian Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:250.000, 1:50.000, dan 1:25.000. Jenis huruf pada penulisan keterangan peta adalah *arial* dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan serta warna huruf adalah hitam. Contoh keterangan peta ditampilkan pada **Gambar 14**.

	Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam
	Kawasan Konservasi Perairan
	Hutan Lindung
	Hutan Produksi Terbatas
	Hutan Produksi Tetap
	Hutan Produksi yang dapat dikonversi
	Areal Penggunaan Lain

Gambar 14. Contoh Tampilan Keterangan Peta Kawasan Hutan

j. Dasar dan Sumber Data

Dasar pembuatan peta mencantumkan aspek legal dari pembuatan peta yaitu peraturan, ketentuan, Surat Keputusan (SK) dan dasar lain yang berkaitan dengan tujuan dari pembuatan peta. Sumber

Data digunakan untuk mengetahui keabsahan (validitas) dari data yang digunakan. Sumber data diantaranya terdiri dari:

- 1) Peta dasar RBI yang digunakan; termasuk nomor lembar, skala dan waktu/tanggal pembuatan/penerbitan;
- 2) Asal data yang digunakan pada isi peta.

Penulisan sumber data menggunakan format Nama Data, Skala, Instansi Pembuat Data dan Tahun Pembuatan. Jenis huruf pada penulisan dasar dan sumber peta adalah *arial* dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan serta warna huruf adalah hitam. Contoh penulisan dasar dan sumber data ditampilkan pada **Gambar 15**.

Dasar:

1. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.
2. Keputusan Menteri LHK Nomor 168/MENLHK/PKTLPLA.1/2/2022 Tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Sumber:

1. Peta Indeks Jasa Lingkungan, Indeks Prioritas Lokasi, Indeks Kelembagaan Skala 1:250.000, KLHK 2022
2. Peta Penutupan Lahan Skala 1:250.000, KLHK, 1990 & 2020
3. Peta Kawasan Hutan Skala 1:250.000, KLHK 2021
4. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Skala 1:250.000, KLHK 2021
5. Peta Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Skala 1:250.000, KLHK 2020
6. Peta Penzinaan Berusaha Pemanfaatan Hutan Skala 1:50.000, KLHK 2021
7. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial Revisi VII Skala 1:250.000, KLHK 2021
8. Peta Gambut Skala 1:250.000, KEMANTAN 2011
9. Peta Hak Guna Usaha Skala 1:250.000, IPB 2018
10. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, BIG 2021
11. Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, KSP 2021

Gambar 15. Contoh Penulisan Dasar dan Sumber Data

k. Catatan

Catatan merupakan bagian untuk menjelaskan hal-hal yang masih diperlukan terkait data yang tergambar dalam isi peta. Adapun penulisannya harus di dalam kotak tersendiri. Jenis huruf pada penulisan catatan adalah *arial italic* dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan serta warna huruf adalah hitam. Catatan dapat berupa *disclaimer* batas administrasi, metode perhitungan luas dan lain sebagainya. Contoh penulisan catatan ditampilkan pada **Gambar 16**.

Catatan :

Jika terdapat perbedaan atas wilayah administrasi maka merujuk pada batas wilayah administrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri

Catatan :

Perhitungan panjang/luas menggunakan sistem proyeksi Cylindrical Equal Area (World)

Gambar 16. Contoh Penulisan Catatan

1. Peta Situasi

Peta situasi digunakan untuk menunjukkan lokasi relatif dari wilayah yang dipetakan pada peta utama terhadap wilayah yang lebih luas di sekitarnya. Peta situasi ini memiliki skala lebih kecil dari pada peta utama yang menjelaskan letak atau hubungan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lainnya yang berada di sekeliling wilayah yang terdapat pada peta utama tersebut. Contoh peta situasi ditampilkan pada **Gambar 17**.



m. Tanda Tangan/Legalitas

Peta yang disahkan dan digunakan sebagai peta lampiran Surat Keputusan (SK) atau naskah dinas lainnya disertai dengan tanda tangan pejabat yang berwenang. Tanda tangan/legalitas adalah nama, jabatan, tanda tangan dan stempel pihak yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap Isi Peta/Muka Peta dalam hal ini adalah instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BUMN/BUMD/Swasta atau perorangan. Selain itu, jika bukan merupakan lampiran surat harus mencantumkan tanggal, bulan dan tahun pembuatan/penerbitan/pengesahan peta. Jenis huruf pada penulisan catatan adalah *arial* dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan serta warna huruf adalah hitam.

Posisi tanda tangan dalam informasi tepi adalah:

- 1) Peta sebagai lampiran Surat Keputusan (SK) atau yang ditandatangani oleh satu orang pejabat, tanda tangan diposisikan setelah catatan proyeksi
- 2) Penandatanganan peta oleh dua orang sampai dengan empat orang pejabat, tanda tangan diposisikan setelah peta situasi
- 3) Khusus peta yang memerlukan diketahui/persetujuan/pengesahan para pihak, diposisikan di bawah Isi Peta/Muka Peta dan informasi tepi dengan

memperhatikan kecukupan/kebutuhan ruang untuk tanda tangan para pihak.

Contoh tanda tangan/legalitas ditampilkan pada **Gambar 18**.

Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : SK. 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022
Tanggal : 5 April 2022



Gambar 18. Contoh Tampilan Tanda Tangan/Legalitas

n. Nama Instansi Penerbit dan Tahun Pembuatan Peta

Nama Instansi penerbit peta dan tahun pembuatan peta dicantumkan dengan posisi tahun pembuatan berada di bawah nama instansi penerbit. Jenis huruf pada penulisan catatan adalah *arial* dengan ukuran huruf menyesuaikan dengan kebutuhan serta warna huruf adalah hitam.

- 1) Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Satuan Kerja pada Pemerintah Daerah yang mengurus lingkungan hidup dan kehutanan. Contoh:
 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Eselon I : Sekretariat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan
 - Eselon II : Direktorat/Pusat/UPT (Balai Besar setingkat eselon II) dan Dinas terkait di Provinsi/Kabupaten/Kota
 - Eselon III : Unit Pelaksana Teknis, Kesatuan Pengelolaan Hutan

Contoh nama instansi penerbit dan tahun pembuatan peta pada instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Satuan Kerja pada Pemerintah Daerah yang mengurus lingkungan hidup dan kehutanan ditampilkan pada **Gambar 19**.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 2023

Gambar 19. Contoh Tampilan Nama Instansi Penerbit dan Tahun Pembuatan Peta Pada Instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Satuan Kerja Pada Pemerintah Daerah yang Mengurusi Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- 2) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta. Contoh:
- PT. INHUTANI II
 - PT. SURAVIA JAYA

Contoh nama instansi penerbit dan tahun pembuatan peta pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta ditampilkan dalam **Gambar 20.**

PT. INHUTANI II 2023

Gambar 20. Contoh Tampilan Nama Instansi Penerbit dan Tahun Pembuatan Peta Pada pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta

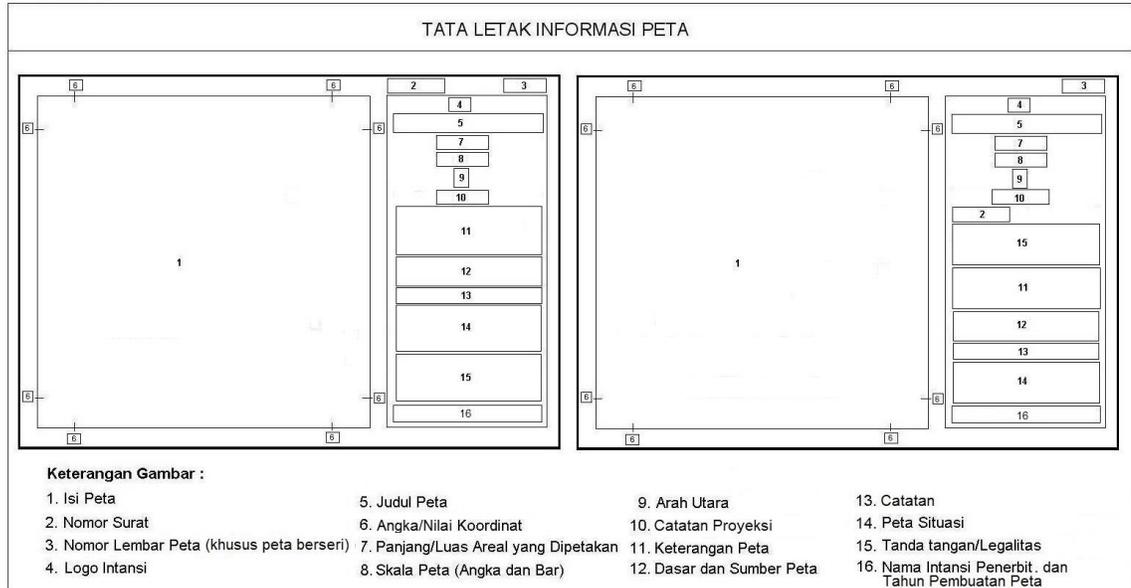
- 3) Perorangan dan lain-lain, mencantumkan identitas nama, tim atau panitia. Contoh:
- Tim evaluasi Sumber Daya Hutan KLHK
 - Panitia Sosialisasi Lingkungan Bersih

Contoh nama instansi penerbit dan tahun pembuatan peta pada Perorangan dan lain-lain ditampilkan pada **Gambar 21.**

KELOMPOK TANI HUTAN 2023

Gambar 21. Contoh Tampilan Nama Instansi Penerbit dan Tahun Pembuatan Peta Pada pada Perorangan dan lain-lain

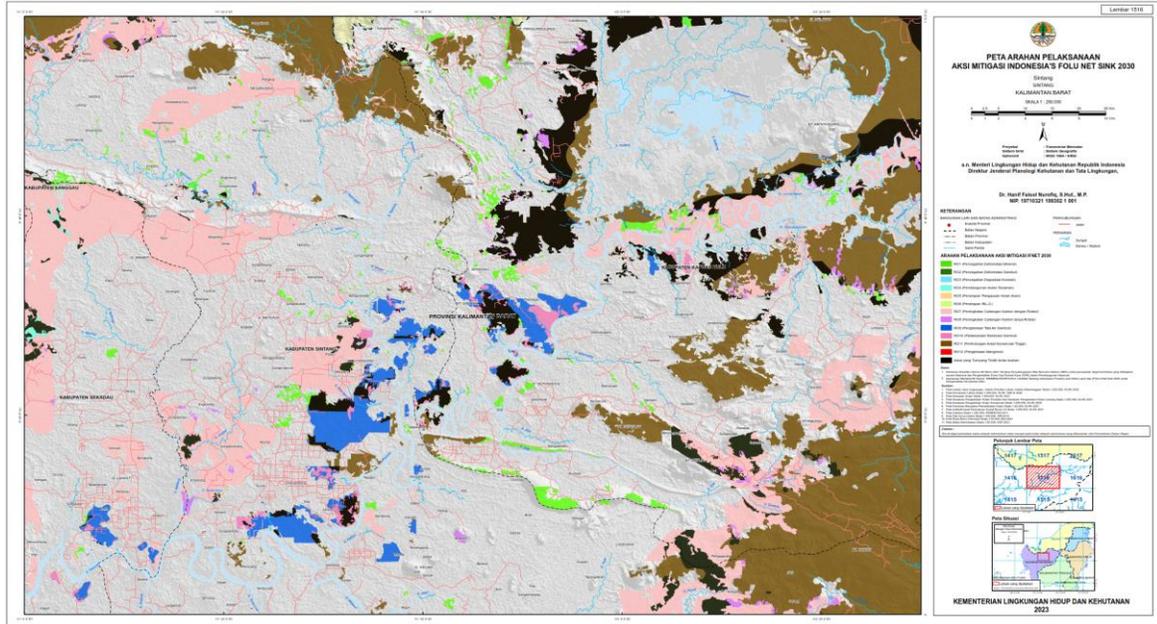
Pengaturan tata letak (*layout*) informasi peta dibuat standar dengan Isi Peta berada di sebelah kiri Informasi Tepi Peta. Contoh model dari beberapa bentuk tata letak (*layout*) informasi peta disajikan pada **Gambar 22** dan **Gambar 23** serta contoh peta cetak IGT KLHK disajikan pada **Gambar 24**.



Gambar 22. Tata Letak (Layout) Informasi Peta



Gambar 23. Tata Letak Informasi Peta yang Ditandatangani Para Pihak



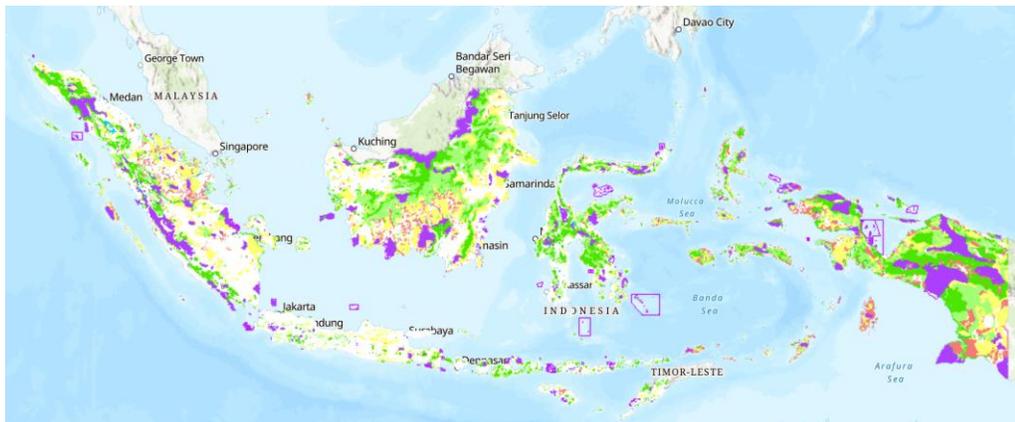
Gambar 24. Contoh Tata Letak (*Layout*) Peta Cetak Informasi Geospasial Tematik Arahkan Pelaksanaan Aksi Mitigasi *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* Skala 1:250.000

B. PETA DIGITAL

Penyajian peta digital Informasi Geospasial Tematik dalam bentuk peta interaktif dapat ditampilkan dalam *website*, *mobile apps* dan media lain yang diakses melalui perangkat keras dan perangkat lunak. Penyajian Informasi Geospasial Tematik dalam bentuk peta interaktif mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Isi Peta/Muka Peta

Isi Peta/Muka Peta menyajikan Informasi Geospasial Tematik KLHK yang dipetakan. Objek yang dipetakan dalam bentuk titik, garis dan/atau area dapat dibaca dengan baik dan jelas. Isi pada peta interaktif harus memuat cakupan wilayah yang dipetakan. Cakupan wilayah dapat berupa tingkat nasional, regional, provinsi, kabupaten dan/atau kota. Isi Peta/Muka Peta interaktif IGT KLHK harus bersumber resmi dari geoportal Walidata Geospasial KLHK (Sistem Informasi Geospasial KLHK) dengan mekanisme sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Contoh Isi Peta/Muka Peta interaktif IGT Kawasan Hutan ditampilkan pada **Gambar 25**.



Gambar 25. Contoh Tampilan Isi Peta/Muka Peta Interaktif IGT Kawasan Hutan

2. Skala Peta

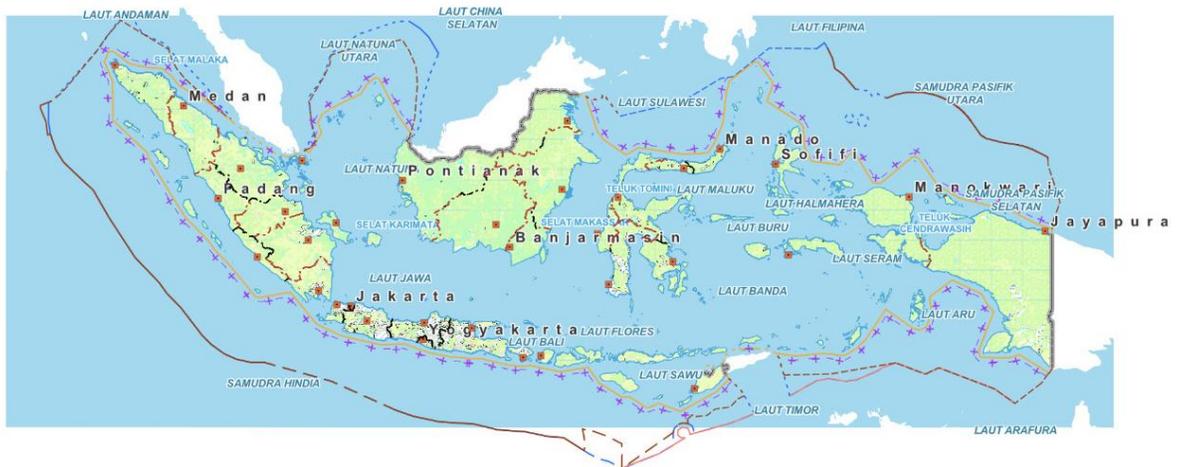
Peta interaktif ditampilkan berdasarkan skala pembuatan peta. Skala pada peta interaktif dibuat dinamis dan dapat berubah dengan bantuan fitur memperbesar (*zoom in*) dan memperkecil (*zoom out*). Perubahan skala pada peta interaktif tidak akan mengubah detail informasi pada peta karena merupakan skala penyajian (*representation scale/display scale*). Informasi mengenai skala ditampilkan pada peta interaktif dengan desain yang dinamis, mudah dibaca dan menggunakan Sistem Satuan Internasional berupa sistem metrik. Contoh skala peta interaktif ditampilkan pada **Gambar 26**.



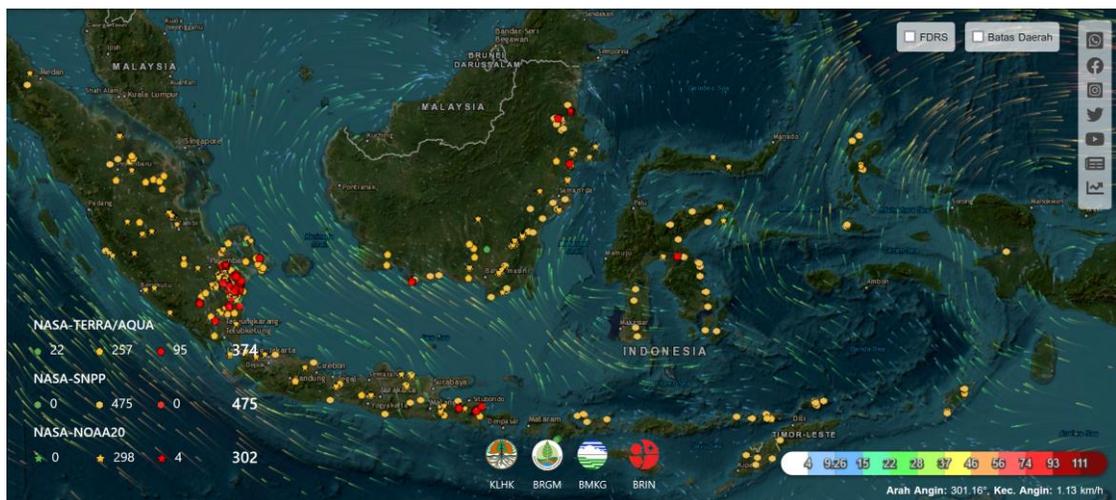
Gambar 26. Contoh Tampilan Skala Peta Interaktif

3. Peta Dasar (*Base Map*)

Peta dasar yang digunakan dalam penyajian peta interaktif adalah peta dasar RBI yang diterbitkan oleh Badan Informasi Geospasial dan/atau peta dasar lainnya dalam format *map service* atau format lainnya sesuai dengan kebutuhan. Contoh peta interaktif menggunakan peta dasar RBI dan peta dasar lainnya ditampilkan pada **Gambar 27.**



Peta Interaktif dengan Peta Dasar RBI

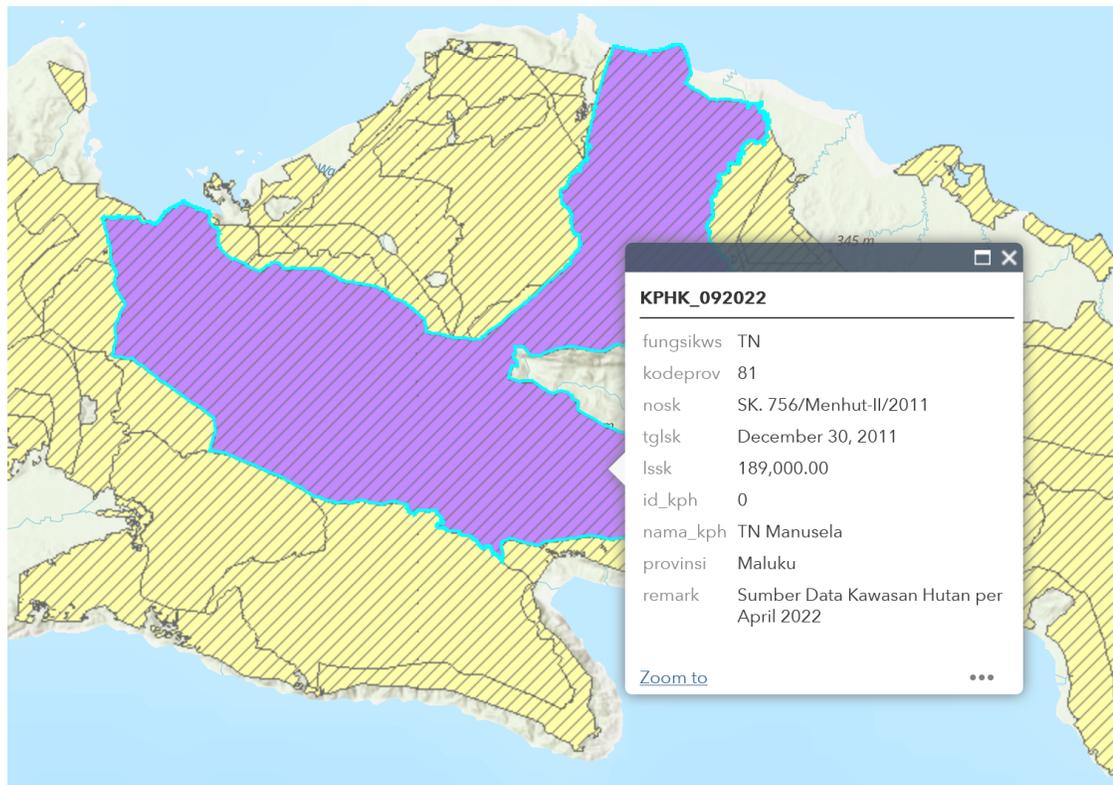


Peta Interaktif dengan Peta Dasar Citra Satelit dan Arah Angin

Gambar 27. Contoh Tampilan Peta Dasar RBI dan Peta Dasar Lainnya

4. Atribut Unsur

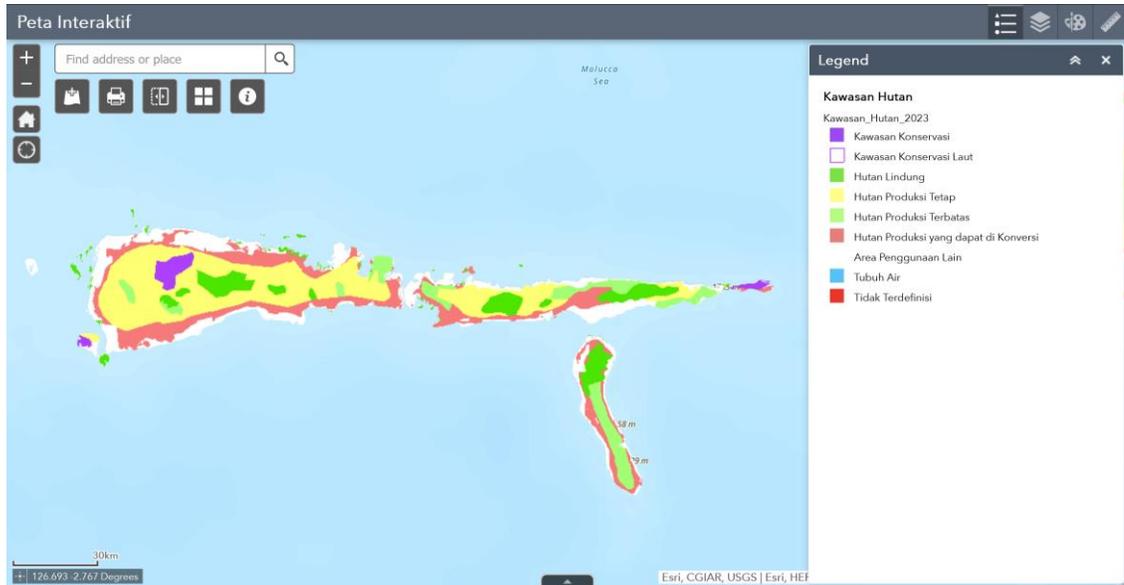
IGT KLHK yang ditampilkan dalam peta interaktif memuat informasi atribut unsur dan mengacu pada kamus data geospasial lingkungan hidup dan kehutanan dan klasifikasi kewenangan akses penyebarluasan IGT lingkungan hidup dan kehutanan yang ditetapkan oleh KLHK. Contoh atribut unsur pada peta interaktif ditampilkan pada **Gambar 28**.



Gambar 28. Contoh Tampilan Atribut Unsur pada Peta Interaktif

5. Simbol

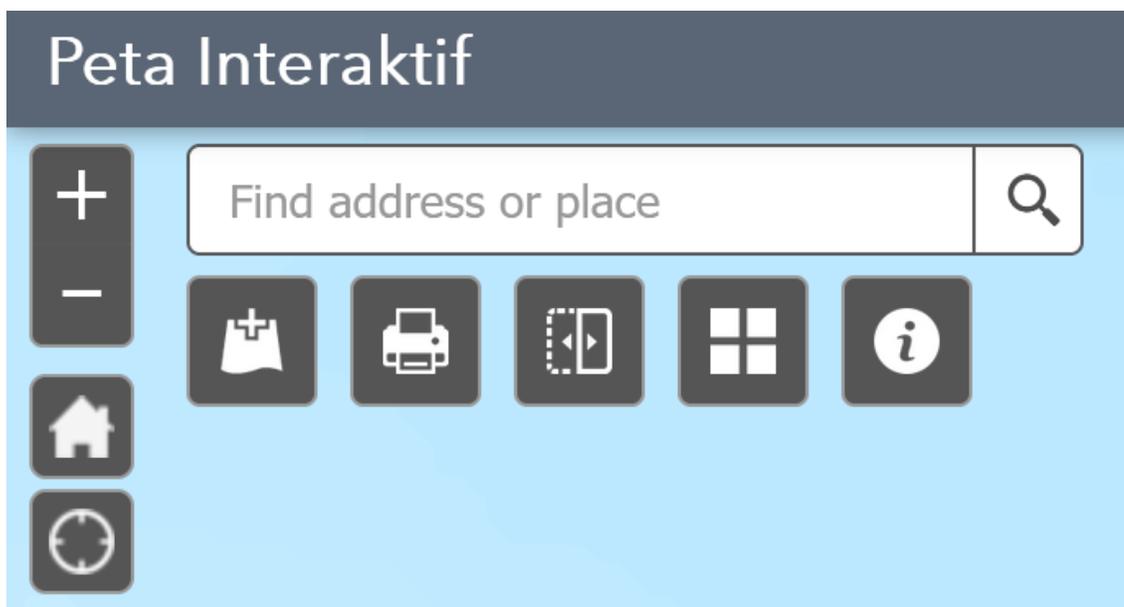
Simbol digunakan untuk merepresentasikan unsur-unsur yang tercantum di dalam peta. Simbol unsur-unsur pada peta interaktif disajikan dalam **Daftar Simbologi IGT LHK**. Sedangkan simbol yang merupakan unsur-unsur peta dasar menggunakan simbol yang digunakan pada peta Rupabumi sesuai dengan SNI 8743:2019 Penyajian Peta Rupabumi Indonesia Skala 1:250.000, 1:50.000, dan 1:25.000. Simbol peta interaktif IGT KLHK harus bersumber resmi dari geoportal Walidata Geospasial KLHK (Sistem Informasi Geospasial KLHK) dengan mekanisme sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Contoh simbol peta interaktif ditampilkan pada **Gambar 29**.



Gambar 29. Contoh Tampilan Simbol pada Peta Interaktif

6. Fitur Pendukung

Peta interaktif dapat menampilkan fitur pendukung agar menjadi lebih menarik dan mudah digunakan serta memberikan manfaat yang maksimal kepada pengguna. Fitur pendukung disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan perkembangan teknologi. Fitur pendukung ditampilkan secara proporsional dan tidak mempengaruhi fitur utama dalam peta interaktif. Fitur pendukung dapat berupa menu cari lokasi, informasi titik koordinat, cetak peta interaktif, tambah data SIG dan fitur pendukung lainnya. Contoh fitur pendukung ditampilkan pada **Gambar 30.**





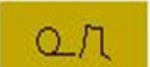
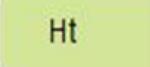
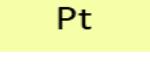
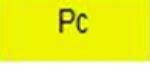
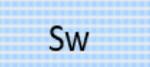
Gambar 30. Contoh Tampilan Fitur Pendukung

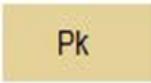
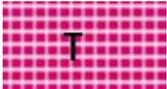
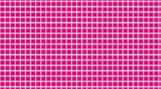
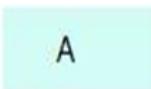
SIMBOLOGI INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK (IGT) LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

1. DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

1.1. PENUTUPAN LAHAN KAWASAN HUTAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Hutan Lahan Kering Primer			96	230	99	
Hutan Lahan Kering Sekunder			114	255	0	
Hutan Mangrove Primer			142	167	4	
Hutan Mangrove Sekunder			193	167	0	
Hutan Rawa Primer			0	0	0	foreground
			96	230	99	background
Hutan Rawa Sekunder			0	0	0	foreground
			114	255	0	background
Hutan Tanaman			211	229	152	
Semak Belukar			235	192	167	
Semak Belukar Rawa			0	0	0	foreground
			235	192	167	background
Pertanian Lahan Kering			246	255	167	
Pertanian Lahan Kering Campur			237	245	0	
Sawah			168	214	255	Marker fill, grid
Tambak			122	244	244	

Permukiman Transmigrasi			114	142	167	
Perkebunan			229	210	152	
Permukiman			104	104	104	
Bandara/Pelabuhan			214	0	115	
Lahan Terbuka			214	0	115	Marker fill, grid
Pertambangan			167	4	0	
Tubuh Air			212	252	247	
Rawa			0	0	0	foreground
			152	229	229	background
Savanna/Padang Rumput			213	255	2	
Awan			209	209	209	

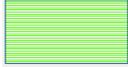
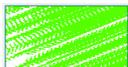
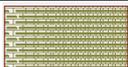
1.2. PENUTUPAN HUTAN

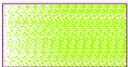
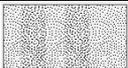
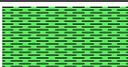
Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Hutan Lahan Kering Primer			96	230	99	
Hutan Lahan Kering Sekunder			114	255	0	
Hutan Mangrove Primer			142	167	4	
Hutan Mangrove Sekunder			193	167	0	
Hutan Rawa Primer			0	0	0	foreground
			96	230	99	background
Hutan Rawa Sekunder			0	0	0	foreground
			114	255	0	background
Hutan Tanaman			211	229	152	

1.3. POTENSI HUTAN

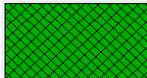
Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
<40 (m ³ /Ha)			73	138	0	
40 - 59 (m ³ /Ha)			87	156	120	
60 - 79 (m ³ /Ha)			56	99	28	
80 - 99 (m ³ /Ha)			0	97	0	
100 - 119 (m ³ /Ha)			255	34	0	
120 - 139 (m ³ /Ha)			255	111	0	
140 - 159 (m ³ /Ha)			255	166	0	
160 - 179 (m ³ /Ha)			255	229	0	
180 - 199 (m ³ /Ha)			214	230	0	
>200 (m ³ /Ha)			139	181	0	
No data			255	255	255	

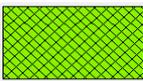
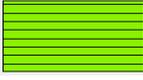
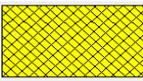
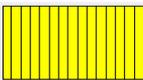
1.4. NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH) PENUTUPAN LAHAN

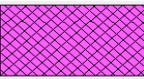
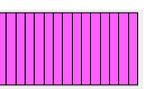
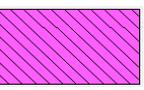
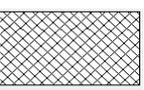
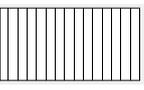
Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan	
Hutan Lahan Kering Primer menjadi Hutan Lahan Kering Sekunder			76	230	0	warna garis di dalam	simbologi pola garis kemiringan garis : 45 jarak antar garis : 2
			0	122	255	warna garis terluar	ketebalan garis 0,4 point
Hutan Lahan Kering Primer menjadi Non Hutan			85	255	0	warna blok background	simbologi kombinasi pola dan blok warna
			38	115	0	warna pola garis	
			38	115	0	warna garis terluar	ketebalan garis 0,4 point
Hutan Lahan Kering Sekunder menjadi Hutan Tanaman			163	255	115	warna pola garis 1	simbologi pola garis kemiringan garis : -26 jarak antar garis : 2
			163	255	115	warna pola garis 2	simbologi pola garis kemiringan garis : 45 jarak antar garis : 5
			230	230	0	warna garis terluar	ketebalan garis 0,4 point
Hutan Lahan Kering Sekunder menjadi Non Hutan			38	115	0	warna pola	simbologi kombinasi pola dan blok warna
			163	255	115	blok warna	
			168	168	0	warna garis terluar	ketebalan garis 0,4 point
Hutan Mangrove Primer menjadi Hutan Mangrove Sekunder			168	168	0	warna pola	simbologi kombinasi pola dan blok warna
			255	255	175	blok warna	
			255	0	0	warna garis terluar	ketebalan garis 0,4 point
Hutan Mangrove Sekunder menjadi Non Hutan			168	168	0	warna pola	simbologi kombinasi pola dan blok warna
			255	255	255	blok warna	
			137	90	68	warna garis terluar	ketebalan garis 0,4 point
Hutan Rawa Primer menjadi Hutan Rawa Sekunder			85	255	0	warna pola	simbologi pola garis kemiringan garis : 0 jarak antar garis : 2 ketebalan garis 0,4 point
			0	76	115	warna garis terluar	ketebalan garis 0,4 point
Hutan Rawa Primer menjadi Non Hutan			85	255	0	warna pola	simbologi kombinasi pola dan blok warna
			255	255	255	blok warna	
			0	120	108	warna garis terluar	ketebalan garis 0,4 point
Hutan Rawa Sekunder menjadi Hutan Tanaman			170	255	0	warna pola	polygon dengan
			255	255	255	blok warna	simbologi kombinasi pola
			170	255	0	warna garis terluar	ketebalan garis 0,4 point
Hutan Rawa Sekunder menjadi Non Hutan			170	255	0	warna pola garis 1	polygon dengan simbologi pola garis kemiringan garis : 150 jarak antar garis : 3 ketebalan garis 0,5 point
			170	255	0	warna pola garis 2	polygon dengan simbologi pola garis kemiringan garis : 50 jarak antar garis : 5 ketebalan garis 0,5 point
			76	115	0	warna garis terluar	ketebalan garis 0,4 point
Hutan Tanaman menjadi Non Hutan			137	137	68	warna pola	simbologi berupa pola
			115	0	0	warna garis terluar	ketebalan garis 0,4 point

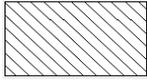
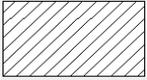
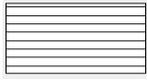
Non Hutan menjadi Hutan Lahan Kering Sekunder			163	255	115	warna pola garis 1	polygon dengan simbologi pola garis kemiringan garis : 45 jarak antar garis : 5 ketebalan garis 0,4 point
			38	155	0	warna pola garis 2	polygon dengan simbologi pola garis kemiringan garis : 45 jarak antar garis : 5 ketebalan garis 0,4 point
			163	255	115	warna pola garis 3	polygon dengan simbologi pola garis kemiringan garis : 50 jarak antar garis : 5 ketebalan garis 0,4 point
			255	255	0	warna garis terluar	ketebalan garis 0,4 point
Non Hutan menjadi Hutan Mangrove Sekunder			205	170	102	warna pola	pola gambar
			255	255	255	blok warna	
			255	0	0	warna garis terluar	ketebalan garis 0,4 point
Non Hutan menjadi Hutan Rawa Sekunder			170	255	0	warna pola	
			255	255	255	blok warna	
			132	0	168	warna garis terluar	ketebalan garis 0,4 point
Non Hutan menjadi Hutan Tanaman			0	0	0	warna pola	
			78	78	78	warna garis terluar	ketebalan garis 0,4 point
Tetap Hutan Lahan Kering Primer			96	230	99	blok warna	
Tetap Hutan Lahan Kering Sekunder			114	255	0	blok warna	
Tetap Hutan Mangrove Primer			96	230	99	blok warna	
Tetap Hutan Mangrove Sekunder			142	167	4	blok warna	
Tetap Hutan Rawa Primer			0	0	0	warna pola	pola gambar
			96	230	99	blok warna	
Tetap Hutan Rawa Sekunder			0	0	0	warna pola	pola gambar
			114	255	0	blok warna	
Tetap Hutan Tanaman			211	229	152	blok warna	
Tetap Non Hutan			255	255	255	blok warna	
			110	110	110	garis terluar	ukuran 0,4

1.5. NERACA SUMBER DAYA HUTAN (NSDH) KAWASAN HUTAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
KSA/KPA Menjadi HL			173	63	255	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut 90 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4 point
KSA/KPA Menjadi HPT			173	63	255	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut 45 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4 point
KSA/KPA Menjadi HP			173	63	255	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut 135 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4 point
KSA/KPA Menjadi HPK			173	63	255	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut 0 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4 point
HL Menjadi KSA/KPA			2	173	0	blok warna
			0	0	0	pola garis ganda bersilang
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4
HL Menjadi HPT			2	173	0	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut 45
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4
HL Menjadi HP			2	173	0	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut 135 derajat serta jarak antar garis 7 ukuran garis 0,4 point
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4 point
HL Menjadi HPK			2	173	0	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut 135 derajat serta jarak antar garis 7 ukuran garis 0,4 point
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4 point

HPT Menjadi KSA/KPA			138	242	0	blok warna
			0	0	0	pola garis ganda bersilang dengan sudut 45 derajat dan 135 derajat serta jarak antar garis 7 ukuran garis 0,4 point
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4 point
HPT Menjadi HL			138	242	0	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut 90 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4 point
HPT Menjadi HP			138	242	0	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut 135 derajat serta jarak antar garis 7 ukuran garis 0,4 point
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4 point
HPT Menjadi HPK			138	242	0	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4
HP Menjadi KSA/KPA			255	255	0	blok warna
			0	0	0	pola garis ganda bersilang dengan sudut 45 derajat dan 135 derajat serta jarak antar garis 7 ukuran garis 0,4 point
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4 point
HP Menjadi HL			255	255	0	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut 90
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4
HP Menjadi HPT			255	255	0	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut 45 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4 point
HP Menjadi HPK			255	255	0	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut 0 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4 point

HP Menjadi APL			255	255	0	blok warna
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4 point
HPK Menjadi KSA/KPA			255	94	255	blok warna
			0	0	0	pola garis ganda bersilang dengan sudut 45 derajat dan 135 derajat serta jarak antar garis 7 ukuran garis 0,4 point
HPK Menjadi HL			255	94	255	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut 90 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point
HPK Menjadi HP			255	94	255	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut 135 derajat serta jarak antar garis 7 ukuran garis 0,4 point
HPK Menjadi HPT			255	94	255	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut 45 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point
HPK Menjadi APL			255	94	255	blok warna
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4 point
APL Menjadi KSA/KPA			255	255	255	blok warna
			0	0	0	pola garis ganda bersilang dengan sudut 45 derajat dan 135 derajat serta jarak antar garis 7 ukuran garis 0,4 point
APL Menjadi HL			255	255	255	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut 90 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4 point

APL Menjadi HP			255	255	255	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut 135 derajat serta jarak antar garis 7 ukuran garis 0,4 point
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4 point
APL Menjadi HPT			255	255	255	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut 45 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4 point
APL Menjadi HPK			255	255	255	blok warna
			0	0	0	pola garis dengan sudut 0 derajat dan jarak 7 ukuran garis 0,4 point
			0	0	0	garis terluar ukuran 0,4 point
Tetap KSA/KPA			173	63	255	blok warna
Tetap HL			2	173	0	blok warna
Tetap HPT			138	242	0	blok warna
Tetap HP			255	255	0	blok warna
Tetap HPK			255	94	255	blok warna
Tetap APL			255	255	255	blok warna

1.6. PETA INDIKATIF PENGHENTIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA, PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN, ATAU PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN BARU PADA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT (PIPIB)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Hutan Alam Primer pada Hutan Produksi dan Areal Penggunaan Lain (APL); Hutan Konservasi dan Hutan Lindung			0	168	132	
Lahan Gambut			255	127	127	

1.7. DEFORESTASI

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Deforestasi			255	0	0	

1.8. REFORESTASI

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Reforestasi			56	168	0	

1.9. SEBARAN KLASTER INVENTARISASI HUTAN NASIONAL

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Kode_Klaster			0	0	0	Point ukuran 10

2. DIREKTORAT RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN

2.1. RENCANA KEHUTANAN TINGKAT NASIONAL (RKTN)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Kawasan Konservasi			173	63	255	
Kawasan Perlindungan Hutan Alam dan Lahan Gambut			38	115	0	
Kawasan Untuk Rehabilitasi			255	255	0	
Kawasan Untuk Non Kehutanan			255	255	255	
Kawasan Pengusahaan Skala Besar (HA/HT)			123	251	0	
Kawasan Pengusahaan Skala Kecil (Masyarakat)			255	170	0	
Danau/Sungai/Air			115	178	255	

2.2. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHP DAN KPHL)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
KPH Lindung		Mengikuti warna bawaan aplikasi SIG sebanyak jumlah unit KPH	123	251	0	outline width 1
KPH Produksi		Mengikuti warna bawaan aplikasi SIG sebanyak jumlah unit KPH	254	254	170	outline width 1

2.3. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI (KPHK)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
KPH Konservasi		Mengikuti warna bawaan aplikasi SIG sebanyak jumlah unit KPH	195	137	254	outline width 1

2.4. KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus			168	168	0	Outline width : 2

2.5. PETA INDIKATIF DAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL (PIAPS)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Lokasi Indikatif Perhutanan Sosial			0	0	0	Outline width : 2

2.6. KAWASAN HUTAN UNTUK KETAHANAN PANGAN (KHKP)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Lokasi Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP)			201	217	0	

2.7. PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PPKH) OPERASI PRODUKSI/ NON TAMBANG

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Produksi/Non Tambang			255	80	200	Outline width : 2

2.8. PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PPKH) EKSPLORASI

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Eksplorasi			255	80	200	Outline width : 2

2.9. PERSETUJUAN KERJASAMA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Persetujuan Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan			255	80	200	Outline width : 2

2.10. PERSETUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN SURVEI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Persetujuan Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan			255	80	200	Outline width : 2

2.11. KAWASAN HUTAN DENGAN PENGELOLAAN KHUSUS (KHDPK)

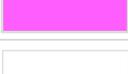
Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Lokasi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus			230	76	0	

2.12. PENETAPAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) KEHUTANAN NEGARA

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Lokasi Penetapan Wilayah Pengelolaan Hutan Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara			38	115	0	

3. DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

3.1. KAWASAN HUTAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya (1)	R	G	B	Alternatif Lainnya (2)	Keterangan
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Daratan)			173	63	255		TN, TWA, TB, SM, CA, Tahura
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Perairan)			173	63	255		KSAL/KPAL, TNL, TWAL, TBL, SML, CAL (Perairan)
Hutan Lindung (HL)			2	173	0		
Hutan Produksi Terbatas (HPT)			138	242	0		
Hutan Produksi Tetap (HP)			255	255	0		
Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK)			255	94	255		
Areal Penggunaan Lain (APL)			255	255	255		

3.2. PENETAPAN KAWASAN HUTAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Daratan)			173	63	255	TN, TWA, TB, SM, CA, Tahura
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Perairan)			173	63	255	KSAL/KPAL, TNL, TWAL, TBL, SML, CAL (Perairan)
Hutan Lindung (HL)			2	173	0	
Hutan Produksi Terbatas (HPT)			138	242	0	
Hutan Produksi Tetap (HP)			255	255	0	
Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK)			255	94	255	

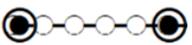
3.3. PELEPASAN KAWASAN HUTAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Pelepasan kawasan hutan untuk budidaya pertanian dan Non Kehutanan lain			230	152	0	
Pelepasan kawasan hutan untuk transmigrasi			0	92	230	Fill line

3.4. PETA INDIKATIF PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH)

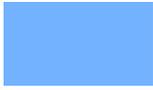
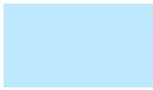
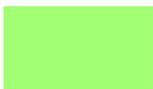
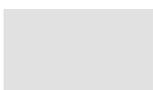
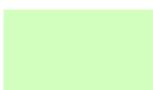
Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Alokasi 20% untuk kebun masyarakat dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan			56	168	0	
Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif			255	190	232	
Program Pemerintah untuk pencadangan peretakan sawah baru			0	92	230	
Permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip			115	0	0	
Permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum			255	85	0	
Lahan Garapan pertanian, perkebunan dan tambak			255	170	0	
SK Perubahan Batas Kawasan Hutan (SK Biru)			0	92	230	
Realisasi Penyediaan Sumber TORA/PPTPKH (Addendum IUPHHK, RTRW, Hasil Tata Batas, Pelepasan dan Penegasan Transmigrasi, Pelepasan HPK tidak produktif			104	104	104	

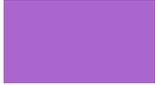
3.5. REKALKULASI BATAS KAWASAN HUTAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Tata Batas Definitif Kawasan Hutan			0	0	0	Ukuran marker 8,80
Belum Tata Batas Kawasan Hutan			0	0	0	tebal segmen 3, panjang segmen 10

4. DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN KEBIJAKAN WILAYAH DAN SEKTOR

4.1. EKOREGION DARAT

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Danau			115	178	255	
Dataran Fluvial			190	232	255	
Dataran Gambut			163	255	115	
Dataran Karst			225	225	225	
Dataran Organik/Koral			211	255	190	
Dataran Pantai			0	197	255	
Dataran Struktural			232	190	255	
Dataran Vulkanik			246	217	223	
Perbukitan Denudasional			255	211	127	
Perbukitan Karst			178	178	178	
Perbukitan Struktural			202	122	245	
Perbukitan Vulkanik			255	190	190	

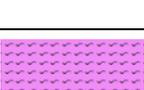
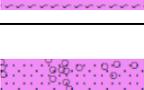
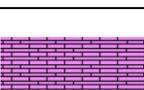
Pegunungan Denudasional			255	235	175	
Pegunungan Glasial			104	104	104	
Pegunungan Intrusif			344	64	74	
Pegunungan Struktural			170	102	205	
Pegunungan Vulkanik			255	127	127	

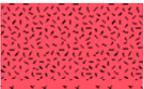
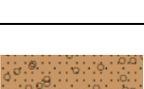
4.2. EKOREGION LAUT

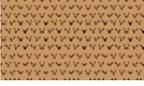
Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Ekoregion Laut	-	-	-	-	-	-

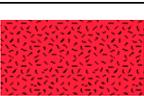
4.3. KARAKTERISTIK BENTANG ALAM

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Danau Pegunungan			0	210	210	-
Danau			0	253	255	-
Dataran fluvial bermaterial aluvium			170	200	100	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (619 Sandy or Silty Shale)
Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium			170	200	100	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (619 Sandy or Silty Shale)
Dataran fluviomarin bermaterial aluvium			170	255	100	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (619 Sandy or Silty Shale)
Dataran fluviovolkanik bermaterial aluvium			120	255	180	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (619 Sandy or Silty Shale)
Dataran lakustrin bermaterial aluvium			200	255	200	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (619 Sandy or Silty Shale)
Dataran marin bermaterial batuan sedimen karbonat			150	180	220	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Dataran marin berpasir bermaterial aluvium			184	308	234	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (619 Sandy or Silty Shale)
Dataran organik bermaterial gambut			100	200	100	Type : Character Marker Symbol Font : Cave 1, Unicode 236
Dataran organik koralian bermaterial batuan sedimen karbonat			240	200	120	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Dataran organik koralian berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat			240	200	120	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)

Dataran solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat			245	135	100	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Dataran solusional karst berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat			245	135	100	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Dataran struktural bermaterial batuan sedimen karbonat			200	90	240	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Dataran struktural berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat			200	90	240	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Dataran struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik			240	140	245	Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Dataran struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat			240	140	245	Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164, Size 28 + Type : Character Marker Symbol Font : Geology AGSO, Unicode 200
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan metamorfik			240	140	245	Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen karbonat			240	140	245	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial batuan sedimen non karbonat			240	140	245	Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164
Dataran struktural lipatan berombak-bergelombang bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat			240	140	245	Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164, Size 28 + Type : Character Marker Symbol Font : Geology AGSO, Unicode 200
Dataran struktural plutonik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku			226	100	106	Type : Character Marker Symbol Font : Cave 1, Unicode 232
Dataran vulkanik bermaterial batuan beku luar			255	80	100	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)

Dataran vulkanik bermaterial piroklastik			255	80	100	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre)
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik			255	80	100	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar			255	80	100	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik			255	80	100	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre)
Dataran vulkanik kipas bermaterial piroklastik			255	80	150	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre)
Lembah sungai bermaterial aluvium			138	160	60	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre)
Perbukitan denudasional bermaterial batuan metamorfik			200	150	100	Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Perbukitan denudasional bermaterial batuan metamorfik (ultrabasa)			200	150	100	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (702 Quartzite)
Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat			200	150	100	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Perbukitan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat			200	150	100	Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik			200	150	100	Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Perbukitan denudasional bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat			200	150	100	Type : Character Marker Symbol Font : ESRI Geology, Unicode 164, Size 28 + Type : Character Marker Symbol

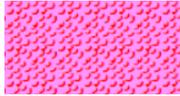
Perbukitan denudasional bermaterial piroklastik			200	150	100	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre)
Perbukitan glasial bermaterial batuan sedimen karbonat			200	200	250	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar			231	15	66	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik			231	15	66	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik			231	15	66	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre)
Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar			231	15	66	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik			231	15	66	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Perbukitan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat			240	80	24	style :Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik			210	20	220	Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat			210	20	220	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat			210	20	220	Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164
Perbukitan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat			210	20	220	Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164, Size 28 + Type : Character Marker Symbol Font : Geology AGSO, Unicode 200

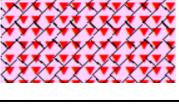
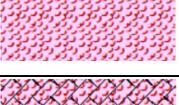
Perbukitan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik			240	140	245	Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Perbukitan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam			202	10	87	Type : Character Marker Symbol Font : Cave 1, Unicode 232
Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar			255	33	59	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik			255	33	59	Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Perbukitan vulkanik bermaterial piroklastik			255	33	59	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre)
Perbukitan vulkanik kubah lava bermaterial batuan beku luar			255	33	59	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Perbukitan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik			255	33	59	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre)
Perbukitan vulkanik lereng tengah bermaterial piroklastik			255	33	59	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre)
Tebing kaldera bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik			223	11	11	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Pegunungan denudasional bermaterial batuan metamorfik			145	98	51	Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Pegunungan denudasional bermaterial batuan metamorfik (ultrabasa)			145	98	51	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (702 Quartzite)
Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen karbonat			145	98	51	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)

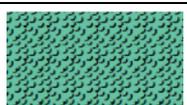
Pegunungan denudasional bermaterial batuan sedimen non karbonat			145	98	51	Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik			145	98	51	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : ESRI Geology, Unicode 69
Pegunungan denudasional bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat			145	98	51	Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164, Size 28 + Type : Character Marker Symbol Font : Geology AGSO, Unicode 200
Pegunungan glasial bermaterial batuan metamorfik			125	125	245	Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Pegunungan glasial bermaterial batuan sedimen karbonat			125	125	245	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial batuan beku luar			216	14	62	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik			216	14	62	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik			216	14	62	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre)
Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik			216	14	62	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial batuan beku luar			216	14	62	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik			216	14	62	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik			216	14	62	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre)

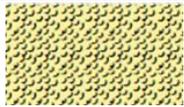
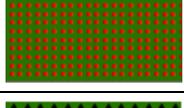
Pegunungan kerucut vulkanik lereng puncak bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik			216	14	62	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik			216	14	62	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Pegunungan kerucut vulkanik lereng tengah bermaterial piroklastik			216	14	62	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre)
Pegunungan solusional karst bermaterial batuan sedimen karbonat			197	57	13	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik			135	15	145	Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen karbonat			135	15	145	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Pegunungan struktural lipatan bermaterial batuan sedimen non karbonat			135	15	145	Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164
Pegunungan struktural lipatan bermaterial campuran batuan sedimen karbonat dan non karbonat			135	15	145	Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 164, Size 28 + Type : Character Marker Symbol Font : Geology AGSO, Unicode 200
Pegunungan struktural patahan bermaterial batuan metamorfik			202	108	182	Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Pegunungan struktural plutonik bermaterial batuan beku dalam			170	14	49	Type : Character Marker Symbol Font : Cave 1, Unicode 232
Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar			223	11	11	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock)
Pegunungan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik			223	11	11	style : Caves Type : Picture Fill Symbol (A'A' Bedrock) + Type : Character Marker Symbol Font : Geology, Unicode 69
Pegunungan vulkanik bermaterial piroklastik			223	11	11	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre)
Pegunungan vulkanik lereng bawah bermaterial piroklastik			255	137	151	style : Geology 24K Type : Picture fill symbol (731 Vitrophyre)

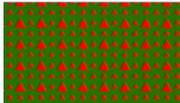
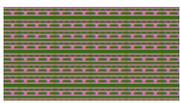
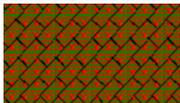
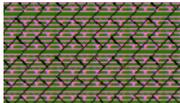
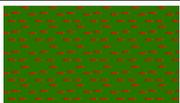
4.4. KARAKTERISTIK VEGETASI ALAMI

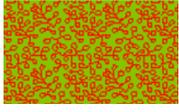
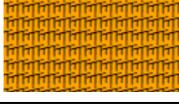
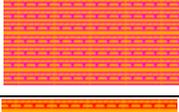
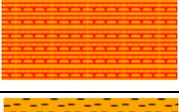
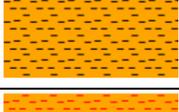
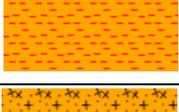
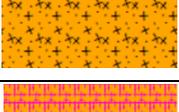
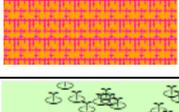
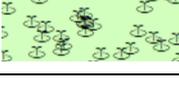
Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Vegetasi hutan batuan ultrabasa			255	150	255	-
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah			255	150	255	style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun			255	150	255	style : Caves 2 (Basic Latin) (red) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun malar hijau			255	150	255	style : Caves 2 (Basic Latin) (green) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah monsun merangas			255	150	255	style : Caves 2 (Basic Latin) (maroon) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan			255	150	255	style : Triangle 4 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan alpin			255	150	255	style : Triangle 1 dan Circle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan atas			255	150	255	style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan atas monsun			255	150	255	style : Triangle 1 (red) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah			255	150	255	style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol

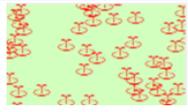
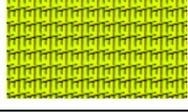
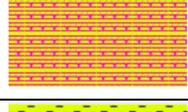
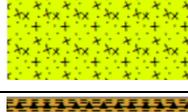
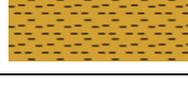
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan bawah monsun			255	150	255	style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan batuan ultrabasa pegunungan subalpin			255	150	255	style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan batugamping monsun pamah pada bentang alam karst			255	210	255	style : Caves 2 (Basic Latin) (red) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan atas pada bentang alam karst			255	210	255	style : Triangle 1 (red) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan bawah pada bentang alam karst			255	210	255	style : Triangle 1 (red) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan pada bentang alam karst			255	210	255	style : Triangle 4 Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol
Vegetasi hutan batugamping monsun pegunungan subalpin pada bentang alam karst			255	210	255	style : Triangle 1 dan Circle 1 Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol
Vegetasi hutan batugamping pamah			255	210	255	style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun			255	210	255	style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun malar hijau			255	210	255	style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas			255	210	255	style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan batugamping pamah monsun merangas pada bentang alam karst			255	210	255	style : Caves 2 (Basic Latin) (red) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol
Vegetasi hutan batugamping pamah pada bentang alam karst			255	210	255	style : Caves 2 (Basic Latin) (red) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol

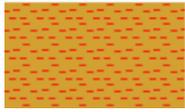
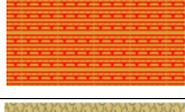
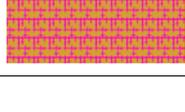
Vegetasi hutan batugamping pegunungan alpin			255	210	255	style : Triangle 1 dan Circle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas			255	210	255	style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan batugamping pegunungan atas pada bentang alam karst			255	210	255	style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah			255	210	255	style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah monsun			255	210	255	style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan batugamping pegunungan bawah pada bentang alam karst			255	210	255	style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol
Vegetasi hutan batugamping pegunungan pada bentang alam karst			255	210	255	style : Triangle 2 Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin			255	210	255	style : Triangle 1 dan Circle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan batugamping pegunungan subalpin pada bentang alam karst			255	210	255	style : Triangle 1 dan Circle 1 Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol
Vegetasi hutan danau			38	115	0	style : Geology USGS 95-525 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan danau gambut			38	115	0	style : Meteorological 01 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan dipterokarpa pamah			102	194	164	style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan gambut			168	0	0	style : Caves 1 Type : Marker fill symbol

Vegetasi hutan kerangas pamah			252	244	163	style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan kerangas pamah monsun			252	244	163	style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan monsun tepian sungai malar hijau			38	115	0	style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)			161	217	155	style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan pamah monsun malar hijau			38	115	0	style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan pamah monsun merangas			38	115	0	style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan pantai			38	115	0	style : Circle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan pantai monsun			38	115	0	style : Circle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan pegunungan atas			38	115	0	style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan pegunungan atas monsun			38	115	0	style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan pegunungan bawah			38	115	0	style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan pegunungan bawah monsun (monsoon lower mountain forest)			38	115	0	style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan pegunungan meranggas pada bukit tinggi (deciduous forest on higher hills)			38	115	0	style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol

Vegetasi hutan pegunungan subalpin			38	115	0	style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan pegunungan subalpin monsun			38	115	0	style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan rawa air payau			38	115	0	style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan rawa air payau monsun pada bentang alam karst			38	115	0	style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol
Vegetasi hutan rawa air payau pada bentang alam karst			38	115	0	style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol
Vegetasi hutan rawa air tawar			38	115	0	style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan rawa air tawar monsun			38	115	0	style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan rawa air tawar monsun pada bentang alam karst			38	115	0	style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol
Vegetasi hutan rawa air tawar pada bentang alam karst			38	115	0	style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol
Vegetasi hutan savana sekitar danau			221	255	0	style : Geology USGS 95-525 Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan tepian sungai			38	115	0	style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan tepian sungai malar hijau			38	115	0	style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi hutan tepian sungai payau			38	115	0	style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol
Vegetasi litoral			155	194	230	style : Caves 1 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol

Vegetasi mangrove			134	196	0	style : Mangrove Type : Picture fill symbol
Vegetasi mangrove monsun			134	196	0	style : Mangrove Type : Picture fill symbol
Vegetasi nipah			211	255	190	style : Caves 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi nipah monsun			211	255	190	style : Caves 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi padang rumput lahan kering pamah			255	165	0	style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol
Vegetasi padang rumput monsun pamah			255	165	0	style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol
Vegetasi padang rumput rawa air payau			255	165	0	style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi padang rumput rawa air payau monsun			255	165	0	style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi padang rumput rawa air tawar			255	165	0	style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi padang rumput rawa air tawar monsun			255	165	0	style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi padang rumput rawa gambut pamah			255	165	0	style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi padang rumput tepian sungai payau			255	165	0	style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol
Vegetasi sagu			211	255	190	style : Cartography (Basic Latin) Type : Marker fill symbol

Vegetasi sagu monsun			211	255	190	style : Cartography (Basic Latin) Type : Marker fill symbol
Vegetasi salju batugamping pegunungan alpin			178	178	178	style : Triangle 1 dan Circle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi savana lahan kering pamah			221	255	0	style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol
Vegetasi savana monsun pamah			221	255	0	style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol
Vegetasi savana pegunungan monsun			221	255	0	style : Triangle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi savana rawa air payau			221	255	0	style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi savana rawa air tawar			221	255	0	style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi savana rawa gambut pamah			221	255	0	style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi terna danau gambut pegunungan			211	160	50	style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi terna rawa air payau			211	160	50	style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi terna rawa air payau monsun pada bentang alam karst			211	160	50	style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol
Vegetasi terna rawa air payau pada bentang alam karst			211	160	50	style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol
Vegetasi terna rawa air tawar			211	160	50	style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol

Vegetasi tera rawa air tawar monsun			211	160	50	style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi tera rawa air tawar monsun pada bentang alam karst			211	160	50	style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol dan Line fill symbol
Vegetasi tera rawa gambut			211	160	50	style : Caves 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi tera rawa monsun			211	160	50	style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi tera rawa payau monsun			211	160	50	style : Meteorological 01 (Latin Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi tera savana rawa gambut			221	190	120	style : Caves 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi tera tepian danau			211	160	50	style : Caves 1 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi tera tepian danau pegunungan			211	160	50	style : Caves 1 dan Triangle 1 Type : Marker fill symbol
Vegetasi tera tepian sungai			211	160	50	style : Caves 2 (Latin 1 Supplement) Type : Marker fill symbol
Vegetasi tera tepian sungai payau			211	160	50	style : Caves 2 (Basic Latin) Type : Marker fill symbol

4.5. DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP (DDDTLH)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Terlampai			137	68	68	
Belum Terlampai			225	225	115	

4.6. JASA LINGKUNGAN HIDUP TERKAIT AIR

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Jasa Lingkungan Hidup terkait Air	-	-	-	-	-	-

4.7. ARAHAN OPTIMALISASI KAWASAN HUTAN BERDASARKAN INDEKS JASA LINGKUNGAN (IJL)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Lindung			56	168	0	
Produksi			255	255	115	
Rehabilitasi			230	152	0	
Rehabilitasi – Agroforestry			115	115	0	
Konversi			255	190	190	
Areal Penggunaan Lain			204	204	204	

5. DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN

5.1. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)

5.2. ADDENDUM ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) DAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL)-RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (ANDAL RKL-RPL)

5.3. UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Batas Ekologi			168	112	0	Hollow
Batas Geofisik Kimia			235	223	0	Hollow
Batas Biologi			255	205	120	Hollow
Batas Sosial			0	76	115	Hollow
Batas Sosial Ekonomi dan Budaya			115	178	255	Hollow
Batas Kesehatan Masyarakat			0	197	255	Hollow
Batas Wilayah Study			255	0	255	Hollow
Tapak Proyek Amdal			200	0	0	Polygon, Hollow
Tapak Proyek Amdal			200	0	0	Point, School 1
Tapak Proyek UKL - UPL			230	76	0	Polygon, Fill colour and outline colour
Tapak Proyek UKL - UPL			76	0	115	Point, School 1
Tapak Proyek Addendum			115	76	0	Polygon, Fill colour and outline colour
Tapak Proyek Addendum			115	76	0	Point, School 1

Titik Pengelolaan Amdal / Addendum			0	0	0	Circle 5
Titik Pengelolaan UKL - UPL			255	0	197	Circle 5
Titik Pemantauan Amdal / Addendum			255	0	0	Circle 17
Titik Pemantauan UKL - UPL			0	169	230	Circle 17
Lokasi Pengelolaan Amdal / Addendum			255	0	0	Fill colour and outline colour
Lokasi Pengelolaan UKL - UPL			168	112	0	Hollow
Lokasi Pemantauan Amdal / Addendum			152	230	0	Hollow
Lokasi Pemantauan UKL - UPL			132	0	168	Hollow

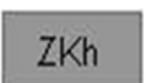
II. BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM EKOSISTEM

6. DIREKTORAT PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI

6.1. PROFIL KAWASAN KONSERVASI

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			173	63	255	TN, TWA, TB, SM, CA, Tahura

6.2. ZONASI TAMAN NASIONAL

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Zona Inti			255	0	0	
Zona Perlindungan Bahari			0	92	230	
Zona Pemanfaatan			148	200	0	
Zona Tradisional			153	51	0	
Zona Khusus			150	150	150	
Zona Rehabilitasi			0	255	255	
Zona Religi, Budaya dan Sejarah			102	0	204	
Zona Rimba			231	226	0	

6.3. BLOK KAWASAN KONSERVASI

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Blok Perlindungan			255	0	0	CA, SM, TWA, TAHURA, TB
Blok Perlindungan Bahari			0	92	230	CA, SM, TWA, TAHURA, TB
Blok Pemanfaatan			148	200	0	SM, TWA, TAHURA
Blok Tradisional			153	51	0	CA, SM, TWA, TAHURA, TB
Blok Khusus			150	150	150	CA, SM, TWA, TAHURA, TB
Blok Rehabilitasi			0	255	255	CA, SM, TWA, TAHURA, TB
Blok Religi, Budaya dan Sejarah			102	0	204	CA, SM, TWA, TAHURA, TB
Zona Koleksi			231	226	0	TAHURA

7. DIREKTORAT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

7.1. DAERAH PENYANGGA

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Daerah Penyangga			199	81	106	Daerah Penyangga, alur garis batas mengikuti Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (PERKABIG) No 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa, Adapun warna/anotasi agar jelas terlihat Ketika di padukan dengan Kawasan konservasi

7.2. KEMITRAAN KONSERVASI

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Kemitraan Konservasi			255	250	0	Pemberian akses berada pada zona/blok tradisional dengan warna coklat tua (R=153 G=51 B=0) sesuai dengan permen LHK No.76 Tahun 2015 sehingga anotasi/warna kuning pada IGT Kemitraan Konservasi menjadi jelas

8. DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK

8.1. SEBARAN SATWA DILINDUNGI

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Orangutan Tapanuli			136	38	0	Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 2
Orangutan Sumatera			216	179	34	Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 2
Orangutan Kalimantan			0	200	225	Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 2
Macan Tutul Jawa			230	230	0	Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 2
Komodo			250	189	0	Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 2
Julang Sumba			225	115	147	Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 2
Harimau Sumatera			225	0	0	Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 2
Gajah Sumatera			0	255	197	Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 9
Gajah Kalimantan			0	38	115	Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 10
Elang Jawa			127	143	13	Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 11

Bekantan			115	38	0	Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 12
Badak Sumatera			78	78	78	Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 13
Babirusa			255	190	232	Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 14
Anoa			168	0	0	Line fill : Angel : 135 Offset: 0 Separation : 15

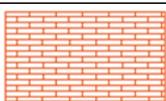
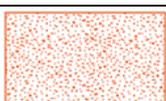
8.2. PERJUMPAAN TUMBUHAN ALAM PADA KAWASAN KONSERVASI

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Perjumpaan Tumbuhan Alam (endemik/asli)			56	168	0	

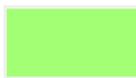
8.3. KONFLIK SATWA DAN MANUSIA

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Lokasi Konflik			230	0	0	

9. DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM
9.1. KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
KEE Taman Kehati			230	70	0	Symbol style Forestry Symbol name : Scattered Trees 2 Line width 1
KEE Mangrove			230	70	0	Symbol style Symbol name : Mangrove Line width 1
KEE Lahan Basah			230	70	0	Symbol style Symbol name : Swamp Line width 1
KEE Koridor Hidupan Liar			230	70	0	Symbol style Symbol name : Simple Hatch Line width 1
KEE Karst			230	70	0	Symbol style Geology 24K Symbol name : 627 Limestone Line width 1
KEE ABKT : Areal Bernilai Konservasi Tinggi			230	70	0	Symbol style Symbol name : Scrub 1 Line width 1

9.2. INDIKASI KAWASAN DENGAN NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI TINGGI DI LUAR KAWASAN SUKA ALAM (KSA), KAWASAN PELESTARIAN ALAM (KPA), DAN TAMAN BURU (TB)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Keanekaragaman Hayati Tinggi			38	115	0	Symbol style : Simple Fill Symbol Symbol name : Line width :
Keanekaragaman Hayati Sedang			163	255	115	Symbol style : Simple Fill Symbol Symbol name : Line width :
Keanekaragaman Hayati Rendah			255	170	0	Symbol style : Simple Fill Symbol Symbol name : Line width :
Kawasan Potensial Keanekaragaman Hayati Tinggi yang Belum Terverifikasi			255	190	190	Symbol style : Simple Fill Symbol Symbol name : Line width :

9.3. CAPAIAN PEMULIHAN EKOSISTEM

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Mekanisme Alam			230	0	0	Symbol style Forestry Symbol name :☐ Scrub 2 Line width 1
Restorasi			230	0	0	Symbol style Forestry Symbol name :☐ Woodland Line width 1
Rehabilitasi			230	0	0	Symbol style Forestry Symbol name :☐ Pine Tree 1 Line width 1

10. DIREKTORAT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI

10.1. POTENSI JASA LINGKUNGAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Potensi Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi			144	145	238	TN, TWA, TB, SM,TAHURA (angka 1 merupakan nama sumber air yg ditetapkan)

10.2. PENETAPAN AREAL KEGIATAN PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Areal Kegiatan Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi			0	0	0	TN, TWA, TB, SM, TAHURA

10.3. AREAL PERIZINAN PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi			23	168	232	TN, TWA, TB, SM, Tahura

10.4. PEMANFAATAN AIR DAN ENERGI AIR DI KAWASAN KONSERVASI

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Pemanfaatan Air dan Energi Air di Kawasan Konservasi	-	-	-	-	-	-

10.5. PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN PANAS BUMI (AREAL KEGIATAN EKSPLORASI / AREAL KEGIATAN USAHA) DI KAWASAN KONSERVASI

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (Areal Kegiatan Eksplorasi / Areal Kegiatan Usaha) di Kawasan Konservasi			115	0	0	TN, TWA, TAHURA

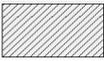
10.6. JASA LINGKUNGAN KARBON DI KAWASAN KONSERVASI

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Jasa Lingkungan Karbon di Kawasan Konservasi			38	115	0	TN, TWA, TB, SM, TAHURA

10.7. DESAIN TAPAK PENGELOLAAN PARIWISATA ALAM DI KAWASAN KONSERVASI

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Kawasan Konservasi			0	92	230	Ruang Usaha (TN TWA TAHURA)
			56	108	0	Ruang Publik(TN TWA TAHURA)

10.8. PERIZINAN BERUSAHA PENGUSAHAAN SARANA JASA LINGKUNGAN WISATA ALAM DI KAWASAN KONSERVASI

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Perizinan Berusaha Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam di Kawasan Konservasi			0	0	0	TN TWA TAHURA

III. BIDANG PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN

11. DIREKTORAT PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DAS

11.1. LAHAN KRITIS

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Tidak Kritis			79	0	0	
Potensial Kritis			168	82	0	
Agak Kritis			205	137	102	
Kritis			245	202	122	
Sangat Kritis			255	255	190	

11.2. DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Batas Daerah Aliran Sungai			115	178	255	Tebal segmen garis 1,5

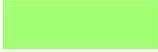
11.3. RAWAN LIMPASAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
0 - 20			255	255	190	
21 - 40			255	255	110	
41 - 60			230	230	0	
61 - 80			168	168	0	
81 - 99			115	115	0	

11.4. RAWAN EROSI

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
<=15 Ton/Ha/Tahun			255	235	175	
>15 -60 Ton/Ha/Tahun			255	211	127	
>60 – 180 Ton/Ha/Tahun			255	170	0	
>180 – 480 Ton/Ha/Tahun			168	112	0	
>480 Ton/Ha/Tahun			115	76	0	

11.5. KLASIFIKASI DAS

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Dipertahankan			163	255	115	
Dipulihkan			255	127	127	

11.6. RENCANA UMUM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (RURHL-DAS)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RURHL-DAS)	-	-	-	-	-	-

12. DIREKTORAT KONSERVASI TANAH DAN AIR

12.1. PENERAPAN TEKNIK KONSERVASI TANAH DAN AIR

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Strip Rumput			146	208	80	Usulan Baru, Titik Lokasi Strip rumput
Budi Daya Tanaman Lorong			146	208	80	Usulan Baru, Titik Lokasi Budi daya tanaman lorong
Perlindungan Kanan-Kiri/Tebing Sungai			146	208	80	Usulan Baru, Titik Lokasi Perlindungan Kanan-Kiri/Tebing Sungai
Tanaman Penutup Tanah Lainnya			146	208	80	Usulan Baru, Titik Lokasi Tanaman Penutup Tanah Lainnya
Dam Pengendali (Dpi)			166	166	166	Usulan Baru, Titik Lokasi Dpi
Dam Penahan (DPn)			166	166	166	Usulan Baru, Titik Lokasi Dpn
Gully Plug (GP)			166	166	166	Usulan Baru, Titik Lokasi GP
Kolam Retensi/Embung			0	176	240	Usulan Baru, Titik Lokasi Embung
Sumur Resapan Air (SRA)			0	176	240	Usulan Baru, Titik Lokasi SRA
Instalasi Pemanenan Air Hujan (IPAH)			0	176	240	Usulan Baru, Titik Lokasi IPAH
Penguat Tebing secara Ekohidrolika			166	166	166	Usulan Baru, Titik Lokasi Ekohidrolika
Saluran Pembuangan Air (SPA)			146	208	80	Usulan Baru, Titik Lokasi SPA
Bangunan Terjunan Air			56	182	255	Usulan Baru, Titik Lokasi Bangunan Terjunan Air
Teras			146	208	80	Usulan Baru,

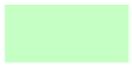
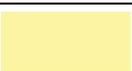
						Titik Lokasi Teras
Lubang Resapan Biopori (LRB)			0	176	240	Usulan Baru, Titik Lokasi Lubang Resapan Biopori (LRB)
Rorak (Saluran Buntu)			0	176	240	Usulan Baru, Titik Lokasi Rorak (Saluran Buntu)

12.2. REHABILITASI DAS

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai			0	0	0	10% simple hatch, black line

13. DIREKTORAT PERBENIHAN TANAMAN HUTAN

13.1. ZONA BENIH TANAMAN HUTAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Tubuh Air			204	255	255	
Alpine			234	252	159	
Sub Alpine			184	159	0	
Batu Kapur			255	210	255	
Ultrabasa			255	150	255	
Gambut			168	0	0	
Hujan Pegunungan			197	255	196	
Hujan Sub Pegunungan			118	252	0	
Hujan Dataran Rendah			85	135	5	
Mangrove			134	196	0	
Rawa			147	171	43	
Kerangas			252	244	163	
Musim Dataran Rendah			255	205	66	
Musim Pegunungan			252	160	0	
Savana			221	255	0	
Pantai			91	171	117	

13.2. PERSEBARAN PERSEMAIAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Persemaian			255	0	97	

13.3. PERSEBARAN SUMBER BENIH TANAMAN HUTAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Sumber Benih			0	0	0	

14. DIREKTORAT REHABILITASI HUTAN

14.1. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan			252	232	207	

15. DIREKTORAT REHABILITASI PERAIRAN DARAT DAN MANGROVE

15.1. DAERAH TANGKAPAN AIR DANAU

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Batas DTA Danau			115	223	255	Tebal Segmen daris 1,5

15.2. MANGROVE

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Mangrove (Mangrove Lebat)			230	0	169	
Mangrove (Mangrove Sedang)			255	0	197	
Mangrove (Mangrove Jarang)			255	190	232	

15.3. MATA AIR

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Mata Air			0	197	255	

IV. BIDANG PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

16. DIREKTORAT BINA RENCANA PEMANFAATAN HUTAN

16.1. TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPHP DAN KPHL)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
HL- Blok Inti			20	120	50	
HL-Blok Pemanfaatan			200	255	0	
HL-Blok Khusus			20	140	170	
HP-Blok Perlindungan			255	110	0	
HP-Blok Pemanfaatan			225	150	150	
HP-Blok Khusus			240	190	20	

16.2. ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN UNTUK PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Arahan Pemanfaatan			0	0	0	10% simple hatch, black line

17. DIREKTORAT BINA USAHA PEMANFAATAN HUTAN

17.1. PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)			255	85	0	Outline Width : 2

18. DIREKTORAT PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN

18.1. RENCANA KERJA USAHA PEMANFAATAN HUTAN (RKUPH)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Penataan Kawasan Lindung			252	28	4	
Penataan Areal Budidaya			255	255	0	Line : R=223, G=218, B=0
Penataan Areal Produksi			255	255	0	Line : R=223, G=218, B=0

18.2. TATA BATAS AREAL KERJA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Tata Batas Definitif Areal Kerja			0	0	0	
Proses Tata Batas Areal Kerja			0	0	0	Tebal Segmen 3, Panjang Segmen 10

19. DIREKTORAT BINA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN

19.1. PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)	-	-	-	-	-	-

V. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
20. DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT

20.1. FUNGSI EKOSISTEM GAMBUT (FEG)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Fungsi Lindung Ekosistem Gambut			56	168	0	Outline Width : 1px Outline
			0	0	0	
Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut			255	255	115	Outline Width : 1px Outline
			0	0	0	

20.2. KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT (KHG)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
KHG dalam Kabupaten/Kota			163	255	115	Outline Width : 1px Outline
			56	168	0	
KHG Lintas Kabupaten/Kota			255	211	127	Outline Width : 1px Outline
			230	152	0	
KHG Lintas Provinsi			223	115	255	Outline Width : 1px Outline
			169	0	230	

20.3. STATUS KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT (SKEG)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Tidak Rusak			38	115	0	
Rusak Ringan			85	255	0	
Rusak Sedang			255	255	0	
Rusak Berat			255	170	0	
Rusak Sangat Berat			255	0	0	
Areal Konservasi / Kondisi Alamiah			197	0	255	
Prioritas Pemulihan I			255	0	0	
Prioritas Pemulihan II			255	170	0	
Prioritas Pemulihan III			255	255	0	
Prioritas IV			38	115	0	

21. DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN PESISIR DAN LAUT

21.1. INDEKS KUALITAS AIR LAUT

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Lokasi Pemantauan			255	0	0	Outline Ø Outline Width : 1

21.2. PEMANTAUAN SAMPAH LAUT

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Lokasi Pemantauan			0	255	0	Outline Ø Outline Width : 1

22. DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN

22.1. INDIKATIF KERUSAKAN LAHAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternati Lainnya	R	G	B	Keterangan
Indikasi Kerusakan Lahan			230	23	0	Fill
			167	4	0	Outline Ø Outline Width : 1

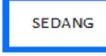
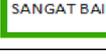
23. DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

23.1. STATUS MUTU AIR

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Memenuhi Baku Mutu			85	255	0	
Cemar Ringan			0	112	225	
Cemar Sedang			255	255	0	
Cemar Berat			255	0	0	

24. DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

24.1. INDEKS KUALITAS UDARA

Definisi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Sangat Kurang			245	0	0	
Kurang			255	255	0	
Sedang			0	112	255	
Baik			148	247	0	
Sangat Baik			56	168	0	

24.2. BEBAN EMISI

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Beban Emisi	-	-	-	-	-	-

VI. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

25. DIREKTORAT PENANGANAN SAMPAH

25.1. SEBARAN PENGELOLAAN SAMPAH

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
≥ 100% (PERLU KLARIFIKASI)			255	0	0	Fill
			110	110	110	Outline Outline Width : 1
NO DATA			255	0	0	Fill
			110	110	110	Outline Outline Width : 1
> 0 - < 50			255	225	0	Fill
			110	110	110	Outline Outline Width : 1
50 - < 70			255	170	0	Fill
			110	110	110	Outline Outline Width : 1
70 - 100			112	168	0	Fill
			110	110	110	Outline Outline Width : 1

26. DIREKTORAT PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

26.1. PEMANTAUAN MERKURI

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Air Bersih (Di Atas BML)			253	35	2	Outline width: 1
Air Bersih (Di Atas BML)			8	247	18	Outline width: 1
Air Permukaan (Di Atas BML)			253	35	2	Outline width: 1
Air Permukaan (Di Bawah BML)			8	247	18	Outline width: 1
Tanah (Di Atas BML)			253	35	2	Outline width: 1
Tanah (Di Bawah BML)			8	247	18	Outline width: 1
Sedimen (Di Atas BML)			253	35	2	Outline width: 1
Sedimen (Di Atas BML)			8	247	18	Outline width: 1
Biota (Di Atas BML)			253	35	2	Outline width: 1
Biota (Di Atas BML)			8	247	18	Outline width: 1
Tanaman (Di Atas BML)			253	35	2	Outline width: 1
Tanaman (Di Atas BML)			8	247	18	Outline width: 1
Udara (Di Atas BML)			253	35	2	Outline width: 1
Udara (Di Atas BML)			8	247	18	Outline width: 1

VII. BIDANG PENGENDALI PERUBAHAN IKLIM

27. DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

27.1. SEBARAN HOTSPOT

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Sebaran Hotspot			255	0	0	

27.2. AREAL KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

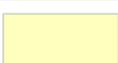
Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Areal Karhutla			115	0	0	

27.3. RAWAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Rendah			0	0	255	
Sedang			0	255	0	
Tinggi			255	255	0	
Sangat Tinggi			255	0	0	

28. DIREKTORAT ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM

28.1. KERENTANAN PERUBAHAN IKLIM

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Sangat Rendah			0	92	230	Warna outline : abu-abu (grey) 30% dengan tebal 0.01 Untuk polygon desa yang tidak ada data diberi kotak "hollow" dengan keterangan : no data
Rendah			115	178	115	
Sedang			255	255	190	
Tinggi			247	122	45	
Sangat Tinggi			232	21	21	

28.2. LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Lokasi ProKlim			230	0	0	warna outline hitam RGB: 0-0-0 dengan tebal 0.15 ukuran titik : 3.00 - 6.00 (d disesuaikan dengan kebutuhan layout)

29. DIREKTORAT INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DAN MONITORING PELAPORAN VERIFIKASI

29.1. WILAYAH PENGUKURAN KINERJA REDD+ (WPK REDD+)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Natural Forest			96	230	99	
Peatland			230	76	0	

29.2. CADANGAN KARBON

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Cadangan Karbon	-	-	-	-	-	-

VIII. BIDANG PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

30. DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL

30.1. PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN DESA (PPHD)

Definisi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD)			0	200	255	Outline Width : 2

30.2. PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (PPHKm)

Definisi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm)			0	77	168	Outline Width : 2

30.3. PERSETUJUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAMAN RAKYAT (PPHTR)

Definisi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR)			255	50	100	Outline Width : 2

30.4. PERSETUJUAN KEMITRAAN KEHUTANAN (PKK)

Definisi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Persetujuan Kemitraan Kehutanan (PKK)			168	0	0	Outline Width : 2

30.5. IZIN PENGELOLAAN HUTAN PERHUTANAN SOSIAL (IPHPS)

Definisi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS)			230	152	0	Outline Width : 2

31. DIREKTORAT PENANGANAN KONFLIK, TENURIAL DAN HUTAN ADAT

31.1. PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Penetapan Status Hutan Adat			168	56	0	

31.2. PENETAPAN STATUS HUTAN HAK

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Penetapan Status Hutan Hak			78	78	78	

IX. BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

32. DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

32.1. SEBARAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI PENGADILAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Kerusakan			255	0	0	warna outline hitam RGB: 0-0-0 dengan tebal 0.15
Pencemaran			0	112	255	warna outline hitam RGB: 0-0-0 dengan tebal 0.15
Kerusakan dan Pencemaran			255	255	0	warna outline hitam RGB: 0-0-0 dengan tebal 0.15

32.2. SEBARAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Kerusakan			255	0	0	warna outline hitam RGB: 0-0-0 dengan tebal 0.15
Pencemaran			0	112	255	warna outline hitam RGB: 0-0-0 dengan tebal 0.15
Kerusakan dan Pencemaran			255	255	0	warna outline hitam RGB: 0-0-0 dengan tebal 0.15

X. BIDANG STANDARISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN

33. SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

33.1. HUTAN PENELITIAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Hutan Penelitian			249	151	4	Fill
			28	69	135	Outline width : 2

34. PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN

34.1. PETAK UKUR PERMANEN (PUP)

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Petak Ukur Permanen			0	0	0	Outline width : 2
			207	226	243	Fill

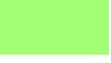
XI. BIDANG INDONESIA'S FOLU NET SINK

35. TIM KERJA INDONESIA'S FOLU NET SINK

35.1. INDEKS PRIORITAS LOKASI (IPL)

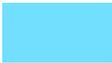
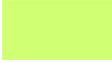
Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Ekstrim Rendah			40	146	199	
Sangat Rendah			109	169	179	
Rendah			160	194	155	
Agak Rendah			206	222	129	
Sedang			250	250	100	
Agak Tinggi			252	196	76	
Tinggi			250	141	52	
Sangat Tinggi			242	89	34	
Ekstrim Tinggi			232	16	20	

35.2. TIPOLOGI KELEMBAGAAN

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
A1			156	56	181	
A2			202	51	232	
A3			210	111	227	
A4			197	163	204	
B1			38	115	0	
B2			56	168	0	
B3			76	230	0	
B4			163	255	115	
C1			168	112	0	

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
C2			230	152	0	
C3			255	170	0	
C4			255	211	127	
D1			168	168	0	
D2			230	230	0	
D3			255	255	115	
D4			255	255	190	

35.3. ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI INDONESIA FOLU NET SINK 2030

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Pencegahan Deforestasi Mineral			85	255	0	
Pencegahan Deforestasi Gambut			38	115	0	
Pencegahan Degradasi Konsesi			115	223	255	
Pembangunan Hutan Tanaman			115	255	223	
Penerapan Pengayaan Hutan Alam			255	211	127	
Penerapan RIL-C			209	255	115	
Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi			255	190	190	
Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi			223	115	255	
Pengelolaan Tata Air Gambut			0	92	230	
Pelaksanaan Restorasi Gambut			245	122	182	
Perlindungan Areal Konservasi Tinggi			115	76	0	
Pengelolaan Mangrove			255	0	0	

**35.4. RENCANA KERJA ARAHAN PELAKSANAAN AKSI MITIGASI INDONESIA
FOLU NET SINK 2030**

Deskripsi	Warna/Anotasi	Alternatif Lainnya	R	G	B	Keterangan
Pencegahan Deforestasi Mineral			85	255	0	
Pencegahan Deforestasi Gambut			38	115	0	
Pencegahan Degradasi Konsesi			115	223	255	
Pembangunan Hutan Tanaman			115	255	223	
Penerapan Pengayaan Hutan Alam			255	211	127	
Penerapan RIL-C			209	255	115	
Peningkatan Cadangan Karbon dengan Rotasi			255	190	190	
Peningkatan Cadangan Karbon Tanpa Rotasi			223	115	255	
Pengelolaan Tata Air Gambut			0	92	230	
Pelaksanaan Restorasi Gambut			245	122	182	
Perlindungan Areal Konservasi Tinggi			115	76	0	
Pengelolaan Mangrove			255	0	0	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 399 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PENYEBARLUASAN INFORMASI
GEOSPASIAL TEMATIK LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK
LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN



DAFTAR ISI

	<i>Hal.</i>
HALAMAN JUDUL	237
DAFTAR ISI.....	238
DAFTAR FORMULIR DAN ALUR.....	239
BAB I. PENDAHULUAN.....	240
A. Latar Belakang	241
B. Dasar Hukum.....	242
C. Maksud dan Tujuan	242
D. Ruang Lingkup.....	242
E. Definisi/Pengertian.....	242
BAB II. PRINSIP PENYEBARLUASAN IGT.....	245
BAB III. KETENTUAN UMUM DALAM PENYEBARLUASAN IGT.....	247
A. Penyelenggaraan Penyebarluasan IGT LHK.....	247
B. Format dan Penyimpanan Data.....	247
C. Kategori Pengguna.....	247
D. Media Penyebarluasan IGT.....	248
E. Persyaratan Administrasi.....	249
BAB IV. MEKANISME PENYEBARLUASAN IGT.....	250
A. Tata Cara Penyebarluasan IGT LHK	250
B. Penggunaan IGT Eksternal KLHK.....	250
BAB V. KETENTUAN LAINNYA.....	257
BAB VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI	259
BAB VII. PENUTUP	260

DAFTAR FORMULIR DAN ALUR

	Hal.
Formulir 1. Pakta Integritas	261
Daftar 1. IGT Renaksi KSP	262
Formulir 2. Berita Acara Serah Terima Data dan Informasi	264
Formulir 3. Berita Acara Serah Terima Akun SIGAP	266
Alur 1. Penyebarluasan IGT ke Produsen DG	267
Alur 2. Penyebarluasan IGT ke BPKHTL	268
Alur 3. Penyebarluasan IGT ke Non Produsen DG	269
Alur 4. Penyebarluasan IGT ke UPT KLHK	270
Alur 5. Penyebarluasan IGT ke Instansi Pemerintah	271
Alur 6. Penyebarluasan IGT ke Perguruan Tinggi	272
Alur 7. Penyebarluasan IGT Melalui PKS Pertukaran Data	273
Alur 8. Penyebarluasan IGT ke Lembaga Internasional	274
Alur 9. Penyebarluasan IGT ke Eksternal	275
Daftar 2. Data Geospasial Dukungan BPKHTL kepada Produsen DG	276
Prosedur Pelayanan Permohonan IGT di Walidata Geospasial	278
Prosedur Pelayanan Permohonan IGT di BPKHTL	280

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) semakin meningkat dan harus tersedia secara cepat dalam rangka mendukung Pengurusan Hutan, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai salah satu simpul jaringan dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, bertanggung jawab terhadap ketersediaan DG dan IG Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KLHK bertugas melakukan kegiatan pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran DG, melakukan pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG, menyediakan DG dan IG yang dapat diakses oleh masyarakat, membangun sistem akses DG dan IG yang terintegrasi dengan sistem akses JIGN.

KLHK merupakan salah satu Kementerian yang mempunyai Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang sangat beragam jenis dan banyak jumlahnya, dan diproduksi oleh 34 (tiga puluh empat) Produsen DG, yaitu sebanyak 97 IGT telah tersedia dan dikelola dalam Satu Basis Data Geospasial Sistem Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIGAP KLHK). Jumlah IGT LHK tersebut berpotensi bertambah menjadi lebih dari 100 (seratus) IGT. Guna mengakomodir adanya perkembangan jumlah IGT dalam basis data geospasial diperlukan tata kelola penyebarluasan IGT yang mudah dipahami, ringkas dan jelas.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) merupakan Walidata Geospasial yang memiliki kewenangan melakukan pengaturan akses terhadap Produsen DG, Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) dan pengguna lainnya ke basis data geospasial. Walidata Geospasial mempunyai tugas melaksanakan kegiatan monitoring pemutakhiran DG dan IGT yang bersumber dari Produsen DG serta melakukan penjaminan kualitas IGT dan selanjutnya dilakukan penyimpanan dan pengamanan sebelum dilakukan penyebarluasan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Walidata Geospasial tersebut, maka diperlukan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penyebarluasan IGT Lingkup KLHK.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial;
7. Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021;
9. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2010 tentang Sistem Informasi Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan.

C. Maksud dan Tujuan

Prosedur Penyebarluasan IGT lingkup KLHK dimaksudkan untuk memberikan panduan dan pengaturan bagi Walidata Geospasial dan BPKHTL dalam rangka Penyebarluasan IGT kepada pengguna. Pedoman ini juga diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan IGT LHK sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku.

Tujuan disusunnya prosedur ini adalah sebagai panduan dalam hal:

1. Tata cara prosedur penyebarluasan IGT LHK bagi pengguna internal dan eksternal KLHK.
2. Ketentuan dan persyaratan penyebarluasan IGT LHK.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam prosedur ini adalah:

1. Prinsip penyebarluasan IGT LHK;
2. Ketentuan umum penyebarluasan IGT LHK;
3. Mekanisme penyebarluasan IGT LHK;
4. Ketentuan lainnya; dan
5. Pemantauan dan evaluasi.

E. Definisi/Pengertian

1. *Geospasial* atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
2. *Data Geospasial* yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
3. *Informasi Geospasial* yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
4. *Informasi Geospasial Tematik* yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.

5. *Walidata Geospasial* adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengumpulan, penjaminan kualitas, pengelolaan, serta penyebarluasan IGT yang bersumber dari Produsen DG.
6. *Produsen Data Geospasial* adalah unit kerja pada simpul jaringan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menghasilkan DG dan IGT berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. *Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan* yang selanjutnya disingkat BPKHTL adalah Unit Pelaksana Teknis yang menyelenggarakan pemantapan Kawasan hutan dan tata lingkungan.
8. *Pengguna* adalah instansi pemerintah, pemerintah daerah, perorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan DG dan IGT.
9. *Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)* adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
10. *Jaringan Informasi Geospasial (JIG) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan* adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan DG dan IG lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
11. *SIGAP* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sistem penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) lingkup KLHK secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, otomatis dan berkesinambungan serta berdayaguna untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai data dan IGT terkini dan berkualitas melalui akses ke jaringan dengan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan dan keamanan data
12. *Penyebarluasan IGT* adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan pertukaran DG dan IGT yang dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
13. *Sistem Informasi Geografis* selanjutnya disingkat SIG adalah sistem komputer yang dirancang untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, menganalisis, mengelola dan menyajikan data dan informasi geospasial.
14. *Basis Data Geospasial* adalah sistem penyimpanan Data dan Informasi Geospasial yang terstruktur pada media digital.
15. *Atribut* adalah keterangan yang menjelaskan informasi/karakteristik dari suatu unsur DG dan IG.
16. *Kamus Data Geospasial* adalah panduan untuk penyusunan data geospasial yang sistematis yang memuat nama unsur, deskripsi, dasar

hukum, nama Produsen DG dan *field* atribut tiap tematik, sehingga memudahkan dalam penyusunan geodatabase secara fisik.

17. *Map service* adalah representasi data geospasial yang disediakan pada server yang memungkinkan diakses dengan komputer atau perangkat lain dengan menggunakan aplikasi melalui jaringan intranet atau internet.
18. *Direktur* adalah Pejabat Tinggi Pratama yang disertai tugas dan bertanggung jawab sebagai Walidata Geospasial, yaitu Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.

BAB II

PRINSIP PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

Prinsip dalam Penyebarluasan IGT lingkup Kementerian LHK adalah:

a. Terintegrasi

JIG KLHK harus terintegrasi dengan JIGN (portal nasional) dan Kebijakan Satu Peta (KSP) untuk memudahkan penyebarluasan IGT antar instansi pemerintah. Setiap Produsen DG dan BPKHTL memiliki basis data geospasial untuk menyimpan DG dan IGT yang bersumber dari basisdata Walidata Geospasial (SIGAP KLHK) untuk mempermudah dalam pemutakhiran, pemantauan, manajemen kualitas dan pertukaran DG dan IGT, serta penggunaan IGT.

Basis data geospasial SIGAP KLHK merupakan sumber data bagi Sistem Informasi Kehutanan untuk kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta pemantauan antara lain kawasan hutan, penutupan lahan, dan kegiatan lainnya. Pembangunan sistem informasi atau aplikasi berbasis spasial harus terintegrasi dengan SIGAP KLHK.

b. Akurat

DG dan IGT yang disampaikan Produsen DG kepada Walidata Geospasial harus akurat dan terpercaya kebenarannya, terstruktur dan berkualitas sesuai dengan standar Kamus Data Geospasial LHK dan aturan topologi, serta terkini sesuai dengan kondisi perkembangan data terbaru.

c. Aman

DG dan IGT yang disimpan dalam basis data geospasial Walidata Geospasial, Produsen DG dan BPKHTL harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya melalui pembuatan *user* dan *password*, *digital signature* serta penandatanganan pakta integritas.

d. Transparan

Penyajian dan penyebarluasan IGT harus memberikan kemudahan akses bagi para pengguna.

e. Sederhana

Persyaratan dan prosedur dalam penyebarluasan IGT harus mudah dipahami dan dipatuhi, serta tidak memerlukan biaya.

f. Tidak eksklusif

Secara umum akses DG dan IGT harus disediakan bagi seluruh pengguna. Pengaturan penyebarluasan IGT harus terstruktur agar tidak mengecualikan beberapa pihak yang kurang/tidak memahami pengetahuan tentang kondisi dan penggunaan data serta teknologi yang terkait dengan data dimaksud.

- g. **Wajar**
Penyebarluasan IGT harus dilakukan dengan persyaratan yang adil bagi semua pengguna. Perjanjian harus mengakui keunggulan dan manfaat dari kesepakatan dalam penyebarluasan IGT antara kedua pihak, yaitu Walidata Geospasial dan pengguna.
- h. **Tidak diskriminatif**
Persyaratan penyebarluasan IGT harus diterapkan secara adil kepada semua pihak/pengguna. Penyedia IGT harus konsisten dalam pengaturan penyebarluasan IGT, sehingga tidak ada pengguna yang tidak dapat menerima manfaat.
- i. **Pengakuan dan penyebutan**
Pengguna harus mengakui dan menyebut sumber data jika memadukan data dalam produk IGT yang dihasilkannya dan penyebarluaskannya. Hal ini dapat dicapai dengan cara mendokumentasikan sumber data dalam metadata yang lengkap pada setiap data yang digunakan dan dipadukan untuk memperjelas asal-usul DG dan IGT secara berurutan dan lengkap sehingga akan membantu pengguna berikutnya dalam membuat produk data/informasi turunannya.
- j. **Ketepatan**
Pengguna harus diberikan akses IGT dalam waktu sesingkat mungkin.

BAB III
KETENTUAN UMUM DALAM
PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

A. Penyelenggaraan Penyebarluasan IGT LHK

Unit Kerja yang bertugas melakukan penyebarluasan IGT, meliputi pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran IGT adalah Walidata Geospasial, yang dibantu oleh BPKHTL sesuai wilayah kerjanya.

Kegiatan permohonan analisis spasial, pertimbangan teknis dan telaah spasial lainnya, mengacu pada peraturan perundangan dan mekanisme yang sudah berlaku dan dilakukan oleh Produsen DG dan dapat dibantu oleh UPT KLHK sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

B. Format dan Penyimpanan Data

IGT yang akan disebarluaskan bersumber dari basis Data Geospasial SIGAP KLHK yang telah melalui proses manajemen kualitas, dan disajikan dalam format sebagai berikut:

- a. Format Sistem Informasi Geografis (SIG) misal *shapefile/geodatabase* (shp/gdb);
- b. Format WMS (*web map service*);
- c. Format Jpg/Pdf;
- d. Peta dan tabel hasil analisis spasial; dan
- e. Format lain sesuai perkembangan teknologi.

Penyebarluasan IGT untuk pengguna kategori instansi pemerintah dan perguruan tinggi mendapatkan IGT dalam semua format, sedangkan pengguna kategori Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat umum diberikan dalam format jpg/pdf, *map service* dan hasil analisis spasial.

Dalam rangka memudahkan tata kelola dan pemanfaatan IGT di internal penyelenggara IGT serta menjamin keamanan dan kerahasiaan data, maka IGT hasil unduhan dari SIGAP KLHK disimpan pada media penyimpanan elektronik oleh masing-masing penyelenggara IGT (Produsen DG dan BPKHTL).

C. Kategori Pengguna

Pengguna dikategorikan sebagaimana berikut:

1. Instansi Pemerintah;
 - a. Unit Kerja lingkup KLHK di Pusat dan UPT:
 - (1) Produsen DG yaitu unit kerja Eselon II lingkup KLHK yang memproduksi IGT LHK (sesuai Lampiran dalam Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 dan Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Perubahan Daftar IGT LHK);

- (2) Non Produsen DG yaitu unit kerja Eselon II lingkup KLHK yang tidak memproduksi IGT LHK di pusat; dan
 - (3) Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup KLHK;
- b. Kementerian/Lembaga Pemerintah di pusat dan daerah;
 - c. Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. Perguruan Tinggi;
 3. Swasta/Badan Usaha;
 4. Perorangan; dan
 5. Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat.

D. Media Penyebarluasan IGT

Proses penyebarluasan IGT dapat dilakukan melalui media elektronik dengan cara akses ke menu tata Kelola SIGAP (<https://sigap.menlhk.go.id/tatakelola/>), portal SIGAP (<https://sigap.menlhk.go.id/>) dan/atau portal Kebijakan Satu Peta/KSP (<https://portalksp.ina-sdi.or.id.>), maupun melalui surat permohonan yang akan ditindaklanjuti dengan penyampaian surat elektronik atau media lainnya.

1. Akses ke SIGAP KLHK menu tata kelola dilakukan dengan *user* dan *password*, yang diberikan oleh Walidata Geospasial kepada Pengguna kategori Instansi Pemerintah yang telah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan melalui personil penanggung jawab yang telah menandatangani Pakta Integritas sebagaimana **Formulir 1**.
2. Pengguna sebagaimana angka 1 meliputi Produsen DG, BPKHTL, Non Produsen DG, dan Instansi Pemerintah yang telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data diberikan akun akses SIGAP KLHK menu tata kelola.
3. Hak akses diberikan sesuai kategori pengguna dengan kriteria:
 - a. Hak untuk mengunggah dan mengunduh tanpa pembatasan periode akses bagi Walidata Geospasial, Produsen DG dan BPKHTL;
 - b. Hak untuk mengunggah dan mengunduh dengan pembatasan periode akses bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang melakukan Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data; dan
 - c. Hak mengunduh dengan pembatasan periode akses dan pengaturan IGT tertentu bagi Non Produsen DG.

4. Sepanjang infrastruktur JIG dapat beroperasi dengan baik, penyebarluasan IGT dilakukan melalui media elektronik SIGAP KLHK.
5. Akses IGT dapat diberikan melalui surat permohonan dan akses melalui tautan *cloud* dengan *password*.
6. Permohonan IGT yang termasuk Renaksi KSP oleh pengguna eksternal KLHK kategori instansi pemerintah, diarahkan untuk akses ke portal KSP. Daftar IGT Portal KSP sebagaimana **Daftar 1**.
7. Akses ke portal SIGAP KLHK selain menu tata kelola diberikan kepada seluruh kategori pengguna.

E. Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi untuk penyebarluasan IGT dan kerjasama pertukaran data adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan yang ditandatangani pejabat yang berwenang dilengkapi rincian nama IGT, cakupan wilayah, tujuan penggunaan dan nara hubung.
2. Berita Acara Serah Terima Data dan Informasi sebagaimana **Formulir 2**.
3. Berita Acara Serah Terima Akun SIGAP KLHK sebagaimana **Formulir 3**.
4. Proposal penelitian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang bagi pengguna Perguruan Tinggi.
5. Pakta Integritas bagi pengguna yang mendapatkan hak akses dan instansi pemerintah yang melibatkan pihak ketiga.
6. Surat Keputusan atau Surat Tugas pemegang akun akses.
7. Dokumen Kerja Sama/kontrak bagi pengguna yang akan melibatkan pihak ketiga dalam analisis data spasial yang bersumber dari KLHK.
8. Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data bagi Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD yang mengajukan pertukaran IGT.

BAB IV

MEKANISME PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK

A. Tata Cara Penyebarluasan IGT LHK

1. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Produsen DG
 - a. Tim Pelaksana JIG di Produsen DG yang ditetapkan melalui keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian LHK menandatangani Pakta Integritas dan BAST Akun untuk mendapatkan akun akses SIGAP KLHK (*user* dan *password*).
 - b. Apabila Produsen DG akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga menggunakan IGT yang bersumber dari SIGAP KLHK, maka Produsen DG harus menyampaikan *copy* surat/dokumen Kerja Sama (kontrak) dan Pakta Integritas yang telah ditandatangani Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial.
 - c. Produsen DG menyampaikan rekapitulasi penggunaan IGT ke Walidata Geospasial.
 - d. Alur Penyebarluasan IGT ke Produsen DG sebagaimana **Alur 1**.
2. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke BPKHTL.
 - a. Tim Pelaksana JIG di BPKHTL yang ditetapkan melalui keputusan Direktur IPSDH menandatangani Pakta Integritas dan BAST Akun untuk mendapatkan akun akses SIGAP KLHK (*user* dan *password*).
 - b. Apabila BPKHTL akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga menggunakan IGT yang bersumber dari SIGAP KLHK, maka BPKHTL harus menyampaikan *copy* surat/dokumen Kerja Sama (kontrak) dan Pakta Integritas yang telah ditandatangani Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial.
 - c. BPKHTL wajib melaporkan penggunaan IGT ke Walidata Geospasial.
 - d. Alur Penyebarluasan IGT ke BPKHTL sebagaimana **Alur 2**.
3. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Pengguna Internal KLHK Non Produsen DG (Eselon II Pusat selain Produsen DG).
 - a. Non Produsen DG mengajukan surat permohonan ke Walidata Geospasial yang memuat informasi:
 - (1) Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya;
 - (2) Tujuan penggunaan IGT;
 - (3) Nama petugas yang ditunjuk serta Pakta Integritas yang ditandatangani; dan
 - (4) Narahubung (nama, nomor *telephone* dan alamat e-mail).
 - b. Walidata Geospasial menyiapkan akun akses SIGAP dengan pengaturan jenis IGT yang dimohon dan periode akses, dan atau menyiapkan IGT yang dimohon oleh Non Produsen DG, dengan cara

- mengunduh dari SIGAP KLHK kemudian mengunggah IGT tersebut ke *cloud*.
- c. Walidata Geospasial menyiapkan surat balasan kepada Non Produsen DG dengan melampirkan tautan *cloud* dan formulir BAST yang harus ditandatangani pihak Non Produsen dan dikirim kembali ke Walidata Geospasial.
 - d. Walidata Geospasial setelah menerima formulir BAST yang ditandatangani, memberikan *password* untuk mengakses data dalam *cloud* kepada Non Produsen DG yang berlaku selama 2 (dua) minggu.
 - e. Apabila Non Produsen DG akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT yang diperoleh, maka Non Produsen DG harus menyampaikan *copy* surat/dokumen Kerja Sama (kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani Non Produsen DG dan Pakta Integritas yang ditandatangani Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial.
 - f. Non Produsen DG menyampaikan laporan hasil penggunaan IGT ke Walidata Geospasial;
 - g. Alur Penyebarluasan IGT ke pengguna internal KLHK Non Produsen DG (Eselon II Pusat selain Produsen DG) sebagaimana **Alur 3**.
4. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Pengguna Internal KLHK Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK.
- a. UPT KLHK mengajukan surat permohonan ke BPKHTL setempat yang memuat informasi:
 - (1) Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya;
 - (2) Tujuan penggunaan IGT;
 - (3) Nama petugas yang ditunjuk serta Pakta Integritas yang ditandatangani; dan
 - (4) Narahubung (nama, nomor *telephone* dan alamat e-mail).
 - b. BPKHTL menyiapkan IGT yang dimohon oleh UPT KLHK, dengan cara mengunduh dari SIGAP KLHK kemudian mengunggah IGT tersebut ke *cloud*.
 - c. BPKHTL menyiapkan surat balasan kepada UPT KLHK dengan melampirkan tautan *cloud* dan formulir BAST yang harus ditandatangani dan dikirim kembali ke BPKHTL.
 - d. BPKHTL setelah menerima formulir BAST yang ditandatangani, memberikan *password* untuk mengakses data dalam *cloud* kepada UPT yang berlaku selama 2 (dua) minggu.
 - e. Apabila UPT akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT yang diperoleh, maka UPT harus menyampaikan *copy* surat/dokumen Kerja Sama (kontrak), Pakta

Integritas yang ditandatangani UPT dan Pakta Integritas yang ditandatangani Pihak Ketiga kepada BPKHTL.

- f. UPT KLHK menyampaikan laporan hasil penggunaan IGT ke BPKHTL;
 - g. Permohonan IGT dengan cakupan lintas wilayah kerja BPKHTL, diajukan kepada Walidata Geospasial dengan prosedur permohonan yang sama; dan
 - h. Alur Penyebarluasan IGT ke Pengguna Internal Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK selain BPKHTL sebagaimana **Alur 4**.
5. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Pengguna Eksternal KLHK Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga Pemerintah di pusat dan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan BUMN/BUMD).
- a. Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah mengajukan surat permohonan ke Walidata Geospasial atau BPKHTL setempat yang memuat informasi:
 - (1) Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya;
 - (2) Tujuan penggunaan IGT; dan
 - (3) Narahubung (nama, nomor *telephone* dan alamat e-mail).
 - b. Walidata Geospasial atau BPKHTL menyiapkan IGT yang bersumber dari SIGAP KLHK, kemudian mengunggah IGT tersebut ke *cloud*.
 - c. Walidata Geospasial atau BPKHTL menyiapkan surat balasan kepada Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah dengan melampirkan tautan *cloud* dan formulir BAST yang harus ditandatangani dan dikirimkan kembali ke Walidata Geospasial atau BPKHTL.
 - d. Walidata Geospasial atau BPKHTL setelah menerima formulir BAST yang ditandatangani, memberikan *password* untuk mengakses data dalam *cloud* kepada Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah yang berlaku selama 2 (dua) minggu.
 - e. Apabila Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT yang diperoleh, maka Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah harus menyampaikan *copy* surat/dokumen Kerja Sama (Kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah dan Pakta Integritas yang ditandatangani Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial atau BPKHTL.
 - f. Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah wajib menyampaikan laporan hasil penggunaan IGT ke Walidata Geospasial atau BPKHTL.
 - g. Alur Penyebarluasan IGT ke Pengguna Eksternal Instansi Pemerintah sebagaimana **Alur 5**.

6. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Perguruan Tinggi.
 - a. Perguruan Tinggi mengajukan surat permohonan IGT ke Walidata Geospasial atau BPKHTL setempat dengan menyertakan:
 - (1) Proposal penelitian yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - (2) Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya;
 - (3) Tujuan penggunaan IGT; dan
 - (4) Narahubung (nama, nomor *telephone* dan alamat e-mail).
 - b. Walidata Geospasial atau BPKHTL menyiapkan IGT yang bersumber dari SIGAP KLHK, dan mengunggah IGT tersebut ke *cloud*.
 - c. Walidata Geospasial atau BPKHTL menyiapkan surat balasan kepada Perguruan Tinggi dengan melampirkan tautan *cloud* dan formulir BAST yang harus ditandatangani dan dikirimkan kembali ke Walidata Geospasial atau BPKHTL.
 - d. Walidata Geospasial atau BPKHTL setelah menerima formulir BAST yang ditandatangani, memberikan *password* untuk mengakses data dalam *cloud* kepada Perguruan Tinggi yang berlaku selama 2 (dua) minggu.
 - e. Apabila Perguruan Tinggi akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT yang diperoleh, maka Perguruan Tinggi/Akademisi harus menyampaikan *copy* surat/dokumen Kerja Sama (Kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani Perguruan Tinggi dan Pakta Integritas yang ditandatangani Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial atau BPKHTL.
 - f. Perguruan Tinggi wajib menyampaikan laporan hasil penggunaan IGT ke Walidata Geospasial atau BPKHTL.
 - g. Permohonan IGT yang berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, hanya diberikan kepada:
 1. Perguruan Tinggi yang penggunaan IGT-nya untuk kepentingan riset mahasiswa yang berasal dari Indonesia.
 2. Perguruan Tinggi yang memiliki kerja sama dengan instansi pemerintah dan/atau perguruan tinggi di Indonesia dengan tata cara permohonan dari Instansi Pemerintah atau Perguruan Tinggi dalam negeri yang bersangkutan.
 - h. Permohonan IGT yang berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang tidak memenuhi syarat sebagaimana pada huruf **g** di atas, maka permohonan IGT hanya dalam format *mapservice* pada menu peta interaktif dan format PDF/JPG pada menu peta cetak.
 - i. Alur penyebarluasan IGT ke Perguruan Tinggi sebagaimana **Alur 6**.

7. Tata Cara Penyebarluasan IGT melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan BUMN/BUMD).
 - a. Instansi pemerintah mengajukan surat permohonan Kerja Sama Pertukaran Data kepada Walidata Geospasial dengan menyertakan:
 - (1) Peraturan terkait Kelembagaan dalam penyelenggaraan IGT atau JIG;
 - (2) Mekanisme (PROSEDUR) berbagi DG dan IGT di internal pemohon;
 - (3) Surat penunjukan tenaga teknis sebagai pemegang akun yang akan mengelola IGT (dapat berupa Surat Keputusan atau Surat Tugas pemegang Akun); dan
 - (4) Pakta Integritas tenaga teknis yang telah ditunjuk.
 - b. Pemohon dan Walidata Geospasial melakukan pembahasan dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data yang telah disepakati, termasuk nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya.
 - c. Pemohon diberikan akun akses SIGAP KLHK yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
 - d. Apabila pemohon akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga menggunakan IGT yang bersumber dari SIGAP, maka pemohon harus menyampaikan *copy* surat/dokumen Kerja Sama (Kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani dan Pakta Integritas yang ditandatangani Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial.
 - e. Pemohon wajib menyampaikan laporan hasil penggunaan IGT ke Walidata Geospasial.
 - f. Alur penyebarluasan IGT melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan BUMN/BUMD) sebagaimana **Alur 7**.
8. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Lembaga Internasional.
 - a. Lembaga Internasional mengajukan surat permohonan IGT ke Walidata Geospasial dengan menyertakan:
 - (1) *Copy* surat/dokumen Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga dan/atau Perguruan Tinggi di Indonesia;
 - (2) Nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya;
 - (3) Tujuan penggunaan IGT; dan
 - (4) Narahubung (nama, nomor *telephone* dan alamat e-mail).

- b. Walidata Geospasial menyiapkan IGT yang bersumber dari SIGAP KLHK, dan mengunggah IGT tersebut ke *cloud*.
 - c. Walidata Geospasial menyiapkan surat balasan kepada Lembaga Internasional dengan melampirkan tautan *cloud* dan formulir BAST yang harus ditandatangani dan dikirimkan kembali ke Walidata Geospasial.
 - d. Walidata Geospasial setelah menerima formulir BAST yang ditandatangani, memberikan *password* untuk mengakses data dalam *cloud* kepada Perguruan Tinggi yang berlaku selama 2 (dua) minggu.
 - e. Apabila Lembaga Internasional akan melakukan analisis spasial bekerja sama dengan Pihak Ketiga terhadap IGT yang diperoleh, maka Lembaga Internasional harus menyampaikan *copy* surat/dokumen Kerja Sama (Kontrak), Pakta Integritas yang ditandatangani Lembaga Internasional dan Pakta Integritas yang ditandatangani Pihak Ketiga kepada Walidata Geospasial.
 - f. Lembaga Internasional wajib menyampaikan laporan hasil penggunaan IGT ke Walidata Geospasial.
 - g. Permohonan IGT yang berasal dari Lembaga Internasional, yang tidak memenuhi syarat sebagaimana pada huruf **a point (1)** di atas, maka permohonan IGT hanya dalam format *mapservice* pada menu peta interaktif dan format PDF/JPG pada menu peta cetak.
 - h. Alur penyebaran IGT ke Lembaga Internasional sebagaimana **Alur 8**.
9. Tata Cara Penyebarluasan IGT ke Pengguna Eksternal KLHK Non Instansi Pemerintah (Swasta/Badan Usaha, Perorangan, Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat) melalui Portal SIGAP (Jpg, Pdf, *Map Service*).
 - a. Pengguna mengakses portal SIGAP KLHK melalui alamat URL: <https://sigap.menlhk.go.id/>.
 - b. Melakukan akses data pada menu peta cetak (untuk format jpg dan pdf), peta interaktif (untuk data *map service*) dan analisis spasial (untuk data grafik dan tabular).
 - c. Apabila pengguna ingin mengakses menu analisis spasial, pengguna harus melakukan registrasi dengan mengisi formulir isian dan mengunggah surat tugas atau identitas diri untuk mendapatkan persetujuan dari admin SIGAP.
 - d. Alur penyebaran IGT kepada Eksternal KLHK (Swasta/Badan Usaha, Perorangan, Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat) melalui Portal SIGAP (Jpg, Pdf, *Map Service*) sebagaimana **Alur 9**.

B. Penggunaan IGT Bersumber Dari Eksternal KLHK

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, telah disediakan Portal KSP untuk mengakses IGT dari berbagai Kementerian/Lembaga. Akses ke Portal KSP diberikan kepada penanggung jawab portal pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Untuk Pengguna internal KLHK yang memerlukan IGT dari Kementerian/Lembaga yang tersedia pada Portal KSP difasilitasi oleh Walidata Geospasial untuk mengunduh dari Portal KSP. Apabila Produsen DG memperoleh IGT dari eksternal KLHK (K/L lain) maka Produsen DG menyampaikan IGT tersebut kepada Walidata Geospasial untuk berbagi pakai di internal KLHK. Penyebarluasan IGT yang dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga dan Instansi Pemerintah lain, dapat diperoleh Pengguna internal KLHK dengan mengajukan permohonan kepada Walidata Geospasial dan menandatangani BAST.

IGT yang bersumber dari Eksternal KLHK hanya dapat disebarluaskan untuk internal KLHK. Apabila ada permohonan terhadap IGT yang bersumber dari eksternal KLHK (termasuk citra satelit) oleh pengguna di luar KLHK, maka diarahkan kepada penanggung jawab atau Walidata sesuai yang telah ditetapkan pada Keputusan Kepala BIG Nomor 16 Tahun 2023 tentang Walidata Informasi Geospasial Tematik.

BAB V

KETENTUAN LAINNYA

1. Seluruh Tim Pelaksana JIG KLHK (Walidata Geospasial, Produsen DG, BPKHTL, pemegang hak akses/akun) wajib menandatangani Pakta integritas untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data.
2. Tim Pelaksana JIG KLHK dilarang menyalahgunakan dan memperjualbelikan DG dan IGT untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Unit kerja selain Walidata Geospasial dan BPKHTL dilarang menyebarluaskan IGT kepada pengguna atau pihak lain.
4. BPKHTL harus menggunakan IGT pemutakhiran terbaru yang bersumber dari basisdata geospasial SIGAP KLHK di Walidata Geospasial dan menyertakan informasi sumber dan periode *update* IGT dalam setiap penyebaran IGT kepada pengguna.
5. Penyebarluasan IGT harus dilampiri dengan Kamus Data Geospasial KLHK versi terbaru untuk menjelaskan keterangan atribut dan *field* IGT dimaksud, sehingga memudahkan pengguna dalam menggunakan IGT.
6. IGT yang telah tersedia pada portal KSP tidak termasuk dalam IGT yang disebarluaskan oleh Walidata Geospasial/BPKHTL kepada pengguna eksternal KLHK.
7. Penggunaan DG dan IGT LHK yang dilakukan oleh Pihak Ketiga dalam rangka kerjasama dengan pengguna internal dan eksternal, maka Pihak Ketiga dimaksud wajib menandatangani Pakta Integritas.
8. Pengguna dapat menggunakan DG dan IGT sesuai dengan tujuan permohonan atau pun untuk kegiatan lainnya dalam instansi/unit kerja pengguna dengan tetap menyebutkan sumber dan tahun data, serta tidak melakukan perubahan apa pun.
9. Pengguna dilarang mengubah dan membuat salinan DG dan IGT, serta menyebarluaskan/memindahtangankan/memperjualbelikan kepada pihak lain, termasuk membuat *mapservice* yang ditayangkan pada portal atau website pengguna. Penyebarluasan hanya dapat dilakukan dalam bentuk hasil analisis dan pemaduan data dengan mencantumkan sumber datanya.
10. Penyajian IGT format *map service* pada geoportal atau aplikasi sistem informasi berbasis spasial selain SIGAP KLHK harus terintegrasi atau menggunakan IGT bersumber dari Basis Data Geospasial SIGAP KLHK setelah mendapatkan persetujuan oleh Walidata Geospasial. Selain Walidata Geospasial **tidak** diperbolehkan membuat *map service* dari IGT lingkup KLHK yang disajikan pada sistem informasi atau geoportal atau aplikasi berbasis spasial.

11. Pengguna wajib melaporkan hasil analisis atau kesimpulan dari kegiatan penggunaan DG dan IGT LHK melalui email dengan alamat webgis@menlhk.go.id sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas DG dan IGT LHK.
12. Pengguna wajib memantau dan menjamin Pihak ketiga yang membantu melaksanakan proses analisis DG dan IGT LHK, untuk tidak menggunakan DG dan IGT dimaksud bagi tujuan lain selain kegiatan kerjasama dengan pengguna yang telah disepakati secara tertulis.
13. Walidata Geospasial memiliki kewenangan menutup sementara hak akses DG dan IGT bagi Produsen DG yang tidak aktif dalam melakukan pemutakhiran dan pelaporan berkala kondisi DG dan IGT yang menjadi tanggungjawabnya setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi. Penutupan akses dilakukan terhadap akun Produsen DG sebagai pengguna untuk mengunduh DG dan IGT lain yang bukan menjadi tanggung jawabnya sampai dengan dipenuhinya kewajiban Produsen DG.
14. Terhadap indikasi penyimpangan dalam penyebarluasan IGT oleh personil Walidata Geospasial dan BPKHTL yang tidak sesuai dengan ketentuan, akan dilakukan penutupan akses oleh admin dan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
15. Terhadap indikasi penyimpangan dalam penggunaan DG dan IGT oleh pengguna yang tidak sesuai dengan ketentuan, akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
16. Pengguna yang tidak melaporkan hasil analisis atau kesimpulan kegiatan dari penggunaan DG dan IGT, maka tidak diberikan layanan data pada permohonan berikutnya.
17. Mekanisme berbagi dan penyebarluasan citra satelit menyesuaikan dengan peraturan ini.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Walidata Geospasial melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyebarluasan IGT dan melaporkannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
2. BPKHTL melakukan monitoring pelayanan Penyebarluasan IGT dan melaporkan hasilnya kepada Walidata Geospasial paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun, **paling lambat** pertengahan bulan Januari tahun berikutnya.

BAB VII PENUTUP

Sejak ditetapkannya PROSEDUR ini, maka penyebarluasan IGT lingkup KLHK mengacu pada ketentuan dalam PROSEDUR ini. Apabila terjadi perubahan dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik lingkup KLHK yang menyebabkan ketentuan dalam PROSEDUR ini tidak sesuai lagi, maka PROSEDUR ini akan ditinjau kembali.

Formulir 1. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Bertindak : Walidata Geospasial/BPKHTL/Produsen Data Geospasial/
untuk dan atas Pemegang Hak Akses/Pengguna*
nama

Berdasarkan Keputusan Nomor tanggal tentang, serta dalam rangka Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial Tematik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang terintegrasi, aman dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Melakukan tugas sebagai Walidata Geospasial/BPKHTL/Produsen Data Geospasial/Pemegang Hak Akses/Pengguna Non Produsen DG, UPT KLHK, Instansi Pemerintah atau Perguruan Tinggi* dalam Jaringan Informasi Geospasial KLHK sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan IGT Lingkup KLHK;
2. Menjaga dan mengamankan serta tidak akan melakukan perubahan DG dan Informasi Geospasial Tematik yang bersumber dari SIGAP KLHK;
3. Tidak akan menyalahgunakan dan memperjualbelikan data dan Informasi Geospasial Tematik untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotism (KKN);
4. Tidak akan menyebarluaskan data dan Informasi Geospasial Tematik LHK kepada pihak lain yang tidak sesuai ketentuan;
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nama tempat/Kota, tanggal, bulan, tahun

(Tanda tangan)
Meterai 10.000

(Nama dan NIP)

*Pilih salah satu

Daftar 1. Daftar Informasi Geospasial Tematik Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta

NO	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK	PRODUSEN DG
1.	Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Penutupan Lahan, Skala 1:250.000 Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Kawasan Hutan, Skala 1:250.000	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Ditjen PKTL
2.	Penghentian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPIB), Skala 1:250.000	
3.	Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK), Skala 1:50.000	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Ditjen PKTL
4.	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasi Produksi/Non Tambang, Skala 1:50.000 Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Eksplorasi, Skala 1:50.000	
5.	Kawasan Hutan, Skala 1:250.000	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Ditjen PKTL
6.	Penetapan Kawasan Hutan, Skala 1:50.000	
7.	Pelepasan Kawasan Hutan, Skala 1:50.000	
8.	Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH), Skala 1:250.000	
9.	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Skala 1:250.000 dan Skala 1:500.000	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Ditjen PKTL
10.	Zonasi Taman Nasional (TN), Skala 1:50.000 Blok Kawasan Konservasi, Skala 1:50.000	Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi, Ditjen KSDAE
11.	Lahan Kritis, Skala 1:50.000	Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS, Ditjen PDASRH
12.	Rawan Erosi, Skala 1:50.000	
13.	Klasifikasi Daerah Aliran Sungai, Skala 1:50.000	
14.	Mangrove, Skala 1:25.000	Direktorat Rehabilitasi Perairan

NO	INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK	PRODUSEN DG
		Darat dan Mangrove, Ditjen PDASRH
15.	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Skala 1:50.000	Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan, Ditjen PHL
16.	Tata Batas Areal Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, Skala 1:50.000	Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Ditjen PHL
17.	Fungsi Ekosistem Gambut (FEG), Skala 1:50:000 dan Skala 1:250:000	Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Ditjen PPKL
18.	Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG), Skala 1:50.000 dan Skala 1:250.000	
19.	Pemantauan Sampah Laut, Skala 1:250.000	Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir Laut, Ditjen PPKL
20.	Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Skala 1:250.000	Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Ditjen PPI
21.	Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD), Skala 1:50.000	Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial, Ditjen PSKL
22.	Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm), Skala 1:50.000	
23.	Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR), Skala 1:50.000	
24.	Izin Pengelolaan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS), Skala 1:50.000	
25.	Penetapan Status Hutan Adat, Skala 1:50.000	Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Ditjen PSKL

Formulir 2. Berita Acara Serah Terima Data dan Informasi



KOP SURAT

BERITA ACARA
SERAH TERIMA DATA DAN INFORMASI
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Email :
No. Telepon/Ext :
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

telah melakukan serah terima data dan informasi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Data/ Nama IGT dan Skala	Cakupan Wilayah	Format

PIHAK KEDUA menerima data dan informasi yang diberikan **PIHAK PERTAMA** dengan penuh tanggung jawab serta berusaha memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mempergunakan data dan informasi yang diberikan oleh Walidata Geospasial KLHK/BPKHTL* hanya untuk keperluan instansi/lembaga;
2. Menjaga agar data dan informasi sebagaimana tersebut dalam rincian di atas tidak dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari Walidata Geospasial KLHK;
3. Memberikan informasi, hasil analisis, dan kesimpulan dari hasil kegiatan (sebagaimana disebut pada butir 1) kepada Walidata Geospasial KLHK/BPKHTL*;
4. Tidak membuat salinan dari data dan informasi yang diberikan kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai keperluan tersebut di atas;

5. Tidak menyebarluaskan data dan informasi yang diberikan oleh Walidata Geospasial KLHK/BPKHTL* kepada pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan;
6. Wajib mencantumkan sumber data jika memadukan data dan/atau menyebarluaskan dalam produk Informasi sebagai kelengkapan metadata;
7. Berita acara serah terima data dan informasi sebagaimana terlampir agar ditandatangani kemudian di kirimkan kembali kepada kami melalui email webgis@menlhk.go.id.

Pelanggaran butir-butir kesepakatan di atas adalah hal serius dan jika **PIHAK KEDUA** atau pihak manapun yang berafiliasi dengan **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran dari butir-butir di atas, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mendapatkan sanksi yang akan dijatuhkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(Nama dan NIP)

(Nama dan NIP)

*Catatan: * Pilih salah satu*

Formulir 3. Berita Acara Serah Terima Akun SIGAP



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
DIREKTORAT INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

Gedung Manggala Wanabakti Blok I. Lantai 7
Jl. Jenderal Gatot Subroto Telpon: (021) 5730335 – 5730292 Fax: (021) 5730111 Jakarta 10065

BERITA ACARA
SERAH TERIMA AKUN SIGAP KLHK

NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal ... bulan ... tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Sub Direktorat Jaringan Informasi Geospasial LHK

Instansi : Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
Jabatan :
Instansi :
Alamat Email :
No. Telepon/Ext :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan *username* dan *password* akses SIGAP KLHK kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan jaminan keamanan dan kerahasiaan *username* dan *password* akses yang sudah diserahkan kepada **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa tingkat kerahasiaan *username* dan *password* akses yang diserahkan, serta data dan informasi geospasial yang termuat dalam SIGAP KLHK adalah **rahasia**;
3. **PIHAK KEDUA** sepenuhnya memegang tanggung jawab dan tanggung gugat atas penggunaan akun SIGAP KLHK;
4. **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan untuk menyebarluaskan akses SIGAP KLHK berikut data dan informasi geospasial di dalamnya kecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengatur kegiatan berbagi pakai data SIGAP KLHK.

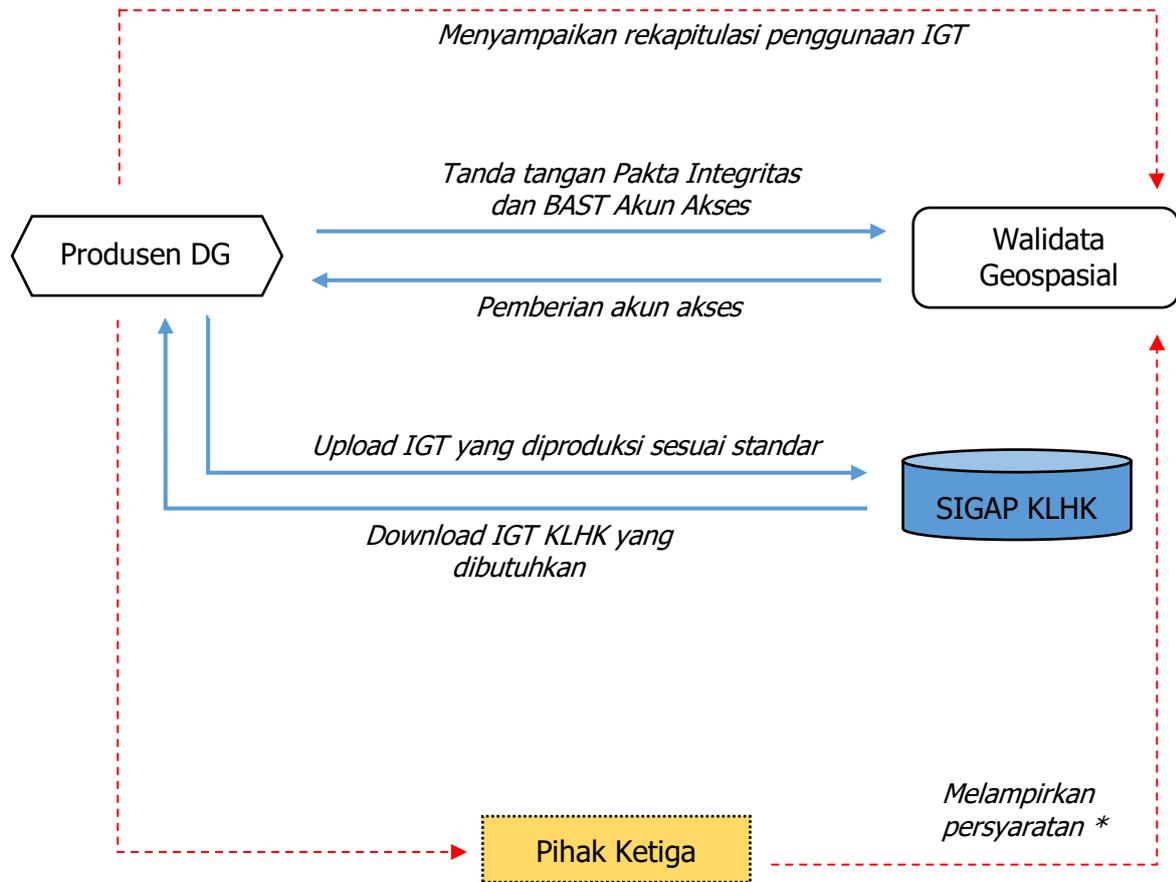
PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(Nama dan NIP)

(Nama dan NIP)

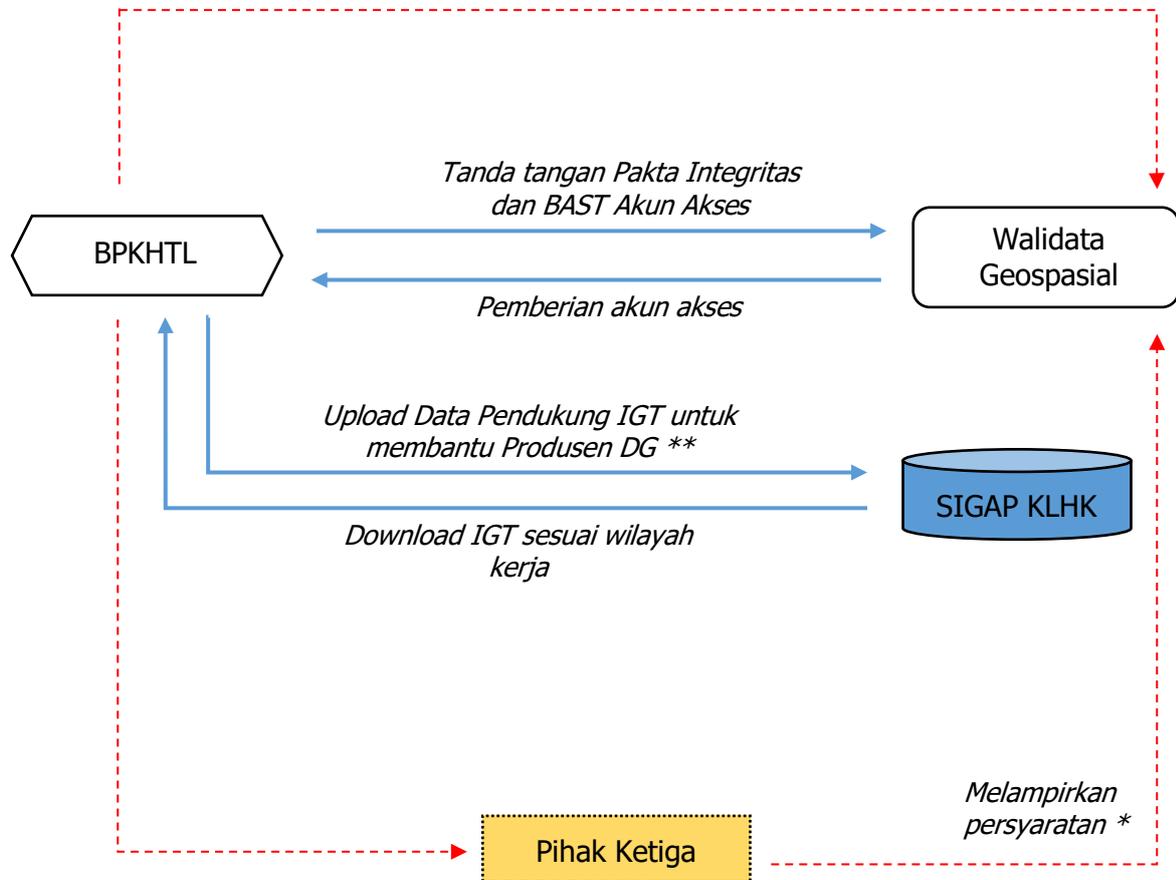
Alur 1. Penyebarluasan IGT ke Produsen DG.



Persyaratan *:

1. *Copy* surat/dokumen Kerjasama/kontrak Produsen DG dengan Pihak Ketiga.
2. Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga.

Alur 2. Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik ke Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan.

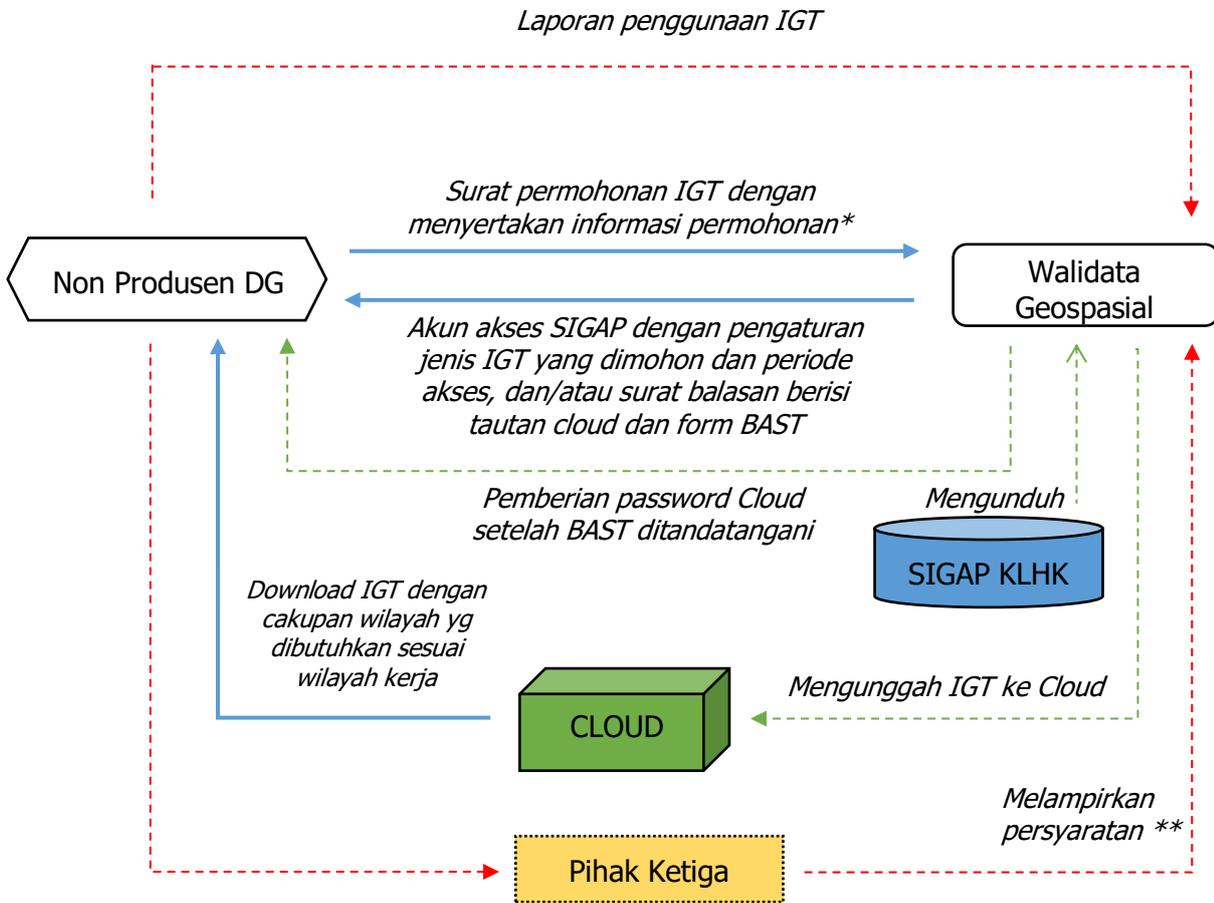


Persyaratan *:

1. *Copy* surat/dokumen Kerjasama/kontrak BPKHTL dengan Pihak Ketiga.
2. Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga.

** Data geospasial yang diunggah oleh BPKHTL untuk membantu Produsen DG sebagaimana **Daftar 2**.

Alur 3. Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik ke Pengguna Non Produsen Data Geospasial (Unit kerja Eselon II selain Produsen Data Geospasial)



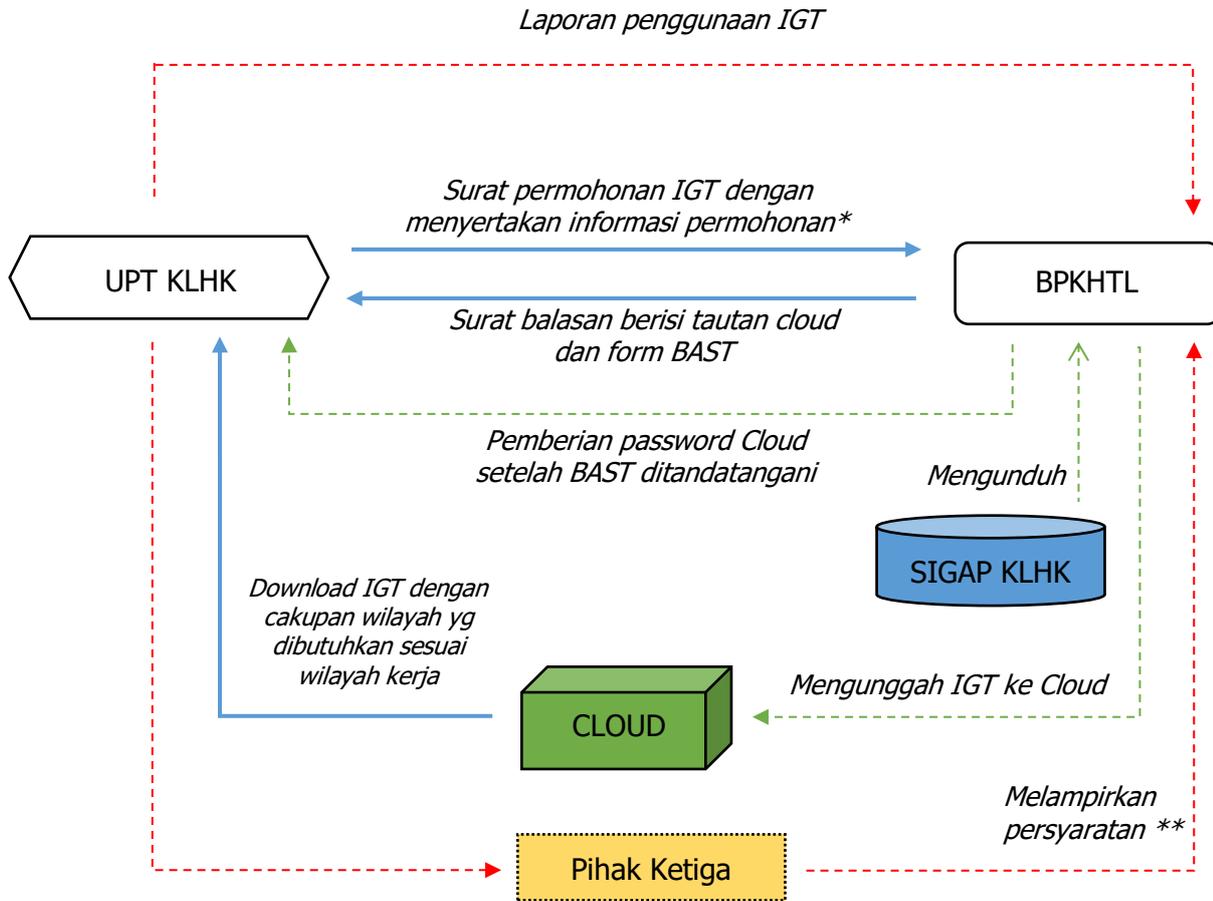
Informasi permohonan *:

1. Nama IGT dan cakupan wilayah yang dibutuhkan
2. Tujuan penggunaan IGT
3. Nama petugas yang ditunjuk dan Pakta Integritas
4. Narahubung

Persyaratan **:

1. Copy Surat Perjanjian/Kerjasama/kontrak dengan Pihak Ketiga
2. Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga

Alur 4. Penyebarluasan IGT ke Pengguna Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK



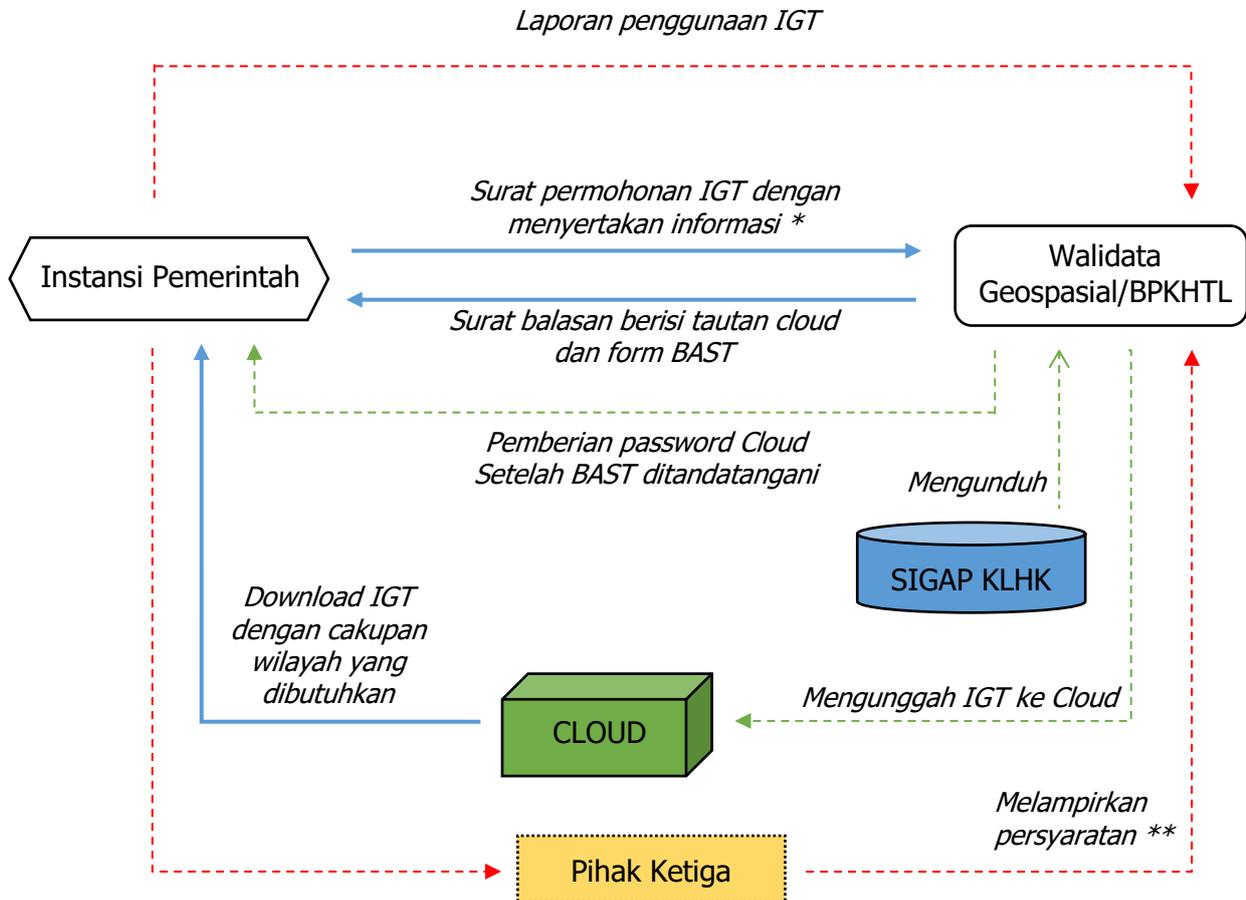
Informasi permohonan *:

1. Nama IGT dan cakupan wilayah yang dibutuhkan
2. Tujuan penggunaan IGT
3. Narahubung

Persyaratan **::

1. Copy Surat Perjanjian/Kerjasama/kontrak dengan Pihak Ketiga
2. Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga.

Alur 5. Penyebarluasan IGT ke Pengguna Eksternal KLHK Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga Pemerintah di pusat dan daerah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan BUMN/BUMD).



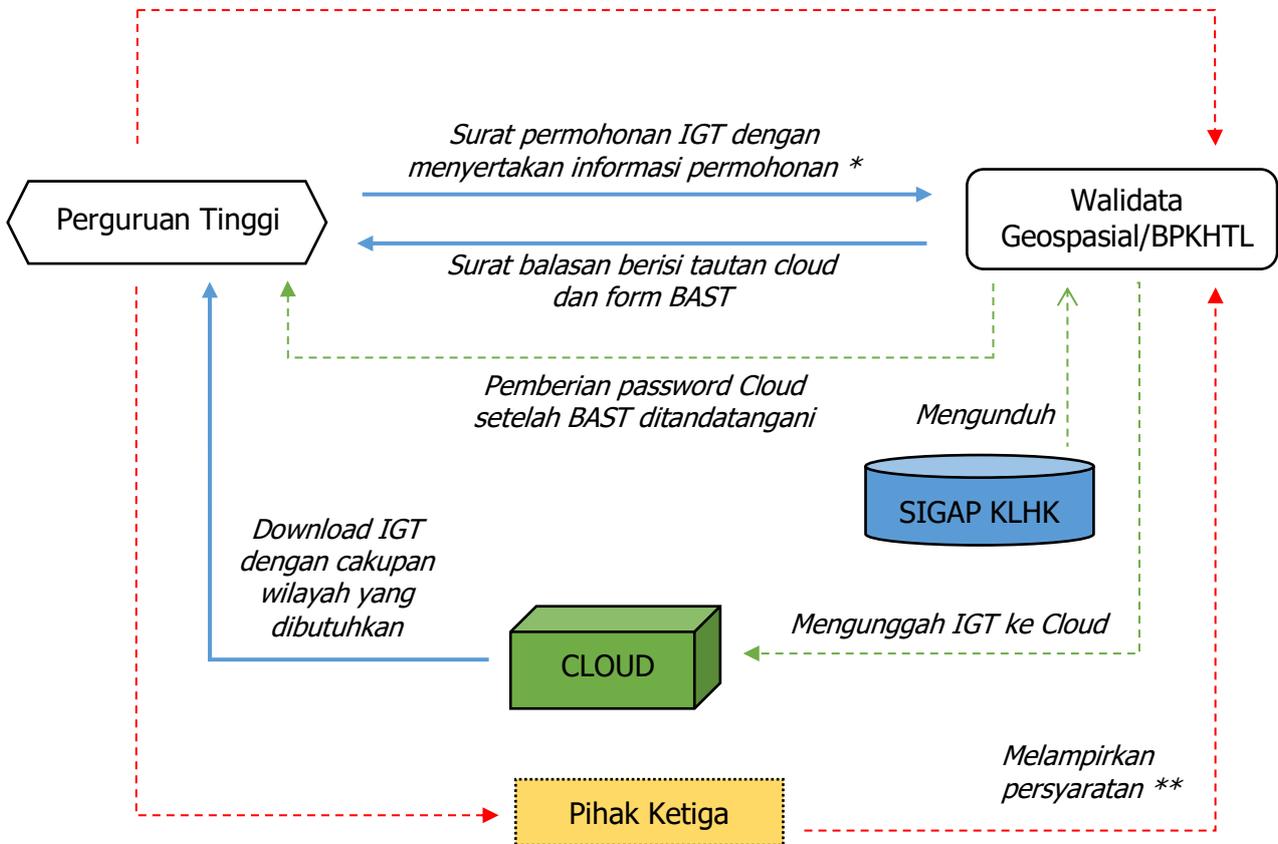
Informasi *:

1. Nama IGT dan cakupan wilayah yang dibutuhkan
2. Tujuan penggunaan IGT
3. Narahubung

Persyaratan **:

1. Copy Surat Perjanjian/Kerjasama/kontrak dengan Pihak Ketiga
2. Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga

Alur 6. Penyebarluasan IGT ke Perguruan Tinggi.



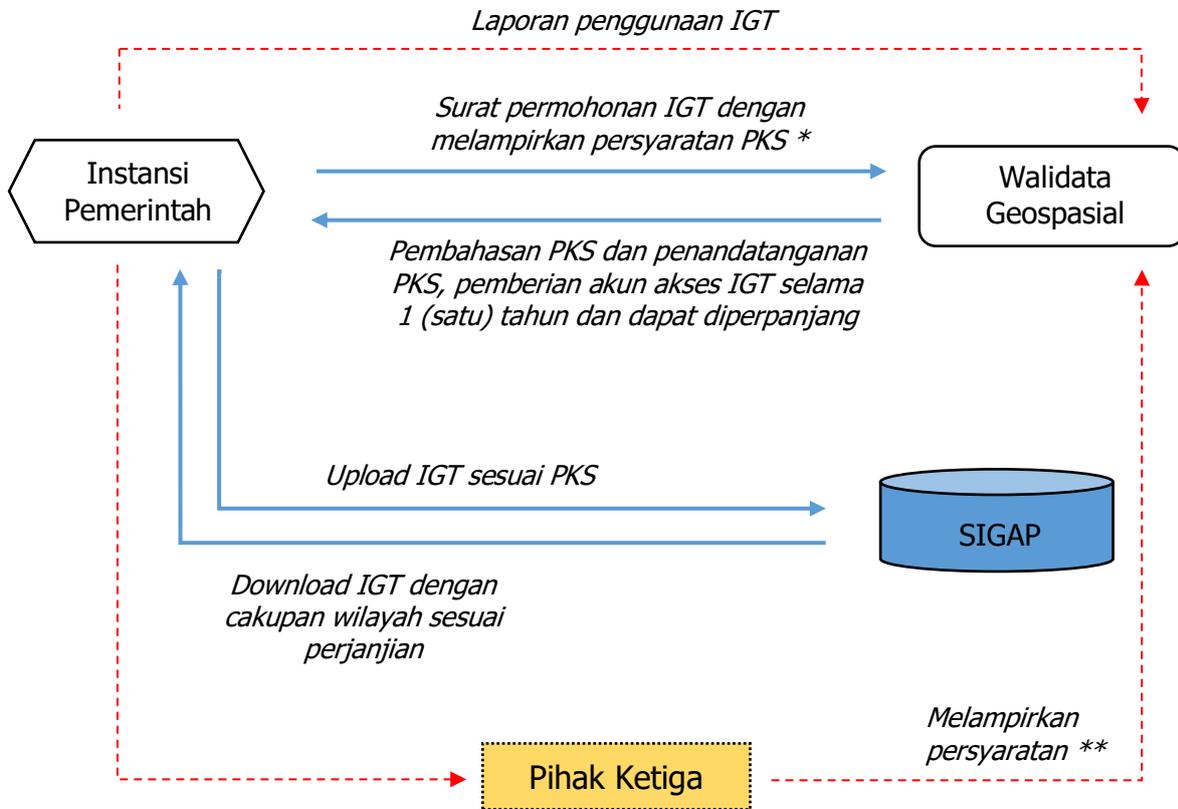
Informasi permohonan*:

1. Proposal penelitian yang disahkan
2. Nama IGT dan cakupan wilayah yang dibutuhkan
3. Tujuan penggunaan IGT
4. Narahubung
5. Untuk Perguruan Tinggi Luar Negeri: menyatakan pemohon adalah WNI dan/atau copy kerja sama Perguruan Tinggi dengan instansi di Indonesia

Persyaratan **:

1. Copy Surat Perjanjian/Kerjasama/kontrak dengan Pihak Ketiga
2. Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga

Alur 7. Penyebarluasan IGT melalui mekanisme Perjanjian Kerja Sama Pertukaran Data Instansi Pemerintah (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan BUMN/BUMD).



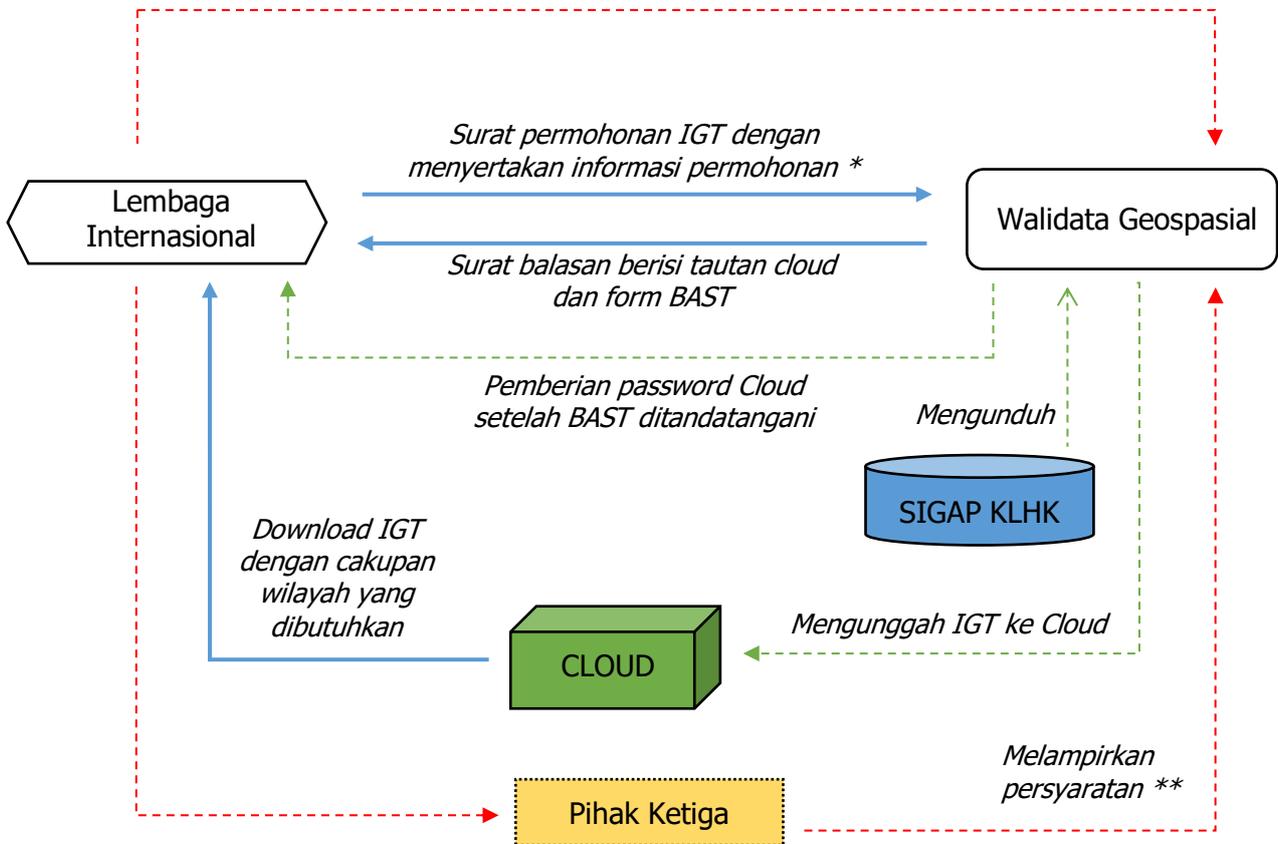
Persyaratan PKS *:

1. Peraturan terkait kelembagaan JIG dan Penyelenggaraan IGT lingkup pemohon
2. Mekanisme (SOP) berbagi data pada internal pemohon
3. Surat penunjukan tenaga teknis
4. Pakta Integritas tenaga teknis
5. Nama IGT dan cakupan wilayah

Persyaratan **::

1. Copy Surat Perjanjian/Kerjasama/kontrak dengan Pihak Ketiga
2. Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga

Alur 8. Penyebarluasan IGT ke Lembaga Internasional.



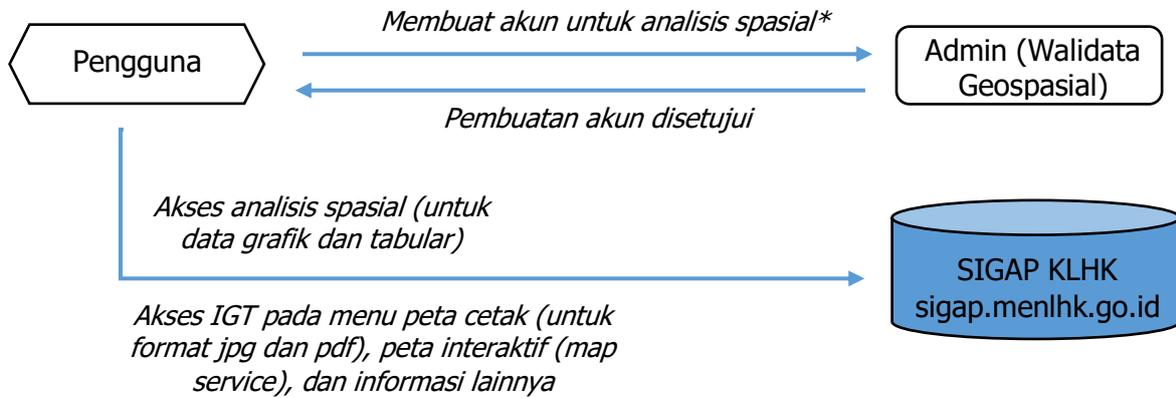
Informasi permohonan*:

1. Copy surat/dokumen Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga dan/atau Perguruan Tinggi di Indonesia
2. Nama IGT dan cakupan wilayah yang dibutuhkan
3. Tujuan penggunaan IGT
4. Narahubung

Persyaratan **:

1. Copy Surat Perjanjian/Kerjasama/kontrak dengan Pihak Ketiga
2. Pakta Integritas oleh Pihak Ketiga

Alur 9. Penyebarluasan IGT ke Eksternal KLHK Bukan Instansi Pemerintah (Swasta/Badan Usaha, Perorangan, Kelompok Orang/Lembaga Swadaya Masyarakat) melalui Portal SIGAP (Jpg, Pdf, Map Service).

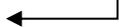


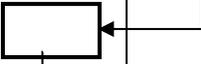
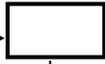
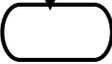
Daftar 2. Data Geospasial Dukungan BPKHTL kepada Produsen Data Geospasial

No.	DG Dukungan BPKHTL	IGT yang Didukung	Produsen
1.	Hasil penafsiran citra satelit	Penutupan Lahan Kawasan Hutan	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH)
		Penutupan Hutan	
2.	Hasil enumerasi TSP/PSP dan reenumerasi TSP/PSP	Potensi Hutan	
3.	Hasil survei hutan alam primer dan gambut	PIPIB	
4.	Hasil realisasi dan validasi penentuan T2 IHN di lapangan	Sebaran Klaster Inventarisasi Hutan Nasional	
5.	Persetujuan penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Operasi Produksi/Non Tambang dan Eksplorasi)	Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH)
6.	Kerja sama penggunaan kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur	Persetujuan Kerja Sama Penggunaan Kawasan Hutan	
7.	Tata batas kawasan hutan	Kawasan Hutan	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan (PPKH)
		Penetapan Kawasan Hutan	
		Pelepasan Kawasan Hutan	
		Rekalkulasi Batas Kawasan Hutan	
8.	Rekonstruksi batas kawasan hutan	Kawasan Hutan	
9.	Verifikasi karakteristik bentang alam dalam rangka verifikasi jasa lingkungan hidup tinggi	Karakteristik Bentang Alam	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor (PDLKWS)
10.	Verifikasi karakteristik vegetasi alami dalam rangka verifikasi jasa lingkungan hidup tinggi	Karakteristik Vegetasi Alami	

Prosedur Pelayanan Permohonan IGT di Walidata Geospasial

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Direktur IPSDH	Kasubdit JIGLHK	Kapokja Basisdata	Staf Pokja Basisdata	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Memberikan disposisi/ penugasan kepada Kasubdit untuk melakukan pelayanan permohonan IGT					Disposisi Direktur atas Surat Permohonan IGT	30 Menit	Lembar disposisi Direktur
2.	Memberikan disposisi/ penugasan kepada Kapokja Pengelolaan Basisdata IG untuk melakukan pelayanan permohonan IGT					Disposisi Kasubdit atas Surat Permohonan IGT	30 Menit	Lembar disposisi Kasubdit
3.	Memberikan disposisi/ penugasan kepada staf Pokja Pengelolaan Basisdata IG untuk melakukan pelayanan permohonan IGT					Penugasan oleh Kapokja atas Surat Permohonan IGT	30 Menit	Lembar disposisi Kapokja
4.	Mengisi formulir monitoring pelayanan IGT					Formulir monitoring pelayanan IGT	30 Menit	Isian formulir
5.	Mengonsep surat balasan permohonan IGT dan BAST datin					Konsep surat balasan, BAST datin	60 Menit	Surat balasan, BAST datin
6.	Menyiapkan IGT yang diminta dengan mengunduh dari SIGAP /Basis Data Geospasial KLHK					SIGAP, Basis Data Geospasial	120 Menit	IGT yang diminta sesuai cakupan wilayah
7.	Menyiapkan tautan BAST dan IGT serta mengunggah IGT yang dimohon					Dokumen BAST, data IGT, cloud	120 Menit	BAST dan IGT terunggah pada cloud
8.	Memeriksa kelengkapan data dan memberikan paraf pada konsep surat balasan dan BAST datin					Konsep surat balasan	30 Menit	Konsep surat balasan dan BAST yang telah diparaf
9.	Memeriksa dan memberikan paraf pada konsep surat balasan, serta menandatangani BAST datin					Konsep surat balasan dan BAST datin	30 Menit	Konsep surat balasan yang telah diparaf dan BAST datin yang telah ditandatangani



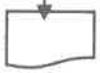
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Direktur IPSDH	Kasubdit JIGLHK	Kapokja Basisdata	Staf Pokja Basisdata	Kelengkapan	Waktu	Output
10.	Menandatangani konsep surat balasan					Konsep final surat balasan	30 Menit	Surat yang telah ditandatangani
11.	Menyampaikan surat balasan dan BAST					Surat balasan, BAST datin	30 Menit	Email Surat balasan dan BAST datin
12.	Memberikan akun/ password akses IGT					Password akses IGT	30 Menit	Akun cloud
13.	Mengarsipkan surat balasan, BAST dan mengisi rekapitulasi monitoring pelayanan IGT					Surat dan BAST yang telah ditandatangani lengkap	30 Menit	Arsip surat dan BAST; Matrik monitoring pelayanan IGT

Jumlah waktu total 600 menit

Prosedur Pelayanan Permohonan IGT di BPKHTL

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Kepala BPKHTL	Kasi ISDHTL	Staf Seksi ISDHTL	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Memberikan disposisi/ penugasan kepada Kasi ISDHTL untuk melakukan pelayanan permohonan IGT				Disposisi Kepala Balai atas Surat Permohonan IGT	30 Menit	Lembar disposisi Kepala Balai
2.	Memberikan disposisi/ penugasan kepada staf Seksi ISDHTL untuk melakukan pelayanan permohonan IGT				Penugasan oleh Kasi atas Surat Permohonan IGT	30 menit	Lembar disposisi Kasi ISDHTL
3.	Mengisi formulir monitoring pelayanan IGT				Formulir monitoring pelayanan IGT	30 Menit	Isian formulir
4.	Mengonsep surat balasan permohonan IGT dan BAST datin				Konsep surat balasan, BAST datin	60 Menit	Surat balasan, BAST datin
5.	Menyiapkan IGT yang diminta dengan mengunduh dari SIGAP /Basis Data Geospasial KLHK				SIGAP, Basis Data Geospasial	120 Menit	IGT yang diminta sesuai cakupan wilayah
6.	Menyiapkan tautan BAST dan IGT serta mengunggah IGT yang dimohon				Dokumen BAST, data IGT, cloud	120 Menit	BAST dan IGT terunggah pada cloud
7.	Memeriksa kelengkapan data dan memberikan paraf pada konsep surat balasan dan BAST datin				Konsep surat balasan	30 Menit	Konsep surat balasan dan BAST yang telah diparaf
8.	Menandatangani konsep surat balasan				Konsep final surat balasan	30 Menit	Surat yang telah ditandatangani
9.	Menyampaikan surat balasan dan BAST				Surat balasan, BAST datin	30 Menit	Email Surat balasan dan BAST datin
10.	Memberikan akun/ password akses IGT				Password akses IGT	30 Menit	Akun cloud



No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Kepala BPKHTL	Kasi ISDHTL	Staf Seksi ISDHTL	Kelengkapan	Waktu	Output
13.	Mengarsipkan surat balasan, BAST dan mengisi rekapitulasi monitoring pelayanan IGT				Surat dan BAST yang telah ditandatangani lengkap	30 Menit	Arsip surat dan BAST; Matrik monitoring pelayanan IGT

Jumlah waktu total 540 menit.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA